

SPEKTRUM

Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional
Volume 13 No. 1 Januari 2016

SPEKTRUM Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional adalah media pemikiran bidang Ilmu Politik Hubungan Internasional berupa hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun studi kepustakaan. Terbit pertama kali pada tahun 2004 dengan frekuensi terbit dua kali setahun pada bulan Januari dan Juli.

Penanggung jawab:

Dekan FISIP UNWAHAS
Andi Purwono, S.IP., M.Si.

Ketua Penyunting:

Zudi Setiawan, S.IP., M.Si.

Sekretaris Penyunting:

Muhammad Nuh, S.Sos., M.Si.

Penyunting Pelaksana:

Agus Riyanto, S.IP., M.Si.
Adi Joko Purwanto, S.IP., M.A.
Dra. Hj. Ismiyatun, M.Si.
Harun, S.IP., M.Si.

Penyunting Ahli:

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.
Prof. Dr. Mohtar Mas'ood, M.A.
Dr. H. Noor Achmad, M.A.

Tata Usaha:

A. Syihabul Muttaqin
Staf Tata Usaha FISIP UNWAHAS

Alamat Redaksi:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim
Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Semarang 50236
Telp. (024) 8505680 Fax. (024) 8505680
e-mail: jurnalspektrum@yahoo.co.id

SPEKTRUM Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional diterbitkan oleh
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim

SPEKTRUM

Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional
Volume 13 No. 1 Januari 2016

DAFTAR ISI

PANCASILA IDEOLOGI NEGARA MULTIKULTURAL Muhammad Nuh	4
IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI PEREKAT KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Zudi Setiawan	13
PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN DI PROVINSI JAWA TENGAH (STUDI ANALISIS RESPONSIF GENDER KOTA SEMARANG) Suharto	21
MODEL PENGELOLAAN KONFLIK POLITIK PADA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KOTA TASIKMALAYA Moh. Ali Andreas, Akhmad Satori	35
ISU ISLAMOPHOBIA DI AUSTRALIA PADA MASA KEPEMIMPINAN PM TONY ABBOTT Anna Yulia Hartati, Ahmad Hanafi Ash Shiddiq.....	49
INTERREGIONALISME: DUKUNGAN UE TERHADAP MASYARAKAT ASEAN Irwan Iskandar	61
POPULISME DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI DI INDONESIA Imelda Masni Juniaty Sianipar	77

SPEKTRUM

Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional
Volume 13 No. 1 Januari 2016

SALAM REDAKSI

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Derasnya arus globalisasi di segala bidang kehidupan kita saat ini telah menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan. Di tengah arus perubahan inilah kemudian muncul berbagai persoalan baru di tengah masyarakat. Era reformasi di Indonesia telah memberikan peluang bagi tumbuhnya gerakan-gerakan dengan berbagai varian ideologinya. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mendapatkan tantangan serius. Di sisi lain, laju globalisasi juga telah mempengaruhi bagaimana suatu negara harus memainkan peran internasionalnya dalam berhubungan dengan negara-negara lain.

Untuk menjawab persoalan di bidang ilmu politik dan hubungan internasional inilah maka Jurnal SPEKTRUM kembali hadir ke tengah-tengah publik pembaca. Edisi ini mencoba mengetengahkan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan dinamika reformasi di Indonesia serta semakin derasnya arus globalisasi di seluruh dunia.

Redaksi Jurnal SPEKTRUM dalam setiap edisinya terus berupaya meningkatkan kualitas, baik isi maupun format penerbitannya. Tentunya pada edisi-edisi yang akan datang, sajian kami akan terus kami tingkatkan lagi sehingga Jurnal SPEKTRUM ini akan semakin berbobot dalam mengupas masalah-masalah aktual dalam lingkup kajian ilmu politik dan hubungan internasional. Dengan begitu, maka manfaatnya akan dapat dirasakan oleh publik pembaca Jurnal SPEKTRUM. Selamat membaca dan memperkaya khasanah wawasan akademis kita!

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Redaksi

PANCASILA IDEOLOGI NEGARA MULTIKULTURAL**Muhammad Nuh, S.Sos.,M.Si**Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim Semarang**Abstract**

Pancasila as an ideology has differences with the system open - liberal capitalism and socialism - communism . Pancasila ideology fully recognize and uphold and protect the rights of individuals and the rights of society, both in economics and politics . Thus the ideology of Pancasila admitted in harmony both collectivism and individualism . Developed democracy , not a mere political democracy as the liberal - capitalist ideology , but also of economic democracy . State religion in the struggle to uphold Pancasila principles should be laid out with wisdom , should not expose religion to the state or vice versa , but by putting religion as a source of aspiration and donate religious values which are then processed through the principles of democracy and the protection of the interests of the whole nation. While each religion in Indonesia to conduct their activities freely in the social dimension. This study was conducted to provide an overview of the present state of society after the reformation era aplenty popping trans flow into Indonesia's ideology in the name of religion and want Indonesia to become berideologikan Islamic state . NU struggles firmly stated that Pancasila is very precise in Indonesia with the diversity and plurality of Indonesia . Thus NU thoughts about Pancasila is expected to be enlightened about the importance of ideology Pancasila in Indonesia.

Keywords : Ideology , Rule Fiqiyah , Nahdlatul Ulama (NU)**Pendahuluan**

Ideologi negara Indonesia melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia disepakati Pancasila sebagai ideologi dengan diwarnai berbagai pergulatan dan lobi politik antara kaum muslim, non muslim, aliran kebatinan dan pihak kaum nasionalis berkaitan dengan piagam Jakarta (*Jakarta Charter*). Supaya tujuh kata “*dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*” dihapuskan. Pencoretan tujuh kata inilah yang menyebabkan kekecewaan umat Islam dan menjadi problem ideologis dari pemerintahan Soekarno-Hatta sampai dengan Orde Baru dimana Pancasila dipakai sebagai alat untuk menekan umat Islam. Kekhawatiran Soekarno dikarenakan adanya implikasi negatif terhadap kesatuan nasional jika orang-orang Islam Indonesia masih memaksakan tuntutan sebuah negara Islam¹.

Perkembangan fungsi Pancasila sejak tanggal 1 Juni sampai 18 Agustus 1945 mengalami perkembangan. Pancasila yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan dan kemudian disepakati oleh sidang Pleno BPUPKI merupakan modus kompromi antara kelompok yang memperjuangkan dasar negara nasionalisme dan kelompok yang memperjuangkan dasar negara Islam. berkembang menjadi modus kompromi antara kaum nasionalis, Islam dan Kristen-Katolik dalam hidup bernegara.

¹http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelidik_Usaha_Persiapan_Kemerdekaan_Indonesia.
Diunduh 27 Februari 2013 Jam. 22.00 WIB.

Perdebatan ideologi antara kelompok Islam dengan Pancasila menjadi dominan dalam perpolitikan nasional, dilatarbelakangi oleh kekecewaan kalangan Islam atas penghapusan Piagam Jakarta dari Pembukaan UUD 1945, dan penguasa (negara) menggunakan Pancasila sebagai alat untuk menekan kalangan Islam. Rentang tahun 1948 dan tahun 1962 terjadi pemberontakan Darul Islam melawan pemerintah pusat. pemberontak bersenjata yang berideologi Islam di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh meski akhirnya dapat ditumpas oleh Tentara Nasional Indonesia, ini menjadi bukti kongkret dari ancaman Islam. Kepala staf AD tahun 1959 mendesak Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 untuk kembali kepada UUD 1945 sebagai satu-satunya konstitusi Republik Indonesia.

Perdebatan persoalan ideologi yang terjadi rentang tahun 1959-an dan masalah lain belum dapat diselesaikan. Periode 1959 sampai peristiwa 30 September 1965 menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah, munculnya gerakan PKI yang berusaha menggulingkan pemerintahan, Pembubaran partai Islam terbesar Masyumi karena dituduh ikut terlibat pemberontakan regional berideologi Islam. Presiden Soekarno membatasi kekuasaan partai politik, pertengahan 1950-an, diusulkan oleh Soekarno agar rakyat menolak partai-partai politik karena mereka menentang konsep musyawarah dan mufakat yang terkandung dalam Pancasila². Hubungan Islam dengan Pancasila berhasil dirumuskan oleh KH Achmad Siddiq Rais Am PBNU 1984-1991. Dilakukan dalam mengantisipasi ketentuan yang mengharuskan ormas untuk berasas Pancasila.

Deklarasi tersebut adalah bagian dari Keputusan Munas Alim Ulama NU NO. II/MAUNU/1404/1983 yang isinya adalah³ :

1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
2. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
3. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah aqidah dan syari'ah meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.
4. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari'at agamanya.
5. Sebagai konsekwensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekwen oleh semua pihak.

Muktamar Nahdlatul Ulama ke 27 di Situbondo memutuskan bahwa Nahdlatul Ulama menerima Pancasila sebagai asas organisasi, dan menempatkan Islam sebagai akidah. Kedua hal itu dicantumkan di dalam Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama. Berdasarkan masalah tersebut dapat dikembangkan menjadi dua pertanyaan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah landasan pemikiran Nahdlatul Ulama (ijtihad) dalam menerima Pancasila sebagai ideologi ?. 2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Nahdlatul Ulama untuk mempertahankan pemikirannya terhadap Pancasila sebagai ideologi negara.?

²http://artpelajar.blogspot.com/2012/12/pengertian-sejarah_17.html diunduh 02 Maret 2013 Jam 23.00 WIB.

³Pemikiran KH. Achmad Siddiq dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan oleh Munas Alim Ulama NU yang menghasilkan "Deklarasi tentang Hubungan Islam dengan Pancasila". Salahuddin Wahid (2002), *Menggagas Peran Politik NU*, Pustaka Indonesia Satu, Jakarta. Hal. 29-30

Pembahasan

Menurut Thomas H, dalam Wikipedia⁴:*Ideologi adalah suatu cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya.* Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak tidak hanya sekadar pembentukan ide yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit. Memperbincangkan mengenai ideologi tidak bisa diabaikan, dalam proses demokratisasi, muncul konflik dan kekerasan yang dapat timbul sewaktu-waktu, orang kemudian menengok kembali pentingnya ideologi. Terdapat dua tipe ideologi sebagai ideologi suatu negara. Kedua tipe tersebut adalah ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial, yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Kebenaran suatu ideologi tertutup tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral yang lain. Isinya dogmatis dan apriori sehingga tidak dapat dirubah atau dimodifikasi berdasarkan pengalaman sosial. Karena itu ideologi ini tidak mentolerir pandangan dunia atau nilai-nilai lain.

Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dalam kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka⁵.

Perspektif Nahdlatul Ulama: Konsep Fiqih

Kaidah Fiqih (*Qawa'id fiqhiyyah*) sebagai landasan umum dalam perilaku sosial memberikan panduan bagi masyarakat untuk melakukan interaksi dengan sesamanya. Tulisan ini melaporkan hasil penelitian terhadap *qawa'id* dan implikasinya dalam pemikiran dan perilaku ekonomi dalam masyarakat. Dalam hal ini, pemahaman terhadap *qawa'id fiqhiyyah* adalah mutlak diperlukan untuk melakukan suatu "*ijtihad*" atau pembaharuan pemikiran. Konsep ilmu fiqih yang sering sekali menjadi landasan hukum para ulama Nahdlatul Ulama (*ijtihad*) dalam memutuskan persoalan-persoalan politik, sosial budaya, dan ekonomi menggunakan kaidah-kaidah termasuk penerimaan Nahdlatul Ulama terhadap ideologi Pancasila diantaranya :

1. ***Daar al-mafaasidi al-muqaddamu 'alaa jalbihi al-mashaalihh*** (menghindari kerusakan harus didahulukan atas melaksanakan kebaikan)⁶. Keputusan Nahdlatul Ulama untuk menerima terhadap penerapan kembali UUD 1945 tidak ada lain kecuali didasari oleh alam pikiran Nahdlatul Ulama bahwa "*daar al mafaasidi al-muqaddamu 'alaa jalbihi al mashaalihh*" yang artinya bahwa "menghindari kerusakan harus didahulukan atas melaksanakan kebaikan".

⁴<http://id.wikipedia.org/wiki/Ideologi>, diunduh 12 Juni 2013 Jam 00.28 WIB

⁵ Ideologi terbuka adalah ideologi yang mampu mengikuti perkembangan jaman dan bersifat dinamis atau merupakan suatu sistem pemikiran yang merupakan hasil konsensus dari masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai dari cita-citanya tidak dipaksakan dari luar tapi digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri. <http://hadiyantoprie.wordpress.com/mendeskrripsikan-pancasila-sebagai-ideologi-terbuka/> diunduh 01 September 2013. Jam : 9.59 WIB.

⁶<http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=1212>. Diunduh 17 Juni 2013 Jam : 19.30 WIB.

Negara Indonesia dalam waktu tiga tahun berada di dalam ketidakmenentuan. Negara yang baru merdeka seumur jagung ini sudah berada diujung pertarungan politik yang tidak menentu. Konflik ideologi antara Islam dan Komunisme juga sangat tajam. Komunisme yang berpijak pada atheism tentu sangat bertentangan dengan Islam yang sangat theism. Selama 3,5 tahun terjadi perdebatan tanpa akhir untuk menentukan dasar negara saja. Sehingga para wakil rakyat tersebut tidak sempat memikirkan bagaimana seharusnya pembangunan dilaksanakan. Dalam kondisi negara yang gawat tersebut, maka harus ada keberanian untuk menetapkan sesuatu yang dianggap penting. Jika dibiarkan, maka akan terjadi disintegrasi bangsa yang disebabkan oleh dasar ideologis dan konstitusi yang tidak jelas.

Di tengah suasana seperti ini, maka Nahdlatul Ulama mengambil keputusan agar kembali kepada UUD 1945 yang di dalamnya dijiwai oleh Piagam Jakarta dan kemudian terlibat di dalam pemerintahan. Nahdlatul Ulama terlibat di dalam Kabinet Karya yang dirancang oleh Presiden Soekarno. Dengan demikian, Nahdlatul Ulama telah meletakkan kepentingan bangsa dan negara jauh lebih penting dibandingkan dengan kepentingan Nahdlatul Ulama untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Mengamati terhadap kenyataan sejarah seperti ini, maka tentu tidak mengherankan jika Nahdlatul Ulama di masa sekarang tetap mempertahankan empat pilar kebangsaan, yaitu: NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Kebhinekaan. Jadi keputusan Nahdlatul Ulama ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, akan tetapi telah melampaui rentangan sejarah yang panjang.

2. ***Maa laa yudrak kulluhu laa yudrak kulluhu*** (apa yang tidak diperoleh semuanya jangan ditinggalkan semuanya). Dalam kaitan dengan qaidah ini penerimaan terhadap Pancasila dan UUD 1945 adalah merupakan antisipasi Nahdlatul Ulama untuk mempertahankan 'sebahagian' yang telah dicapai sebab untuk memperoleh 'semua' sebagai dasar negara tidak atau belum memungkinkan dan barangkali juga tetap akan menghadapi kesulitan yang tidak kecil atau malah justru jadi bumerang bagi Nahdlatul Ulama sendiri dan umat Islam.

Kewajiban yang tidak mungkin diwujudkan secara utuh tidak boleh ditinggalkan semuanya (bagian-bagian terpenting yang telah berhasil diwujudkan). Kenyataan bahwa negara Indonesia sudah terbentuk dan kekuasaan pemerintahan berfungsi melindungi esensi terpenting dari kehidupan kenegaraan harus diterima. Sudah tentu semula wujud formal negara yang memenuhi kualifikasi menurut syari'at Islam yang diperjuangkan karena ini merupakan perintah agama yang harus diikuti. Hal ini pun dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dalam sidang BPUPKI maupun Majelis Konstituante. Namun setelah upaya itu gagal dilaksanakan kenyataan negara dan kekuasaan pemerintahan yang telah berfungsi tidak boleh ditinggalkan sebab kenyataan itu merupakan bagian terpenting dari upaya umat Islam untuk mewujudkan negara merdeka yang berdaulat. Sudah tentu ini tidak berarti tanpa melakukan perbaikan dan penyempurnaan terus menerus.

Pasca penerimaan NU terhadap asas tunggal Pancasila, pada tahun 1985 harus ada langkah lanjut, apa yang harus diperbuat Nahdlatul Ulama dengan negara ini, negara harus dilengkapi dengan visi-visi Islam. Ini hak kita, sebagaimana orang lain juga punya hak yang sama untuk mengisi negara dengan visi-visi mereka. Pada masa orde baru dengan memeralat Pancasila jugalah Nahdlatul Ulama memposisikan diri sebagai elemen utama masyarakat madani yang sering melaksanakan keritik konstruktif terhadap pemerintahan orde baru.

3. ***Idzaa ta'aa radlaa mufsidatani ru'ya a'dhahumaa dlaraan birtikaabiakhfihimaa*** (apabila terjadi pertentangan antara dua kerusakan, maka harus dipertimbangkan bahaya yang lebih besar, dengan menjalankan resiko yang lebih kecil).

Artinya menolak (menghindari) bahaya lebih didahulukan daripada mencapai kebaikan. Masudnya adalah dalam menghadapi masalah yang berat yang akan menimbulkan bahaya, maka diutamakan menghindari bahaya itu dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan kemampuan. Alasannya karena Syari'at Islam lebih menekankan larangan agar tidak terjadi bahaya atau keburukan daripada perintah melaksanakan kebaikan atau masalah. Dalam sejarah politik di Indonesia upaya untuk mewujudkan bentuk final negara Islam selalu menghadapi tantangan yang mengancam sendi-sendi utama keutuhan nasional dan bahkan mungkin perpecahan yang lebih keras diantara kaum muslimin sendiri. Kenyataan ini menjadi dasar pertimbangan Nahdlatul Ulama yang memilih upaya konsensus-konsensus yang bisa diterima semua pihak untuk menghindari kemungkinan tersebut. Dengan dasar pertimbangan menurut kaidah tersebut mudah dipahami mengapa Nahdlatul Ulama menerima asas tunggal Pancasila.

Pilihan-pilihan sikap Nahdlatul Ulama dalam mengantisipasi gejala sosial politik ditempuh berdasarkan perhitungan kemungkinan akibat yang akan timbul, tidak mutlak-mutlakan. Dengan dasar pemikiran menurut kaidah ini mudah diduga mengapa Nahdlatul Ulama menerima Pancasila dan UUD 1945 pada awal kemerdekaan maupun ketika Dekrit Presiden 1959 ataupun DPR GR yang dibentuk tanpa melalui pemilihan umum, karena Nahdlatul Ulama mempertimbangkan resiko yang paling kecil. Meskipun perangkat-perangkat kenegaraan itu belum memenuhi kualifikasi yang dikehendaki Nahdlatul Ulama untuk mewujudkan cita-cita politik sebuah negara secara utuh berdasar Islam, tetapi betapapun perangkat kenegaraan itu mutlak diperlukan bagi terwujudnya kekuasaan pemerintahan dan kenegaraan yang efektif untuk menjamin kelangsungan hidup bernegara.

4. *Maa laa yatimmu al-wajib illaa bihi fahuwa al-wajib* (kewajiban yang tidak lengkap kecuali dengan syarat tertentu maka syarat itu menjadi wajib).

Dalam menjelaskan maksud qaidah ini bahwa membangun negara adalah wajib sebagai syarat untuk membangun ketertiban sosial. Merumuskan dasar negara dan UUD juga wajib karena hal itu sebagai syarat untuk mewujudkan tertib kenegaraan. Jika untuk itu tidak dapat dirumuskan suatu dasar negara dan UUD yang memenuhi kaidah yang sempurna tidak berarti kewajiban itu gugur. Apa yang telah dicapai meski tidak sempurna itu tetap wajib dijalankan disertai dengan kewajiban untuk terus menerus menyempurnakannya. `Meski tidak dinyatakan secara eksplisit oleh Nahdlatul Ulama ketika menerima dasar negara Pancasila dan UUD 1945, baik ketika awal kemerdekaan maupun ketika dekrit 5 Juli 1959 dan terakhir di Situbondo, memperlihatkan alur pemikiran politik dan sosial Nahdlatul Ulama yang runtut dengan nilai tertentu.

Dengan kerangka pemikiran semacam itulah yang menyebabkan Nahdlatul Ulama lebih cepat bisa menerima asas tunggal Pancasila dibandingkan dengan organisasi lainnya. Ajakan pemerintah agar organisasi kemasyarakatan menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal sebelum RUU keormasan disahkan DPR dilihat oleh Nahdlatul Ulama sebagai ajakan yang memenuhi asas masalah. Alasan demi kemaslahatan nasional dan menyelamatkan bangsa dengan Pendekatan Fikih dalam penerimaan Nahdlatul Ulama terhadap pancasila pada Munas Alim Ulama 1983. Dalam pandangan fiqih, asas Pancasila adalah salah satu dari sekian banyak persyaratan bagi keabsahan negara Republik Indonesia, hal itupun bukannya persyaratan keagamaan sama sekali.

Dengan sendirinya tidak ada alasan untuk menolaknya, selama ia tidak berfungsi menggantikan kedudukan agama dalam kehidupan organisasi yang bersangkutan. Islam sendiri dapat saja diletakkan dalam kedudukan yang berbeda-beda dalam kehidupan organisasi. penerimaan Nahdlatul Ulama dari sudut fikih kaum Ahlussunnah wal-jama'ah. Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki posisi yang netral. Pemerintahan yang berideologi Pancasila, termasuk dalam negara damai yang harus dipertahankan, karena syari'ah-dalam bentuk hukum/fiqh atau etika masyarakat-masih dilaksanakan oleh kaum muslimin di dalamnya, sekalipun hal itu tidak diikuti dengan upaya legislasi dalam bentuk undang-undang negara. Apabila etik masyarakat Islam sudah dijalankan, tak ada alasan lain bagi umat Islam selain mempertahankannya sebagai kewajiban agama. Jadi jelaslah bagi kita bahwa Nahdlatul Ulama dalam kehidupan politiknya tidaklah asal-asalan dalam bersikap dan bertindak. Ada alur pikir sistematis dengan pendekatan tradisi pemikiran fikih warisan ulama yang menjadi landasan gerakannya.

5. *Al-muhhafadhatu 'alaa al-qodiim al shaaleh wa al-akhdzu bi-al jadiid al-ashlahh* (memelihara yang lama yang lebih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik).

Pancasila sendiri sesungguhnya mengandung nilai-nilai dan ajaran kebaikan (masalah) serta ajarannya sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat bahkan Pancasila itu sendiri digali dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia, maka Pancasila yang baik itu sudah selayaknya untuk dipelihara dan ditegakkan bukan untuk dihapuskan. Prinsip (kaedah) seperti diatas itu pulalah yang menjadikan Nahdlatul Ulama menjadi lebih akomodatif dan toleran terhadap nilai-nilai yang ada dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nahdlatul Ulama tidak bersikap antitesis terhadap suatu nilai masyarakat.

Sepanjang nilai atau suatu sistem di dalam masyarakat tidak bertentangan dengan keyakinan Islam, maka ia mempunyai potensi untuk diarahkan atau dikembangkan agar selaras dengan tujuan-tujuan di dalam Islam. Nahdlatul Ulama bersikap menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki oleh manusia. Perbedaan sikap dan interpretasi Nahdlatul Ulama terhadap ajaran agama dengan kelompok pembaharu adalah disebabkan nalar keagamaan Nahdlatul Ulama yang mengikuti tradisi pemikiran mazhab yang menjadi pilar tegaknya peradaban fikih. Dalam menggali ajaran Islam Nahdlatul Ulama mendekatinya melalui pemikiran ulama mazhab, sehingga pemikiran Nahdlatul Ulama terhindar dari pendekatan tekstual dan iterpretasi tunggal terhadap Al-Qur'an dan Hadist.

Nahdlatul Ulama dengan pendekatan fikih dan kekayaan tradisi yang dimilikinya bersikap lebih terbuka terhadap nilai-nilai yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. seperti halnya menyikapi adanya perbedaan di masyarakat, Indonesia yang merupakan negara plural terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat, ras, bahasa dan agama menurut Nahdlatul Ulama merupakan kekuatan tonggak berdirinya negara Indonesia.

6. *Al-dlaruuratu tabiihhu al-mahdhuurat*(dalam keadaan darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang).⁷

Meskipun pada awal pembentukan dasar negara Indonesia pada masa sidang BPUPKI dan PPKI Nahdlatul Ulama memperjuangkan Islam sebagai ideologi negara, dengan diberikannya jalan tengah piagam Jakarta yang berbunyi menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya dan kemudian dihapus tujuh kata tersebut, sikap Nahdlatul Ulama bisa menerimanya. Hal ini lebih banyak berkaitan dengan semangat untuk menyatukan bangsa ini melalui Ideologi. Dengan berbagai macam pertimbangan kaidah fikih Nahdlatul Ulama menganggap Pancasila sebagai sesuatu yang mendesak untuk Indonesia.

⁷ M.Mashur Amin. 1996. *NU & Ijtihad Politik Kenegaraannya*. Yogyakarta : Al-Amin Pers. Hal. 92-93.

Dalam dunia politik sunni⁸ dikenal dengan politik kooperatif yang sering dianggap sebagai oportunistik. Politik ini (sunni) dilarang memberontak kepada penguasa walaupun penguasa itu berbuat sangat zalim. Sekalipun mengecam dan mengkritik penguasa adalah sebuah kewajiban, tapi hendaknya dilakukan sesuai dengan perintah Allah SWT yaitu dengan cara amar ma'ruf nahi munkar.

Penetapan Hukum Fiqih

Menetapkan suatu keteapan hukum untuk mencari jalan keluar berdasarkan kaidah fiqih dikalangan Nahdlatul Ulama dikenal dengan jalan mengadakan Bahtsul Masail yang mempunyai makna *bahth* yang berarti membahas dan *masail* bentuk jamak dari *mas'alah* yang berarti masalah-masalah. Dengan demikian Bahtsul Masail secara bahasa mempunyai arti membahas masalah-masalah.

Dalam acara Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Juni 2013 bertempat di SMA Semesta Gunggungpati Kota Semarang mengagendakan bahwa Nahdlatul Ulama mendesak Pemerintah Indonesia untuk memberikan *ta'zir* (sanksi) terhadap kelompok atau organisasi yang menolak menghormati simbol negara dan yang menyatakan Pancasila sebagai ideologi kufur. Sebab tindakan tersebut sama dengan memvonis seluruh bangsa Indonesia adalah kafir.

Nahdaltul Ulama beralasan bahwa menghormati simbol negara seperti upacara bendera dan berdiri saat menyanyikan lagu Indonesia Raya hukumnya wajib bagi seluruh warga negara. Hal itu karena telah diwajibkan oleh undang-undang dan mentaati pemerintah hukumnya wajib.

Demikian pula sekelompok yang menyatakan Pancasila sebagai ideologi kufur atau thoghut, hukumnya haram. Hal itu termasuk penghinaan dan meremehkan hasil konstitusi bangsa. Padahal konsensus itu telah dibuat pada saat mendirikan Republik Indonesia dan seluruh perwakilan elemen bangsa Indonesia telah menyepakati dasar negara. Dalam sidang yang dipimpin KH A'Wani Rois Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, para ulama menyampaikan berbagai pandangannya untuk menjawab tiga pertanyaan umat yaitu :

1. Bagaimana hukumnya menghormati simbol negara yang telah menjadi konsensus nasional.

⁸Sebagai kelompok mayoritas, pola pikir politik kaum Sunni biasanya sangat pro kepada pemerintah yang berkuasa. Pemikiran – pemikiran dari ahli – ahli politik Sunni cenderung membela dan mempertahankan kekuasaan. Tidak jarang pula pemikiran politik dan kenegaraan mereka menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan khalifah yang memerintahkan, namun atas pendapat ini Mujar Ibnu Syarif memberikan sebuah solusi ketika makalah ini dipresentasikan bahwasannya pendapat diatas merupakan suatu hal yang darurat.

Ibnu Taimiyah sebagaimana dijelaskan Iqbal, telah merumuskan bahwa enam puluh tahun berada di bawah rezim penguasa zalim lebih baik daripada sehari hidup tanpa pemimpin. Munawir Sjadzali dalam bukunya *Islam dan Tata Negara* mengemukakan pendapat Ghazali, Ibnu Ali Rabi' dan Ibnu Taimiyah yang telah menyatakan dengan tegas bahwasannya kekuasaan kepada negara atau raja itu merupakan mandat dari Tuhan yang diberikan kepada hamba – hamba pilihan – Nya, dan disebutkan pula bahwa ketiga pemikir itu berpendirian bahwa khalifah itu adalah Ghazali adalah muqaddas atau suci, tidak dapat diganggu gugat. Ibnu Abi Rabi' mencari dasar lagi legitimasi keistimewaan hak – hak khalifah atas rakyatnya dalam ajaran agama, yaitu

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa – penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa erajat. Untuk mengujimu tentang apa yang diberikan – Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan – Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampunan lagi Maha Penyayang. (QS. Al – An'am, 6:165).

Hai orang –orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al – Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar – benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Al – Nisa', 4:59). <http://politik.kompasiana.com/2012/07/11/pemikiran-politik-sunni-syah-khawarij-dan-mutazilah-476068.html>. Diunduh 31 Agustus 2013. Jam 09.08 WIB.

2. Bagaimana hukum menyatakan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah ideologi dan sistem kufur atau thoghut.
3. Apa yang harus dilakukan pemerintah terhadap organisasi atau kelompok yang menolak Pancasila dengan anggapan kafir.

Jawaban pertanyaan tersebut dijawab oleh KH Ubaidillah Katib PWNU Jawa Tengah dengan penjelasan bahwa menghormati simbol negara adalah *mubah* atau *jaiz* atau boleh. Namun karena sudah menjadi undang-undang, maka hukumnya menjadi wajib. Hal ini sesuai dengan keterangan dalam kitab *Bughyatul Murtasidin*. Penghormatan kepada bendera atau lambang negara tidak ada unsur ibadah, itu sebagai wujud cinta negara. Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai rahmat Allah Yang Maha Esa. Maka menghormati bendera sebagai simbol tanah air sama dengan mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Menganggap Pancasila sebagai thoghut adalah pengakuan batil atau dakwah bathilah. Menganggap demokrasi sebagai sistem kufur juga termasuk dakwah bathilah.

Ta'zir (sanksi) dari pemerintah adalah jalan terbaik baik pihak yang menganggap thoghut demi menciptakan efek jera. Dengan tahapan mulai dari mengklarifikasi, menasehati, memberi peringatan keras, lalu mengambil tindakan hukum. Namun bila kelompok tersebut sudah memiliki kekuatan yang bisa menggoyahkan sendi kenegaraan, maka pemerintah wajib memerangi atau menumpasnya. Karena sudah termasuk *bughot* (pemberontak). Semua putusan bahtsul masail ini di buat agar bisa dimengerti masyarakat umum.⁹

Penutup

Penerimaan Nahdlatul Ulama atas Pancasila benar-benar dipikirkan oleh Nahdlatul Ulama secara matang dan mendalam, Nahdlatul Ulama adalah organisasi kemasyarakatan yang pertama menuntaskan penerimaannya atas Pancasila. Kendati demikian hal itu bukanlah alasan untuk menuduh bahwa penerimaan itu karena ia bersikap akomodatif, dan juga tidak benar bahwa kembalinya Nahdlatul Ulama menjadi organisasi keagamaan atau meninggalkan politik praktis sebagai sikap yang emosional. Nahdlatul Ulama bukan hanya pertama menerima tetapi juga yang paling mudah menerima Pancasila. Muhammadiyah menerima Pancasila setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Daftar Referensi

- Abdurrahman Mas'ud, (2003), *Menuju Paradigma Islam Humanis*, Yogyakarta : Gama Media.
- Abdul Muchitsh Muzadi (2006), *NU Dalam Perspektif Sejarah & Ajaran*, Surabaya : Khalista
- Achmad Siddiq, (2005), *Khittah Nahdliyyah*, Surabaya : Khalista.
- As'ad Said Ali, (2012), *Ideologi Gerakan Pasca Reformasi*, Jakarta : LP3ES.
- As'ad Said Ali, (2010), *Negara Pancasila : Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Jakarta : LP3ES
- As'ad Said Ali, (2008), *Pergolakan Di Jantung Tradisi NU yang Saya Amati*, Jakarta : LP3ES
- A.Syafii Maarif, (1988), *Islam dan Politik di Indonesia*, Yogyakarta : IAIN
- Andree Feillard, (1999), *NU vis-à-vis Negara*, Yogyakarta : LKiS.
- Andi Purwono (2008), *Sikap Keberagamaan Dalam Memperkokoh Semangat Kebangsaan*, Semarang : Universitas Wahid Hasyim Press
- Bahtiar Effendy, (1998), *Islam dan Negara*, Jakarta : Paramadina
- Deliar Noer, (1988), *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta : LP3ES.
- Einar Marthan Sitompul, M.Th, (1989), *Nahdlatul Ulama dan Pancasila*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

⁹ <http://www.nuonline.com>. diunduh 10 Juli 2013 Jam 06.00 WIB.

SPEKTRUM

Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional
Volume 13 No. 1 Januari 2016

- Eko Handoyo, dkk, (2010), *Pancasila Dalam Perspektif Kefilsafatan dan Praksis*, Universitas Negeri Semarang, Yogyakarta : AR-Ruzz Media.
- Hasyim Asy'ari, (1999), *Risalah Ahlussunnah Wal Jama'ah*, Yogyakarta : LKPSM. Sunan Kalijaga Press.
- Laode Ida, Thantowi Jauhari, (1999), *Gus Dur di antara Keberhasilan dan Kenestapaan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Masyhur Amin.(1996). *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, Al-Amin Press, Yogyakarta.
- Mustofa Bisri. (2007). *Tafsir Khittah NU*, Risalah Nusa. Semarang.
- Nasir Yusuf, (1994), *NU dan Rekayasa Politik*. Bandung : Humaniora Utama Press.
- Notonegoro. (1975). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Pantjuran Tudjuh, Jakarta.
- Salahudin Wahid, (2001). *Menggagas Peran Politik NU*. Jakarta : Pustaka Indah satu.
- Said Budairy, (1994), *Nahdlatul Ulama Dari Berbagai Sudut Pandang*, Jakarta Penerbit Pusat Dokumentasi dan Informasi Lakpesdam NU
- Said Aqil Al-Munawar, dkk, (2001), *Islam Humanis*, Jakarta : PT. Moyo Segoro Agung.
- Sumadi Suryabrata, (1983), *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Suwarno, PJ., (1993), *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta,
- Tim PP LP. Ma'arif NU, (2004), *Nahdlatul Ulama : Ideologi, Garis Politik, dan Cita-cita Pembentukan Umat*, Yogyakarta : LKiS.
- Zudi Setiawan. (2007). *Nasionalisme NU*. CV. Aneka Ilmu Semarang.

Internet

- <http://andikurniawati90.blogspot.com/2011/03/2.html>
- http://artpelajar.blogspot.com/2012/12/pengertian-sejarah_17.html diunduh 20 mei 2013
- <http://www.modulpancasila.com>,
- <http://falahsmexy.blogspot.com/2012/08/hasil-hasil-sidang-bpupki.html>
- http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelidik_Usaha_Persiapan_Kemerdekaan_Indonesia
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Interpretasi>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Ideologi>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Negara>
- www.jimly.com/makalah/.../3/ideologi_pancasila_dan_konstitusi.doc

**IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI PEREKAT KEUTUHAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA****Zudi Setiawan, S.IP., M.Si.**Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim Semarang**Abstraksi**

Pancasila adalah sokoguru atau pilar utama dari bangunan nasionalisme Indonesia yang merupakan warisan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Pancasila adalah intisari dari nilai-nilai luhur bangsa yang digali oleh para pendiri negara dari akar budaya bangsa yang mencakup seluruh kebutuhan dan hak-hak dasar manusia secara universal. Dengan demikian, Pancasila dapat dijadikan sebagai landasan dan fasafah hidup bangsa Indonesia yang majemuk. Pancasila merupakan hasil kompromi antara golongan nasionalis, Islam, Kristen-Katolik dan berbagai golongan yang ada di dalam masyarakat Indonesia dalam hidup bernegara. Di atas Pancasila yang merupakan hasil kompromi itu UUD dirumuskan, dan selanjutnya UUD itu menjadi dasar untuk mendirikan Pemerintahan Republik Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar negara dan konstitusi di Indonesia merupakan karya monumental para tokoh pendiri negara dengan visi masa depan dan berakar pada sejarah bangsa. Kita dapat melihat wajah sekaligus arah bangsa Indonesia dengan melihat Pancasila dan UUD 1945. Bagi bangsa Indonesia, konsep negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sudah final dan tidak dapat diganggu gugat.

Kata Kunci: Pancasila, Ideologi, Nasionalisme, Indonesia

Pendahuluan

Untuk menggambarkan tentang Indonesia, hampir tidak dapat dilepaskan dari keistimewaan-keistimewaan yang dimilikinya. Bangsa Indonesia patut berbangga dan bersyukur atas limpahan keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*.. Indonesia merupakan negara mengagumkan dan tiada duanya, unik, terbentang melintasi khatulistiwa diapit oleh dua benua dan terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kepulauan Indonesia inilah yang merupakan gugusan *archipelago* terakbar di planet bumi. Keindahan Indonesia termahsyur hingga ke seluruh penjuru dunia dan mendapat julukan *The Pearls of the Equator*, Rangkaian Mutiara Khatulistiwa. Sejak dulu hingga sekarang, Indonesia tersohor memiliki kekayaan flora, fauna dan keanekaragaman hayati yang tersirat dan diungkapkan sebagai *gemah ripah loh jinawi*, berlimpah subur dan makmur. Di dalam tanahnya terdapat berbagai macam kekayaan, mulai dari emas, minyak bumi, gas alam dan masih banyak lagi. Lautannya yang luas juga menyimpan aset bernilai tinggi. Bumi Indonesia telah dianugerahi Allah SWT dengan kesuburan yang memungkinkan aneka ragam tanaman untuk tumbuh dan berkembang dengan baik¹.

Indonesia selama ini sering disebut sebagai Nusantara (Kepulauan Antara) karena terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania serta dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kata "Indonesia" ini berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *Indos* yang berarti "India" dan *nesos* yang berarti "pulau". Jadi, kata Indonesia dapat diartikan sebagai kepulauan India, atau kepulauan yang berada di wilayah India².

¹ Jaya Suprana, *Jamu: Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan*, dalam J.B. Kristanto (Ed.), *1000 Tahun Nusantara*, Kompas, Jakarta, 2000, hal. 288.

² Wikipedia, *Sejarah Indonesia* dalam <http://www.wikipedia.org> diakses pada 9 Mei 2008

Tantangan Pluralitas Bangsa Indonesia

Secara internal, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia cukup besar. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mempunyai wilayah yang terdiri lebih dari 17.508 pulau, baik besar, sedang maupun kecil. Lima pulau terbesar di Indonesia antara lain: Sumatera dengan luas 473.606 km persegi, Jawa dengan luas 132.107 km persegi, Kalimantan (merupakan pulau terbesar ketiga di dunia) dengan luas 539.460 km persegi, Sulawesi dengan luas 189.216 km persegi, dan Papua dengan luas 421.981 km persegi.³

Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang dipisahkan oleh laut dan terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, bahasa, adat-istiadat, budaya, dan agama ternyata bisa bersatu dalam satu negara. Padahal, di wilayah lain dalam satu pulau terdiri dari beberapa negara, bahkan dengan kondisi sosial dan budaya yang relatif homogen. Jadi, nasionalisme Indonesia adalah hal yang menakjubkan dan ini merupakan hasil dari kerja keras para pendiri negara ini.

Banyaknya jumlah pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke telah memberikan pengaruh pada semakin pluralnya penduduk Indonesia. Menurut penulis, Indonesia dapat disebut sebagai negara paling plural di dunia. Dasarnya adalah karena Indonesia memiliki tingkat keragaman yang tinggi dalam banyak unsur yang terdapat di dalam masyarakatnya, di antaranya adalah keragaman dalam hal ras⁴, etnis⁵, agama⁶, bahasa⁷ dan budaya. Pluralitas bangsa Indonesia adalah kekuatan sekaligus tantangan bagi keutuhan NKRI.

³ Wikipedia, *Indonesia* dalam <http://www.wikipedia.org> diakses pada 9 April 2008

⁴ Indonesia sebagai negara yang pluralistik memiliki penduduk dengan ras yang beragam. Kata *ras* sebenarnya berasal dari bahasa Prancis *razza* yang dapat diartikan sebagai perbedaan variasi dari penduduk atau perbedaan keberadaan manusia atas dasar tampilan fisik seperti rambut, mata, warna kulit, bentuk tubuh, tipe atau golongan keturunan, pola-pola keturunan, dan semua kelakuan bawaan yang tergolong unik. Lihat lebih lanjut mengenai ras dalam Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2005, hal. 18-19.

⁵ Etnis atau suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus dan bersifat askriptif (ada sejak lahir) dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti tertentu karena keturunan. Di Indonesia, terdapat banyak sekali etnis. Mereka mendiami daerah-daerah tertentu sehingga mereka dapat dikenali dari daerah mana asalnya. Masing-masing etnis ini memiliki ciri khas fisik manusianya maupun tradisi yang berbeda-beda, sehingga setiap etnis memiliki identitas sendiri-sendiri. Lihat Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005 hal. 289.

⁶ Agama formal yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, di antaranya adalah Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Sebenarnya, disamping agama formal tersebut, di Indonesia terdapat pula banyak sekali agama lokal dan aliran kepercayaan yang hingga kini masih dianut oleh masyarakat.

⁷ Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana interaksi antarmanusia. Di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah, yaitu tidak kurang dari 300 (tiga ratus) dialek bahasa yang mewakili banyaknya suku bangsa atau etnis. Lihat Dede Rosyada, dkk., *op. cit.*, hal. 29-31. Sementara itu, sumber lain menyebutkan bahwa jumlah ragam bahasa di Indonesia adalah sebanyak 726 (tujuh ratus dua puluh enam), terdiri dari 719 (tujuh ratus sembilan belas) bahasa lokal/daerah (masih aktif digunakan sampai sekarang), 2 (dua) bahasa sekunder tanpa penutur asli, dan 5 (lima) bahasa tanpa diketahui penuturnya. Lihat M. Paul Lewis, (ed.), *Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth edition*. Dallas, Tex. SIL International, 2009, sebagaimana dikutip dalam Prakoso Bhairawa, *Ragam (Peta) Bahasa di Indonesia*, dalam <http://prakosobhairawa.blogspot.com/2009/10/ragam-peta-bahasa-di-indonesia.html> Diakses 15 April 2011.

Tantangan Dari Luar

Memasuki periode 2000, terjadi eskalasi ketegangan di Kawasan Asia Pasifik yang disebabkan oleh munculnya kekuatan baru yaitu Tiongkok baik secara ekonomi, politik, dan militer. Modernisasi militer yang dilakukan Tiongkok dengan visi *blue water navy* mengancam eksistensi Amerika Serikat dan sekutunya yaitu Australia, Jepang, dan Korea Selatan. Kemunculan Tiongkok sebagai kekuatan baru direspon cepat oleh Amerika Serikat. Pada tahun 2011, Obama secara tegas menjadikan kawasan Asia Pasifik sebagai fokus utama kekuatan militer Amerika Serikat. Dalam dua puluh tahun kedepan, 2/3 kekuatan Amerika Serikat akan dikonsentrasikan di kawasan Asia Pasifik. Amerika Serikat mengambil langkah cepat dengan membuat pangkalan-pangkalan militer baru di Darwin dan Pulau Cocos, Australia.⁸

Dengan sangat lembutnya roda-roda sebuah pesawat terbang Delta mendarat dengan amat mulus di landasan Bandar udara (Bandara) internasional Darwin, Australia utara Rabu, 4 April 2012. Pesawat terbang tersebut menurunkan sekitar 500 personil marinir di kota itu sebagai tanda awal kehadiran militer Paman Sam di negara Kangguru, sebagai realisasi janji Barack Obama. Pada mulanya memang rencana Barack H. Obama untuk menjadikan kota Darwin sebagai pangkalan militer permanennya dengan dalih untuk menanggulangi bencana alam sempat menimbulkan kecurigaan dari negara-negara Asia, bahkan menuai protes keras dari China, karena menurut pihak Cihina, kehadiran militer AS di sana justru ditujukan untuk membendung China. Namun demikian tentu saja di bantah oleh Washington, tetapi mengakuinya bahwa kehadiran militer AS disana untuk menanggulangi bencana alam dan mengawasi perairan Asia Pasifik yang merupakan jalur ekonomi penting bagi AS. Karena statement tersebut kemudian negara-negara Asia terutama ASEAN bisa menerimanya, tetapi negara seperti Korea Utara, China, dan India tetap mencurigainya.

Pemerintah Indonesia sendiri pernah mengirimkan nota protes kepada Australia dan AS mengenai kehadiran permanen pasukan AS di sana. Bahkan kemudian dalam suatu statement Menhan Australia, Stephen Smith dikatakan bahwa pulau Cocos juga akan digunakan oleh Paman Sam sebagai pangkalan pesawat intai tanpa awak Global Hawk.⁹ Berbagai dinamika perkembangan politik internasional telah menjadi tantangan bagi keamanan dan keutuhan NKRI.

Pancasila sebagai Basis Ideologi Pemersatu

Menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri, sudah semestinya bangsa Indonesia semakin memperkuat persatuannya. Salah satu fondasi utama persatuan kebangsaan Indonesia adalah ideologi Pancasila yang telah menyatukan komponen-komponen bangsa.

Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu. Ideologi sangat penting terhadap suatu bangsa karena ideologi dapat membentuk identitas Negara, menyatukan anggota Negara, mengatasi konflik, mengatasi perbedaan bahkan menjadi dasar dan arah yang ingin di capai oleh suatu bangsa.

⁸ Sa'dan Mubarak, "Kapabilitas Pertahanan Indonesia dalam Menjawab Tantangan Geopolitik Dunia" dalam <http://cepp.fisip.ui.ac.id/2015/10/20/kapabilitas-pertahanan-indonesia-dalam-menjawab-tantangan-geopolitik-dunia/> Diakses 12 Desember 2015.

⁹ Muhammad Nurdin, Pangkalan Militer AS, Darwin-Cocos: Tantangan Bagi Politik Bebas Dan Aktif Indonesia, dalam http://www.kompasiana.com/nurdinmuhammad/pangkalan-militer-as-darwin-cocos-tantangan-bagi-politik-bebas-dan-aktif-indonesia_550f1376813311c62cbc6536 Diakses 12 Desember 2015.

Negara Indonesia memiliki ideologi istimewa dari pada ideologi lainnya yakni ideologi pancasila. Pancasila adalah dasar Negara Indonesia, hal ini telah ditegaskan dalam Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Berdasarkan sejarah perkembangan perumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni sampai 18 Agustus 1945, maka dapat diketahui bahwa Pancasila mengalami perkembangan fungsi. Pada tanggal 1 dan 22 Juni 1945, Pancasila yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan dan kemudian disepakati oleh sidang Pleno BPUPKI merupakan hasil kompromi antara kelompok yang memperjuangkan dasar negara nasionalisme dan kelompok yang memperjuangkan dasar negara Islam. Akan tetapi pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila yang disahkan oleh PPKI berkembang menjadi hasil kompromi antara kaum nasionalis, Islam dan Kristen-Katolik dan berbagai golongan yang ada di dalam masyarakat Indonesia dalam hidup bernegara. Di atas Pancasila yang merupakan hasil kompromi itu UUD dirumuskan, dan selanjutnya UUD itu menjadi dasar untuk mendirikan Pemerintahan Republik Indonesia.¹⁰

Dalam proses perumusan Pancasila, Soekarno merupakan satu-satunya tokoh yang secara jelas dan eksplisit menyebutkan nama Pancasila¹¹. Pidato Soekarno yang berisi tentang rumusan Pancasila disampaikan dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno mengajukan lima sila dalam Pancasila antara lain: (1) kebangsaan Indonesia, (2) internasionalisme atau peri kemanusiaan, (3) mufakat atau demokrasi, (4) kesejahteraan sosial, (5) ketuhanan.

Dalam rumusan Pancasila yang disampaikan oleh Soekarno tersebut, terdapat "teori perasan" yang dianggap bersifat sekularistik. Bagi Soekarno, Pancasila dapat diperas menjadi tiga sila (Trisila), yakni sosio nasionalisme (yang mencakup kebangsaan Indonesia dan peri kemanusiaan), sosio demokrasi (yang mencakup demokrasi dan kesejahteraan sosial), dan ketuhanan. Terlihat bahwa sila ketuhanan selalu terletak pada urutan terakhir dari lima sila itu. Menurut Soekarno, dari Trisila tersebut, dapat diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu gotong royong, di mana prinsip kepercayaan kepada Tuhan telah dihilangkan¹². Soekarno mengatakan dalam pidatonya:

"jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong royong. Negara yang kita dirikan haruslah negara gotong royong! Alangkah hebatnya! Negara gotong royong!"¹³

Pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 itu memang telah menarik perhatian dan disambut dengan tepuk tangan yang riuh oleh anggota sidang BPUPKI. Setelah itu, sidang kemudian mengangkat sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai *Panitia Sembilan* yang dipimpin oleh Soekarno untuk merumuskan kembali Pancasila secara lebih utuh dan dapat diterima semua golongan masyarakat Indonesia. Panitia Sembilan ini terdiri dari sembilan orang, salah satunya adalah tokoh NU (K.H. A. Wahid Hasyim). Berikut ini para tokoh yang tergabung dalam Panitia Sembilan:

1. Soekarno

¹⁰ Suwarno, P.J., 1993, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 76-77

¹¹ A.M.W. Pranarka, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, Centre For Strategic and International Studies, Jakarta, 1985, hal. 280.

¹² Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, LP3ES, Jakarta, 1996, hal. 143.

¹³ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia*. Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hal. 17

2. Mohammad Hatta
3. Mohammad Yamin
4. Achmad Soebarjo
5. Abikoesno Tjokrosujoso
6. Haji Agoes Salim
7. A.A. Maramis
8. Abdoel Kahar Muzakkir
9. K.H. Abdoel Wahid Hasyim

Salah seorang tokoh Nahdlatul Ulama yang menjadi anggota BPUPKI, K.H. Masykur setelah mendengarkan pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 menyatakan:

“Begitulah sejarah mencatat, keesokan harinya Bung Karno diberi kesempatan untuk menguraikan pendapatnya, apa yang sebaiknya dijadikan dasar negara yang hendak didirikan itu. Pidato tanpa teks di hadapan para anggota Badan Penyelidik dan disaksikan oleh pembesar Jepang, dengan gayanya sendiri, Bung Karno mengemukakan pendapatnya mengenai kasus yang memang sangat peka itu. Pidatonya kemudian lebih dikenal dengan Lahirnya Pancasila karena Pancasila adalah yang dikemukakan Bung Karno itu, meskipun pada waktu itu belum ada penamaan yang pasti untuk itu. Almanak waktu itu menunjukkan 1 Juni 1945. Dengan sadar, kelompok Islam pada waktu itu menerima konsep Bung Karno tentang Pancasila tersebut, dengan dasar pemikiran bahwa yang terpenting pada saat itu ialah utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan lahir itu.”¹⁴

K.H. Masykur juga pernah menyatakan bahwa sebenarnya umat Islam, termasuk NU melalui para tokohnya, telah memberi sumbangan yang besar terhadap perumusan Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Kiai Masykur menuturkan bahwa pada akhir Mei 1945, telah terjadi sebuah diskusi yang panjang antara Soekarno, Mohammad Yamin, Kiai Wahid Hasyim (NU), Kiai Kahar Muzakkir (Partai Islam Indonesia), dan Kiai Masykur (NU) sendiri. Dari diskusi panjang ini, akan dapat diketahui bahwa para pemimpin Islam di Indonesia, termasuk NU melalui para tokohnya, lebih mengutamakan pentingnya persatuan dan keutuhan Indonesia daripada keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam secara formal. Para pemimpin Islam Indonesia lebih memilih penerapan substansi dari nilai-nilai ajaran Islam yang juga bersifat universal dan dapat diterima oleh bangsa Indonesia karena juga dipertimbangkan pula tradisi-tradisi yang telah lama mengakar di Indonesia. Berikut ini transkripsi dari penuturan Kiai Masykur yang bercerita mengenai diskusi tersebut:

“Di rumahnya Mohammad Yamin, saya (Kiai Masykur), Wahid Hasyim, Kahar Muzakkir dari Yogyakarta. Bertiga, berempat dengan Yamin. Bung Karno datang. Kita berhenti omong-omong itu. Lantas Bung Karno tanya: “Ada apa?”

Pancasila merupakan warisan kekayaan bangsa Indonesia yang merupakan intisari dari nilai-nilai luhur bangsa yang digali oleh para pendiri negara dari akar budaya bangsa yang mencakup seluruh kebutuhan dan hak-hak dasar manusia secara universal. Dengan demikian, Pancasila dapat dijadikan sebagai landasan dan fasafah hidup bangsa Indonesia yang majemuk, baik dari segi agama, etnis, ras, bahasa, golongan maupun ideologi. Dengan demikian, ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sangat tepat, karena Pancasila dipandang dapat mengadopsi kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia.

¹⁴ I.N. Subagio, *K.H. Masjkoer Secercah Biografi*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hal. 55.

Perumusan dasar negara Indonesia merdeka mulai dibicarakan pada masa persidangan pertama Dokuritsu Zyumbi Tyoosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI¹⁵) pada 29 Mei-1 Juni 1945. Jumlah anggota BPUPKI ini adalah 69 orang yang berasal dari lima golongan: golongan pergerakan, golongan Islam, golongan birokrat (kepala jawatan), wakil kerajaan, pangreh praja (residen, wakil residen), dan golongan peranakan yang terdiri dari peranakan Tionghoa (4 orang), peranakan Arab (1 orang), dan peranakan Belanda (1 orang). Tidak semua anggota BPUPKI ini adalah kaum laki-laki, karena ada 2 orang perempuan (Ny. Maria Ulfa Santoso dan Ny. R.S.S. Sunaryo Mangunpuspito).¹⁶ Dari sinilah diketahui bahwa para perumus Pancasila merupakan tokoh-tokoh pergerakan nasional yang berasal dari berbagai unsur dalam masyarakat.

Pancasila adalah *sokoguru* atau pilar utama dari bangunan nasionalisme Indonesia yang merupakan warisan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Pancasila adalah intisari dari nilai-nilai luhur bangsa yang digali oleh para pendiri negara dari akar budaya bangsa yang mencakup seluruh kebutuhan dan hak-hak dasar manusia secara universal. Dengan demikian, Pancasila dapat dijadikan sebagai landasan dan fasafah hidup bangsa Indonesia yang majemuk.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia bukanlah merupakan produk dari agama tertentu, akan tetapi nilai-nilai agama sebagai cerminan moral dan jati diri bangsa ini terkandung di dalamnya. Pancasila tidak memisahkan sama sekali antara agama dan negara. Hal ini terlihat pada penempatan sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang berada pada urutan pertama yang kemudian diikuti oleh keempat sila lainnya¹⁷ yang juga sebenarnya mengandung nilai-nilai universal yang terdapat dalam ajaran agama-agama yang ada di Indonesia.

Salah seorang intelektual dan pejabat tinggi Arab Saudi yang pernah memuji Pancasila adalah Dr. Izzat Mufti. Menurutnya, Pancasila tidak bertentangan dengan Islam dan keputusan para pendiri negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara merupakan keputusan yang tepat karena Indonesia adalah negara multiagama. Pancasila secara efektif telah menjadi bingkai persatuan bangsa Indonesia.¹⁸

Kita perlu terus-menerus melakukan upaya internalisasi nilai nasionalisme Indonesia dan nilai ideologi Pancasila ke dalam setiap diri anak bangsa. Sebuah nilai yang terinternalisasi secara mendalam akan menjadi kekuatan yang besar. Seberapa lama eksistensi nilai nasionalisme Indonesia dan nilai ideologi Pancasila dapat bertahan, selama itu pula eksistensi negara Republik Indonesia di bumi ini.

¹⁵ Setelah pemerintah Jepang secara resmi mengumumkan ke seluruh dunia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, langkah nyata yang ditempuh oleh pemerintah Jepang adalah dengan membentuk Dokuritsu Zyumbi Tyoosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Maret 1945. BPUPKI ini bertugas untuk merumuskan dasar negara dan konstitusi (Undang-Undang Dasar) bagi negara Indonesia setelah merdeka. Namun, dalam kenyataannya, BPUPKI baru terbentuk pada tanggal 29 April 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibubarkan, karena pada tanggal itu Pemerintah Jepang meresmikan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dibandingkan dengan BPUPKI, PPKI memiliki keanggotaan yang lebih luas. PPKI diketuai oleh Sukarno. Lihat A.M.W. Pranarka, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, Centre For Strategic and International Studies, Jakarta, 1985, hal. 51.

¹⁶ Lihat S. Silalahi, *Dasar-dasar Indonesia Merdeka Versi Para Pendiri Negara*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, Hal. 17. Lihat pula Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2011, Hal. 9.

¹⁷ Keempat sila tersebut di antaranya adalah (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

¹⁸ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, LP3ES, Jakarta, 2009, Hal. ix.

SPEKTRUM

Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional
Volume 13 No. 1 Januari 2016

Daftar Referensi

- Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, LP3ES, Jakarta, 1996
- Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2005
- A.M.W. Pranarka, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, Centre For Strategic and International Studies, Jakarta, 1985
- As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, LP3ES, Jakarta, 2009
- Dede Rosyada, dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media bekerja sama dengan ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2005
- Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia*. Gema Insani Press, Jakarta, 2001
- I.N. Subagio, *K.H. Masjkoer Secercah Biografi*, Gunung Agung, Jakarta, 1982
- Jaya Suprana, *Jamu: Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan*, dalam J.B. Kristanto (Ed.), *1000 Tahun Nusantara*, Kompas, Jakarta, 2000
- Muhammad Nurdin, Pangkalan Militer AS, Darwin-Cocos: Tantangan Bagi Politik Bebas Dan Aktif Indonesia, dalam http://www.kompasiana.com/nurdinmuhammad/pangkalan-militer-as-darwin-cocos-tantangan-bagi-politik-bebas-dan-aktif-indonesia_550f1376813311c62cbc6536 Diakses 12 Desember 2015.
- M. Paul Lewis, (ed.), *Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth edition*. Dallas, Tex. SIL International, 2009, sebagaimana dikutip dalam Prakoso Bhairawa, *Ragam (Peta) Bahasa di Indonesia*, dalam <http://prakosobhairawa.blogspot.com/2009/10/ragam-peta-bahasa-di-indonesia.html> Diakses 15 April 2011. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005
- Sa'dan Mubarak, "Kapabilitas Pertahanan Indonesia dalam Menjawab Tantangan Geopolitik Dunia" dalam <http://cepp.fisip.ui.ac.id/2015/10/20/kapabilitas-pertahanan-indonesia-dalam-menjawab-tantangan-geopolitik-dunia/> Diakses 12 Desember 2015.
- S. Silalahi, *Dasar-dasar Indonesia Merdeka Versi Para Pendiri Negara*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Suwarno, P.J., *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1993
- Wikipedia, *Sejarah Indonesia* dalam <http://www.wikipedia.org> diakses pada 9 Mei 2008
- Wikipedia, *Indonesia* dalam <http://www.wikipedia.org> diakses pada 9 April 2008
- Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Zudi Setiawan, *Nasionalisme Kiai Asnawi: Pemikiran dan Praksis Nasionalisme Seorang Intelektual Pesantren*, Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang, 2011

**PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN
PERKOTAAN DI PROVINSI JAWA TENGAH (STUDI ANALISIS RESPONSIF GENDER
KOTA SEMARANG)****Drs. Suharto, M.Si**Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim Semarang**Abstraksi**

Peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, tergambar bahwa perempuan mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan manusia yang tercermin dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang yang cenderung meningkat dari tahun 2009 (76,90) sampai pada tahun 2013 (78.54). Perempuan juga mempunyai kontribusi dalam pembangunan gender yang tercermin dalam capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) yaitu cenderung meningkat pada tahun 2009 (71,42) sampai pada tahun 2013 (73.74). Dan kontribusi peran perempuan dalam pemberdayaan gender terlihat dalam capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yaitu menunjukkan kecenderungan meningkat pula pada tahun 2009 (63,19) sedangkan pada tahun 2013 (70.62). Hal ini dapat dikatakan bahwa peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat perkotaan mempunyai kontribusi yang signifikan dan baik dalam pembangunan khususnya dalam penanggulangan kemiskinan. Lebih rinci lagi keterlibatan perempuan dalam KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang menjadi sasaran sekaligus subjek atau pelaku dari pemberdayaan masyarakat. Di Kota Semarang peran perempuan menjadi anggota KSM mencapai 52% lebih tinggi dari target indikator keberhasilan yaitu 30%. Disinilah peran perempuan lebih terlihat dan langsung menjadi tindakan secara nyata dari masyarakat miskin tak berdaya menuju masyarakat berdaya yang sejahtera.

Kata Kunci : Peran Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan.

Pendahuluan

Menilik pada periode Maret 2014, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah mengalami kenaikan menjadi sebesar 14,46% dari periode September 2013 sebesar 14,44%. Kenaikan ini disebabkan terjadinya bencana banjir pada awal tahun 2014 yang mengakibatkan meningkatnya harga beras akibat penurunan produksi padi akibat gagal panen dan meningkatnya harga-harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat akibat kenaikan inflasi dampak tersendatnya distribusi. Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah periode Maret 2014 sebanyak 4,836 juta orang (14,46%), mengalami kenaikan sebanyak 25,11 ribu orang (0,02%) dibandingkan periode September 2013 sebanyak 4.811 juta orang (14,44%). Kenaikan kemiskinan berada di daerah perkotaan sebanyak 32,21 ribu orang, sedangkan di daerah perdesaan justru mengalami penurunan sebanyak 7,09 ribu orang. Distribusi jumlah penduduk miskin pada periode Maret 2013 sebagian besar berada di daerah perdesaan (59,78%), menurun dibanding periode September 2013 (60,24%). Capaian persentase penduduk miskin Jawa Tengah pada periode Maret 2014 sebesar 14,46% ini masih berada di atas Nasional 11,25%.

Berdasarkan basis data terpadu PPLS 2011, saat ini di Jawa Tengah terdapat 50 kecamatan (di 15 kabupaten) dengan tingkat kemiskinan tinggi, 234 kecamatan (di 27 kabupaten) dengan tingkat kemiskinan sedang, dan 289 kecamatan (di 30 kabupaten/kota). Dari total 8.578 desa/kelurahan di Jawa Tengah, terdapat 1.479 desa/kelurahan (terdiri dari 1.356 desa dan 123 kelurahan) masuk kategori tingkat kemiskinan tinggi, 2.235 desa/kelurahan (terdiri dari 2.080 desa dan 155 kelurahan) masuk kategori tingkat kemiskinan sedang, dan 4.864 desa/kelurahan (terdiri dari 4.373 desa dan 491 kelurahan) masuk kategori tingkat kemiskinan rendah. (*sumber : paparan Kepala Bappeda Jateng pada workshop Peningkatan Peran Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan, Semarang 26 Agustus 2014*).

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat perlu adanya kesamaan pandang untuk *kesetaraan gender* ini. Karena dalam pemberdayaan masyarakat sasaran utama adalah masyarakat yang tidak berdaya (miskin) dalam arti luas dan secara nyata sebagian besar yang miskin adalah perempuan. Maka dalam program pemberdayaan masyarakat (penanggulangan kemiskinan) selalu didorong untuk sensitive gender dan lebih memberikan peluang yang besar terhadap peran perempuan. Secara umum pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia & warga Negara. Untuk dapat memulihkan kembali harkat dan martabat komunitas (warga miskin), pentingnya peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat salah satunya yaitu program penanggulangan kemiskinan yang sekarang baru gencar-gencarnya digalakkan Pemerintah.

Dengan demikian untuk mengetahui sejauhmana peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat miskin diperkotaan, maka perlu adanya studi yang menganalisis responsive gender terhadap program pemberdayaan masyarakat (program penanggulangan kemiskinan) di Provinsi Jawa Tengah.

Pembahasan

Keterlibatan kaum perempuan dalam pembangunan bangsa Indonesia sebenarnya sudah sejak lama dimulai, secara eksplisit dengan gencarnya dilaksanakan ketika lembaga Kementerian Peranan Wanita didirikan secara resmi akhir tahun 1970-an. Realitasnya tidak dapat dipungkiri bahwa peran kaum perempuan dalam pembangunan sedemikian besarnya, ikut serta menentukan arah dan keberhasilan pembangunan nasional Indonesia.

Sebagaimana dikemukakan oleh Saul M Katz (1971) bahwa pembangunan adalah *mayor societal change from one state of national being to another, more valued state*, adanya perubahan besar-besaran suatu bangsa dari suatu keadaan menuju keadaan yang lebih baik. Sejalan dengan itu pandangan Coralie Bryant dan Louise White, dalam *Managing Development in the Third World* mengemukakan bahwa pembangunan ialah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Tentu dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan keterlibatan semua pihak tanpa membedakan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan.

Konsep pembangunan kemampuan peranan perempuan yang dipergunakan berkembang menjadi pemberdayaan perempuan yang berarti meningkatkan kualitas dan peran perempuan pada semua aspek kehidupan baik secara langsung atau tidak langsung melalui penciptaan situasi-situasi yang kondusif sebagai motivator dan akslerasi proses pembangunan. Sehingga Karls (1995) memandang bahwa pemberdayaan kaum perempuan sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan kaum laki-laki.

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 memiliki jumlah penduduk sebesar 33.710.051 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 16.499.377 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 17.210.674 jiwa. Dilihat dari komposisi tersebut penduduk perempuan lebih mayoritas hal ini menjadi alasan penting manakala perhatian kepada perempuan dalam setiap kegiatan pembangunan semestinya harus selalu responsif gender. Komposisi tersebut bisa dilihat dalam diagram berikut ini.

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) telah menjadi bagian penting dalam proses perencanaan dan penganggaran. Namun demikian dalam implementasinya masih terdapat kekurangan seperti: (1) data pilah belum tersedia; (2) kemampuan perencana dalam menyusun analisis gender masih kurang; (3) RPJMD belum mencantumkan indikator dan target kinerja responsif gender serta belum terukur; (4) tim verifikasi tidak konsisten dan kurang maksimal dalam memverifikasi GAP, GBS dan RKA; (5) belum ada Panduan Teknis dan instrumen monitoring dan evaluasi, serta belum pernah dilaksanakan monitoring dan evaluasi PPRG sampai dengan implementasi; (6) kurangnya jumlah fasilitator terlatih.

Berkaitan dengan hal tersebut, agar implementasi Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah dapat dilaksanakan secara sistematis, maka sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan PUG di Provinsi Jawa Tengah.

Maksud dari Panduan Teknis Pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Tengah adalah memberikan panduan bagi perangkat daerah dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, memeriksa dan menyusun laporan kegiatan pembangunan yang responsif gender. Tujuan yang diharapkan dari Panduan Teknis Pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah di Jawa Tengah adalah meningkatkan pemahaman, kemampuan dan ketrampilan SKPD dalam menyusun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, mengimplementasikan, memantau, memeriksa dan melaporkan kegiatan pembangunan yang responsif gender.

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/002512 Tanggal 18 Februari 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif (PPRG) di SKPD Provinsi Jawa Tengah dan pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

Maka perspektif gender juga diintegrasikan ke dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 903/016298 tanggal 11 Oktober 2013 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan RBA-RSD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014. Integrasi gender ke dalam Surat Edaran Gubernur tersebut tertuang dalam bab tersendiri tentang Anggaran Responsif Gender (ARG), yang didalamnya diatur, antara lain :

Setiap SKPD Provinsi Jawa Tengah agar melakukan langkah-langkah:

- 1) Menyiapkan program dan kegiatan yang akan disusun dengan strategi Pengarusutamaan Gender, yaitu :
 - Program/kegiatan berdampak langsung bagi masyarakat, mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, dan target pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's/Tujuan Pembangunan Millenium) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015;
 - Program/Kegiatan yang sifatnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau kelembagaan;

- Program/kegiatan pada huruf a dan b program/kegiatan yang berkelanjutan.
- 2) Menyiapkan data pilah gender, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang dapat menggambarkan indikator akses, partisipatif, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan program/kegiatan yang dilaksanakan.
- 3) Melakukan analisis gender terhadap program /kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan penyusunan rencana aksi, perumusan indikator kinerja output dan outcome, yang terukur dengan menggunakan metode *Gender Analysis Pathway* (GAP).
- 4) Menyusun Gender Budget Statement atau Pernyataan Anggaran Gender yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKA SKPD responsif gender Tahun Anggaran 2014.
- 5) Seluruh SKPD agar melengkapi RKA-SKPD Tahun Anggaran 2014 dengan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan Pernyataan Anggaran Gender (*Gender Budget Statement*).
- 6) Kepala Bappeda selaku Ketua dan Kepala BP3AKB selaku Sekretaris kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Jawa Tengah memberikan fasilitasi dan asistensi penyusunan Pernyataan Anggaran Gender (*Gender Budget Statement*) dan RKA SKPD yang responsif gender sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian Pemerintah Provinsi sangat memperhatikan gender dalam setiap kegiatan pembangunan dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan maupun pelestariannya, hal ini tergambar dalam dalam peraturan kebijakan yang sangat responsive gender.

Peran Perempuan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan di Kota Semarang

Pemerintah telah menempatkan kaum perempuan sebagai partner yang baik bagi pembangunan. Isu gerakan dan pemberdayaan perempuan yang berkembang berkisar dalam suatu pemikiran bahwa perempuan sebagai sumber daya pembangunan, dengan kata lain politik gender telah memakai pendekatan Women In Development dimana perempuan terintegrasi sepenuhnya dalam derap pembangunan nasional.

Konsep ini memberikan porsi kepada kaum perempuan untuk lebih eksis meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan menuju bangsa yang sejahtera dan penuh kedamaian. Pendekatan Women In Development partisipasi perempuan dalam pembangunan mensyaratkan adanya kemampuan teknis dan profesional yang dibutuhkan. Ini berarti bahwa potensi dan kapabilitas teknis kaum perempuan harus ditingkatkan melalui (1) upaya mengintegrasikan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, tanpa banyak mempersoalkan sumber-sumber yang menyebabkan mengapa perempuan dalam masyarakat bersifat inferior, sekunder dan dalam hubungan subordinasi terhadap laki-laki. Indikator integrasi perempuan dalam pembangunan diukur dari TPAK perempuan, akses pendidikan, hak-hak politik, kewarganegaraan dan sebagainya, (2) menempatkan perempuan sebagai pelaku penting dalam masyarakat sehingga posisi perempuan akan menjadi lebih baik, asumsinya perempuan telah dan selalu menjadi bagian dari pembangunan nasional, dan (3) konstruksi sosial yang membentuk persepsi dan harapan serta mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan rendahnya kedudukan dan status perempuan harus dihilangkan.

Pengarustamaan adalah upaya/strategi yang harus dilakukan untuk memberi peluang kepada seluruh komponen atau stakeholders agar dapat berperan secara optimal dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender (gender mainstreaming) merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (marginalisasi, stereotype, subordinasi, kekerasan dan beban ganda).

Pembangunan yang berdimensi gender yang bersifat eksploitatif atau merugikan, menjadi hubungan yang seimbang, selaras dan serasi. Sehingga konsep pemberdayaan tenaga kerja perempuan yang akan datang mencakup tiga hal yakni (1) Capacity Building, upaya membangun kemampuan kaum perempuan, (2) Cultural Change, perubahan-perubahan budaya yang memihak kepada kaum perempuan dan (3) Struktural Adjustment, penyesuaian terhadap struktural yang juga memihak kepada kaum perempuan. Maka keberhasilan konsep ini akan menjadi motivasi dan prestasi bagi kaum perempuan dalam pembangunan menuju kesuksesan, karena menurut Mc Cleland (1961) melalui teori Need for Achievement, mengungkapkan bahwa kegagalan pembangunan disebabkan masyarakat tidak memiliki motivasi untuk berprestasi. Kesuksesan peran kaum perempuan dalam pembangunan bangsa ini akan mempengaruhi citra positif kaum perempuan di hati manusia.

Pada saat pembangunan pada masa Orde Baru, pengembangan masyarakat mengambil posisi dan kontribusi penting. Meskipun demikian, pemberdayaan masyarakat kurang mendapat perhatian karena kendali pembangunan banyak berasal dari pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan (top down). Setelah Orde Baru berakhir dan Era Reformasi dimulai, dimana kebebasan dan hak asasi manusia (HAM) menjadi unsur primadona, setidaknya dalam wacana pembangunan, tema-tema, seperti pemberdayaan, penguatan kapasitas, kelembagaan lokal, kearifan lokal, modal sosial, dan inisiatif local terus bergema dan mewarnai diskusi akademik mengenai pembangunan dan pengembangan masyarakat.

Kemiskinan di perkotaan, termasuk di Kota Semarang adalah salah satu masalah sosial yang hingga kini tetap sulit terpecahkan, dan bahkan nyaris untuk dapat diselesaikan hanya dalam hitungan satu-dua atau bahkan lima tahun anggaran. Sebagai kota yang tumbuh menjadi mega-urban, terbukti perkembangan kota Semarang itu ternyata tidak selalu paralel dengan peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan kendati sering di dengung-dengungkan bahwa program pembangunan kota yang dilaksanakan senantiasa bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketidak merataan, namun akibatnya justru menyebabkan putusnya ikatan masyarakat yang lemah dan bahkan substansi dari berbagai kebijakan pemerintah kota cenderung bertentangan dengan golongan masyarakat miskin di kota.

Kota Semarang dalam pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) terdiri dari Focal Point PUG yaitu aparat SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing dan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG yaitu wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

Sebagaimana Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 dinyatakan dalam upaya percepatan pelebagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD kabupaten/kota dibentuk Pokja PUG kabupaten/kota. Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan SKPD. Bupati/walikota menetapkan ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG kabupaten/kota dan Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG kabupaten/kota. Pembentukan Pokja PUG kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Focal Point PUG Kota Semarang sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas:

- a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD;

Pelaksanaan PUG dalam masyarakat tercermin dalam berbagai aktivitas yang dijalankan oleh SKPD maupun oleh Tim Penggerak PKK Kota Semarang. Menurut Walikota Semarang bentuk dukungan Pemerintah kota terhadap kaum perempuan dan anak-anak antara lain sosialisasi Kesetaraan Keadilan Gender (KKG) dan penancangan Semarang sebagai kota layak anak, fasilitasi upaya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan melalui koordinasi dan sosialisasi dengan kader PKK, posyandu, puskesmas dan RS dalam upaya mengurangi/meminimalisasir kematian Ibu dan bayi.

Selain itu, berupa kegiatan usaha ekonomi produktif dalam rangka program terpadu pemberdayaan masyarakat berbasis gender, antara lain melalui bentuk pelatihan dan pemberian bantuan alat terhadap 4 KUBE (Kelompok Usaha Bersama) serta koordinasi dan sosialisasi terhadap organisasi masyarakat perempuan di Kota Semarang. Meliputi PKK, DWP, GOW, GOPTKI (Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia).

Kota Semarang juga memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Berbasis Gender (PPT SERUNI) yang merupakan pusat pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender di Kota Semarang, yang mengandung arti Semarang Terpadu Rumah Perlindungan Untuk Membangun Nurani dan Cinta Kasih Insani disingkat "SERUNI", lahir tanggal 1 Maret 2005 hasil kesepakatan bersama peserta Pelatihan dan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang diselenggarakan oleh Tim TOT Pendidikan HAM Berperspektif Gender Jawa Tengah bekerjasama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), yang dihadiri oleh perwakilan dari unsur Pemerintah, Akademisi, LSM, Praktisi dan Aktifis Perempuan.

PPT SERUNI, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Semarang dengan penetapan SK Walikota Semarang Nomor : 463.05/112 tanggal 4 Mei 2005 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis Gender "SERUNI" Kota Semarang, dan dikukuhkan oleh Bapak Walikota Semarang pada tanggal 20 Mei 2005 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Tahun 2009 Surat Keputusan tersebut telah diperbaharui karena banyak anggota Tim yang Purna Tugas, sehingga SK Walikota tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak yang Berbasis Gender "SERUNI" Kota Semarang telah diganti dengan Surat Keputusan No. 463/A. 023 tanggal 12 Pebruari 2009.

Tahun 2011 Surat Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak yang Berbasis Gender "SERUNI" Kota Semarang telah diganti lagi dengan Surat Keputusan Walikota Semarang tanggal 6 Januari 2011 No. 463/05/2011. Tujuan didirikan Seruni adalah :

- a. Memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan agar terpenuhinya hak-haknya atas layanan pemulihan dan penguatan serta mendapat solusi yang tepat yang memungkinkan perempuan dan anak hidup layak;

- b. Membantu mencegah timbulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta keadilan gender dan penanganannya;
- c. Mengembangkan kemitraan dan jaringan kerjasama dengan LSM, Kelompok Keagamaan, Organisasi Sosial Wanita dan Dunia Usaha yang peduli terhadap masalah perempuan dan anak;
- d. Menyediakan tempat pengaduan, pencatatan administrasi, membuat kronologis kasus dan melaksanakan rapat kasus untuk penyelesaian kasus, memberikan layanan untuk Rumah Aman/Shelter bagi korban yang terancam jiwanya;
- e. Melakukan kerjasama dengan anggota Tim PPT SERUNI untuk penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking lebih efektif.

Program kegiatan layanan bagi korban kekerasan bagi perempuan dan anak berbasis gender dan trafficking meliputi :

- a. menerima pengaduan dan registrasi korban;
- b. melakukan konseling awal;
- c. memberikan layanan rumah aman/shelter bagi korban yang terancam jiwanya;
- d. memberikan pendampingan yang diperlukan korban, layanan medis, psikologis, rohani, psikososial;
- e. mengadakan rapat kasus;
- f. merujuk kasus kepada anggota tim;
- g. melakukan pencegahan melalui sosialisasi, siaran secara on air, penyebaran leaflet melalui email, website, dan penyebar luasan berita melalui mass media agar masyarakat memahami, mengerti tentang kekerasan berbasis gender dan trafficking serta mencegah dan meminimalisir tindak kekerasan berbasis gender;
- h. mendorong munculnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, pendampingan serta monitoring kasus korban kekerasan berbasis gender dan trafficking;
- i. membangun kerjasama dengan pihak ketiga dalam penanganan kasus untuk memulihkan korban kembali seperti semula sebelum terjadi kekerasan.

Dalam menguraikan capaian peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan di Kota Semarang tidak bisa lepas dengan data yang bersumber dari SIM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) Kota Semarang 2014. Maka uraian berikut berdasarkan sumber data tersebut dengan direkap berdasarkan kegiatan / siklus di PNPM Mandiri Perkotaan. Data telah dipilah dan diolah disesuaikan dengan peran / partisipasi perempuan. Peran atau partisipasi perempuan dalam PNPM MP dapat dimaknai sebagai pelaku kegiatan, anggota kelembagaan ataupun panitia kegiatan. Dan juga sebagai peserta kegiatan ataupun pertemuan / kegiatan PNPM MP dilevel basis, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota bahkan tingkat Provinsi. Capaiannya seperti tergambar dalam tabel-tabel berikut ini.

Tabel : Peran Perempuan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Sosialisasi, Pertemuan, Panitia/Tim) Kota Semarang 2014

NO	SIKLUS / Kegiatan	PESERTA				
		Lk	Pr	M	Total	%Pr
1	REFLEKSI 3 TAHUNAN BASIS	1,097	1,112	1,034	2,209	50%
2	REFLEKSI 3 TAHUNAN KELURAHAN	494	413	394	907	46%
3	KBK	401	397	358	798	50%
4	FGD REFLEKSI KEMISKINAN BASIS	1,157	1,211	1,162	2,368	51%
5	FGD REFLEKSI KEMISKINAN KELURAHAN	702	659	654	1,361	48%
6	TIMPS	158	116	120	274	42%
7	FGD KELEMBAGAAN DAN KEPIMPINAN	1,672	1,683	1,569	3,355	50%
8	PELAKSANAAN PS BASIS	1,168	1,222	1,166	2,390	51%
9	PELAKSANAAN PS KELURAHAN	672	694	646	1,366	51%
10	PEMBENTUKAN UPL	15	1	5	16	6%
11	PEMBENTUKAN UPS	6	12	9	18	67%
12	PEMBENTUKAN UPK	8	15	11	23	65%
13	PEMBENTUKAN PENGAWAS UPK	15	9	7	24	38%
14	SOSIALISASI PJM PRO (FASKEL)	282	195	222	477	41%
15	PEMBENTUKAN TIM PP	197	153	157	350	44%
16	BIMBINGAN TEKNIK PP	153	120	128	273	44%
17	LOKAKARYA TINGKAT KEL/DESA	266	209	204	475	44%
18	PENYUSUNAN DRAF PJM PRO	188	154	144	342	45%
19	KONSULTASI PJM PRO TK KELURAHAN	419	379	374	798	47%
20	PERTEMUAN UTK MENYEMPURNAKAN PJM PRO	289	246	239	535	46%
21	SOSIALISASI DOKUMEN	263	206	223	469	44%
22	TINJAUAN PARTISIPASI INTERNAL	2,119	1,806	1,780	3,925	46%
23	TINJAUAN PARTISIPASI EKSTERNAL	1,253	1,264	1,193	2,517	50%
24	REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)	1,089	864	922	1,953	44%

Dengan mencermati tabel peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat miskin terutama terkait keterlibatan perempuan dalam kegiatan sosialisasi, pertemuan dan kepanitiaan atau tim yaitu rata-rata capaiannya sudah diatas 40% kecuali pada kegiatan pembentukan UPL (Unit Pengelola Lingkungan) masih sangat minim keterlibatan perempuan dalam ikut serta pembentukan UPL yaitu 6%. Hal ini sangat kontradiktif dengan kegiatan pembentukan UPS (Unit Pengelola Sosial) perempuan yang berperan 67% dan kegiatan pembentukan UPK (Unit Pengelola Keuangan) perempuan yang berpartisipasi 65%. Dan keikutsertaan perempuan di tingkat basis sangat menggembirakan yaitu terlihat dalam kegiatan pemetaan swadaya (PS) di level basis keterlibatan perempuan sebesar 51% dibandingkan laki-laki 49%. Demikian pula di level basis keterlibatan perempuan dalam kegiatan FGD (Focus Group Discussion) RK (Refleksi Kemiskinan) juga sangat baik yaitu 51%. Hal ini berarti peran perempuan dalam ikut serta mendiskusikan dan memikirkan penanggulangan kemiskinan atau pemberdayaan masyarakat miskin jelas sangat peduli sejak dari level basis.

Tabel : Peran Perempuan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Sebagai Anggota UPK, UPL, UPS Dan Pengawas UPK) Kota Semarang 2014

NO	SIKLUS / Kegiatan	PESERTA				
		Lk	Pr	M	Total	%Pr
1	SOSIALISASI RNC/KEGIATAN TP	18,102	21,126	17,456	39,228	54%
2	PEMBENTUKAN TIM TP	3,921	2,594	2,846	6,515	40%
3	TINJAUAN PARTISIPATIF INTERNAL	20,753	14,552	15,013	35,305	41%
4	TINJAUAN PARTISIPATIF EKSTERNAL	11,728	12,273	11,211	24,001	51%
5	KOMUNITAS BELAJAR KELURAHAN (KBK)	3,664	2,997	2,792	6,661	45%
6	ANGGOTA UPL	282	84	114	366	23%
7	ANGGOTA UPS	115	144	57	259	56%
8	ANGGOTA UPK	105	211	69	316	67%
9	PEMBENTUKAN PENGAWAS UPK	197	45	27	242	19%
10	PELAKSANAAN RWT	15,926	10,961	12,029	26,887	41%

Tabel tersebut diatas menggambarkan peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat miskin sebagai anggota UPK, anggota UPL, anggota UPS dan Pengawas UPK di Kota Semarang. Yang sangat menonjol peran perempuan sebagai anggota UPK (Unit Pengelola Keuangan) yaitu 67% kemudian peran perempuan sebagai anggota UPS yaitu 56%. Sedangkan peran perempuan sebagai anggota UPL yaitu 23% masih termasuk cukup baik karena yang ditangani atau dikelola di UPL lebih banyak infrastruktur sehingga perempuan masih merasa kurang memiliki kapasitas untuk bidang itu.

Tabel : Peran Perempuan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Pemilu BKM / LKM Dan Anggota BKM / LKM) Kota Semarang 2014

NO	PEMLUBKM/ LKM	Anggota				
		Lk	Pr	M	Total	%Pr
1	SELEKSI UTUSAN MASYARAKAT - JML PESERTA PEMILU BASIS	138,237	115,646	108,279	253,883	46%
2	SELEKSI UTUSAN MASYARAKAT - JML UTUSAN BASIS	14,296	7,922	8,719	22,218	36%
3	PEMILU ULANG KEMITRAAN KELURAHAN	8,938	5,357	5,880	14,295	37%
4	JML ANGGOTA LKM	1,499	560	419	2,059	27%

Melihat tabel peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat miskin dalam ikut serta Pemilu BKM / LKM (Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat) dan terpilih menjadi anggota BKM / LKM menunjukkan bahwa di Kota Semarang, perempuan yang terlibat langsung dalam pemilu BKM / LKM yaitu 37%. Hal ini berarti peran perempuan dan kepedulian perempuan dalam ikut membangun wadah kelembagaan sebagai sarana penanggulangan kemiskinan di perkotaan sudah cukup baik. Apalagi bila dilihat keterlibatan langsung perempuan sebagai anggota pengurus BKM ? LKM yang merupakan wadah penanggulangan kemiskinan yaitu sebesar 27%. Hal ini berarti perempuan di Kota Semarang cukup memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan.

Tabel : Peran Perempuan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Sebagai Anggota KSM Dan Relawan) Kota Semarang 2014

NO	KSM PEREMPUN & Relawan	Anggota				
		Lk	Pr	M	Total	%Pr
1	KSM PEREMPUN	3,970	4,281		8,251	52%
2	RELAWAN	1,887	1,220		3,107	39%

Keterlibatan perempuan atau peran perempuan diperjelas lagi dengan jumlah anggota KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Perempuan yang memberikan kontribusi penuh pada pemberdayaan perempuan atau masyarakat miskin di perkotaan. Dengan adanya anggota KSM Perempuan salah satunya bisa mengakses perempuan lainnya yang sulit dijangkau atau didekati untuk pemberdayaannya. Jumlah anggota KSM Perempuan PNPM MP Kota Semarang yaitu 52%. Jumlah ini belum termasuk KSM yang diluar binaan PNPM MP sehingga hal ini menunjukkan keterlibatan perempuan dalam pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan cukup baik walaupun masih tetap didorong terus untuk berkembang. Disamping itu dalam tabel tersebut terlihat jumlah perempuan yang menjadi Relawan penanggulangan kemiskinan (pemberdayaan masyarakat) yaitu sebesar 39%. Hal ini berarti perempuan di Kota Semarang mau dan mampu peduli terhadap pemberdayaan masyarakat miskin walaupun rela tidak dibayar tetapi hatinya tetap tergerak untuk peduli terhadap sesama masyarakat.

Pengarustamaan adalah upaya/strategi yang harus dilakukan untuk memberi peluang kepada seluruh komponen atau stakeholders agar dapat berperan secara optimal dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender (gender mainstreaming) merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (marginalisasi, stereotipe, subordinasi, kekerasan dan beban ganda).

Diakui selama ini ada anggapan bahwa kualitas perempuan dalam pembangunan masih sangat rendah, yang menyebabkan peran kaum perempuan tertinggal dalam segala hal. Maka untuk mengatasinya diperlukan upaya dan strategi mengintegrasikan gender ke dalam arus pembangunan dengan cara menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan dan menghilangkan faktor kendala yang dihadapi perempuan dalam pembangunan dengan melakukan kegiatan analisis dan evaluasi (1) sejauhmana perempuan terlibat dalam program-program pembangunan (2) sejauhmana kualitas tenaga kerja perempuan (3) hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi perempuan dalam kegiatan pembangunan (4) upaya-upaya apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan peran perempuan (5) faktor apa sajakah yang dominan berpengaruh terhadap hubungan gender dan (6) bagaimana pemecahan masalah yang dihadapi perempuan. Maka dengan kerangka ini tentunya akan dapat dihasilkan suatu identifikasi sejauhmana peranan perempuan dalam pembangunan dewasa ini.

Salah satu indikator integrasi perempuan dalam pembangunan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan disemua bidang lapangan kerja sebagai politikus, PNS, karyawan, buruh perusahaan termasuk petani, hingga tahun 1998 saja mencapai 40,2 persen. Kondisi ini dapat dipahami begitu besar andil perempuan dalam pembangunan nasional yang diprediksi akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun Women In Development Approach (WIDA) yang diperkenalkan oleh United States Agency for International Development (USAID) bahwa perempuan merupakan sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan sumbangan ekonomi dalam pembangunan. Ini berarti bahwa perempuan dan pembangunan telah menjadi sorotan dunia internasional termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kajian yang lebih komprehensif.

Hubeis (1985) mengatakan, analisis alternatif peran perempuan dalam mendorong pembangunan dapat dilihat dari tiga aspek yakni (1) peran tradisi atau peran domestic yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga. Perempuan yang berhasil mengelola rumah tangga dengan baik akan menjadi inspirasi dan motivator bagi pelaku pembangunan, (2) peran transisi yang berkaitan dengan garapan lahan pertanian atau bekerja di usaha keluarga dan (3) peran kontemporer. Perempuan memiliki peran di luar rumah tangga atau disebut wanita karier. Peran-peran ini menunjukkan bahwa perempuan baik langsung maupun tidak langsung mempunyai kontribusi yang besar terhadap pembangunan bangsa.

Demikian pula dari paparan tentang peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, perempuan mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan manusia yang tercermin dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang yang cenderung meningkat dari tahun 2009 (76,90) sampai pada tahun 2013 (78.54). Perempuan juga mempunyai kontribusi dalam pembangunan gender yang tercermin dalam capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) yaitu cenderung meningkat pada tahun 2009 (71,42) sampai pada tahun 2013 (73.74). Dan kontribusi peran perempuan dalam pemberdayaan gender terlihat dalam capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yaitu menunjukkan kecenderungan meningkat pula pada tahun 2009 (63,19) sedangkan pada tahun 2013 (70.62). Hal ini dapat dikatakan bahwa peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat perkotaan mempunyai kontribusi yang signifikan dan baik dalam pembangunan khususnya dalam penanggulangan kemiskinan.

Realitas ini juga dibuktikan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) di Kota Semarang demikian juga dalam capaian PNPM MP di Provinsi Jawa Tengah, bahwa peran perempuan dalam setiap kegiatan tahapan/ siklus mempunyai kontribusi yang cenderung signifikan meningkat dan baik dalam ikut menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan. Mengingat pentingnya peran perempuan dalam program PNPM MP mempunyai KPI atau indicator performance atau capaian keberhasilan yang terkait pada peran perempuan dalam setiap kegiatan “pembelajaran kritis” program pemberdayaan masyarakat.

Karena peran perempuan menjadi indikator capaian kinerja atau tolok ukur keberhasilan program maka dalam setiap langkah kegiatan program pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan harus berdasarkan indikator tersebut. Ukuran kinerja tersebut yaitu :

1. Tingkat partisipasi perempuan dalam serangkaian proses rebug warga selama pelaksanaan PNPM-MP minimal sebesar 30 %
2. % wanita / perempuan yang terpilih sebagai anggota BKM/LKM sebesar 20%
3. % wanita / perempuan sebagai penerima manfaat pinjaman dana bergulir sebesar 30 %
4. % wanita / perempuan sebagai penerima dana hibah (program sosial)
Sebesar 30 %
5. % wanita / perempuan sebagai anggota KSM sebesar 30 %

Apabila dicermati dari indikator tersebut menunjukkan peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan (PNPM MP) di Kota Semarang dari semua indikator tersebut telah tercapai bahkan melampaui, hal ini membuktikan bahwa peran perempuan dalam pembangunan tidak hanya sebagai penonton yang selama ini menjadi pandangan awam. Capaian peran atau partisipasi perempuan dalam keaktifan setiap pertemuan / FGD dari basis sampai tingkat Kelurahan mencapai hampir 51 % melampaui target indikator keberhasilan (KPI) hanya 30%. Demikian pula dilihat dari keterlibatan perempuan dalam BKM / LKM yaitu wadah atau lembaga yang mengelola program pemberdayaan masyarakat miskin di Kelurahan / Desa, perempuan di Kota Semarang mempunyai kontribusi mencapai 27 % lebih tinggi dari target KPI sebesar 20%. Khusus peran perempuan dalam wadah BKM/ LKM ini merupakan hal yang sangat strategis karena perempuan dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan terkait pemberdayaan masyarakat atau penanggulangan kemiskinan perkotaan di desa atau kelurahan masing-masing.

Lebih rinci lagi keterlibatan perempuan dalam KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang menjadi sasaran sekaligus subjek atau pelaku dari pemberdayaan masyarakat. Di Kota Semarang peran perempuan menjadi anggota KSM mencapai 52% lebih tinggi dari target indikator keberhasilan yaitu 30%. Disinilah peran perempuan lebih terlihat dan langsung menjadi tindakan secara nyata dari masyarakat miskin tak berdaya menuju masyarakat berdaya yang sejahtera. KSM akan mendapatkan peningkatan kapasitasnya sehingga perempuan yang menjadi anggota kelompok pengetahuan, ketrampilan, manajemen keuangan, kewirausahaan dan lainnya yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat miskin atau belum berdaya. Hal ini juga ditentukan dari keaktifan perempuan sebagai anggota KSM, sehingga KSM tersebut cepat berkembang dari yang belum berdaya menjadi berdaya dan menjadi KSM mandiri yang memiliki peluang potensi untuk memperoleh dukungan pendanaan yang lebih besar berupa kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga ringan dan membantu KSM untuk berkembang.

Hal ini menunjukkan peran perempuan sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan bahkan ujung tombak atau sebagai subyek / pelaku bukan hanya obyek program. Perempuan harus dapat menduduki porsi yang sama dengan laki-laki dalam upaya penanggulangan kemiskinan / pemberdayaan masyarakat. Dan beberapa pengalaman dapat diambil hikmahnya bahwa perempuan mempunyai sifat ketelitian, rajin, disiplin, bekerja ulet, sabar, dan menjadi sentra keluarga dalam pembelajaran / pendidikan keluarga. Sehingga sangat wajar apabila perempuan mewarnai dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang penuh dengan proses pembelajaran kritis masyarakat. Dan hal ini membutuhkan sosok perempuan untuk terlibat secara optimal dalam penanggulangan kemiskinan perkotaan.

Maka realitas peran perempuan ini sesungguhnya untuk menepis anggapan selama ini antara lain :

- a. Karena konstruksi sosial budaya *gender*, seorang laki-laki misalnya haruslah bersifat kuat, agresif, rasional, pintar, berani dan segala macam atribut kekelakian lain yang ditentukan oleh masyarakat tersebut, maka sejak seorang bayi laki-laki lahir, dia sudah langsung dibentuk untuk "menjadi" seorang laki-laki, dan disesuaikan dengan atribut-atribut yang melekat pada dirinya itu. Demikian pula halnya dengan seorang perempuan yang karena dia lahir dengan jenis kelamin perempuan maka dia pun kemudian dibentuk untuk "menjadi" seorang perempuan sesuai dengan kriteria yang berlaku dalam suatu masyarakat dan budaya dimana dia lahir dan dibesarkan, misalnya bahwa karena dia dilahirkan sebagai seorang perempuan maka sudah menjadi "*kodrat*" pula bagi dia untuk menjadi sosok yang cantik, anggun, irrasional, emosional dan sebagainya.

- b. Pemapanan citra bahwa seorang perempuan itu lebih cocok berperan sebagai seorang ibu dengan segala macam tugas domestiknya yang selalu dikatakan sebagai “urusan perempuan”, seperti membersihkan rumah, mengurus suami dan anak, memasak, berdandan dan sebagainya. Sementara citra laki-laki, disosialisasikan secara lebih positif, dimana dikatakan bahwa laki-laki karena kelebihan yang dimilikinya maka lebih sesuai jika dibebani dengan “urusan-urusan laki-laki” pula dan lebih sering berhubungan dengan sektor publik, seperti mencari nafkah, dengan profesi yang lebih bervariasi daripada perempuan. Kesemua itu disosialisasikan sejak dari kelas satu Sekolah Dasar melalui buku-buku pelajaran di sekolah hingga Panca Dharma Wanita, yang menyatakan bahwa tugas utama seorang perempuan adalah sebagai “pendamping” suami, dan itulah yang diyakini secara salah oleh sebagian orang sebagai “kodrat wanita.”

Daftar Referensi

- Abdurrahman Mustofa dan Soekartawi., *Masalah Pengembangan Kelembagaan Pedesaan Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan*. Makalah., tt,th. 1999
- Bakhit, Izzadin et. all, *Attacking The Roots of Poverty*, Yakoma-PGI, Jakarta,1996
- Bambang Rudito. Arif Budimanta, *Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development Cetakan Pertama*. ICSD & FKPM, 2003
- Bintarto, interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya, Ghalia Indonesia, Jakarta ,1989
- Ditjen Cipta Karya (2009),*Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*,Jakarta
- DPU,Ditjen Cipta Karya (2008-2010), *Modul-modul Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat, TOT Pemandu Nasional PNPM Mandiri Perkotaan*,Jakarta
- Fakih, Mansour 1999. Analisis Gender dan transformasi sosial.Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Gunawan Sumodiningrat (1997). *Pembngunan Daerah dan pemberdayaan Masyarakat* ,PT Bina Rena Pariwara, jakarta
- Gunawan Sumodiningrat (2009) (editor : Aribowo Suprajitno Adhi). *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa,Menanggulangi Kemiskinan dengan prinsip Pemberdayaan Masyarakat*, PT Elex Media Komputindo /Gramedia, Jakarta
- Gunawan Sumodiningrat (1999),*Agenda Pemulihan Ekonomi, Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat melalui pemberdayaan dan otonomi daerah* ,Kipas Putih Aksara, Jakarta
- Hakeem, Ali Hosein. *Membela Perempuan Menalar Feminisme dengan Nalar Agama*. 2005. Al-Huda: Jakarta.
- Ibrahim, Idi Subandy dan Hanif Suranto, (ed). *Wanita dan Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998
- Illich, Ivan. *Matinya Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Kartsasmita, Ginanjar; *Pembangunan Untuk Rakyat*, SIDES, Jakarta, 1996.
- Khan, *Wahiduddin. Antara Islam dan Barat*. 2001. Serambi: Jakarta.Komite Penanggulangan Kemiskinan, *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan* Jakarta. September 2005
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1980.
- Korten, DC., 1988, Community Organization and Rural Development ; *A Learning Pricces Approach Publik Administration Review*, Vol 40, No 5, Sept – Oktober : 480 – 511
- Long, N.. *Sosiologi Pembangunan Pedesaan*, Bina Aksara, Jakarta. 1992
- Mosse, Julia Cleves. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center dan Pustaka Pelajar, 1996
- Munir, Lily Zakiyah, (ed). *Memposisikan Kodrat*. Bandung: Mizan, 1999
- Noor, H. M. Arifin, Drs. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Pustaka Setia, 1997

SPEKTRUM

Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional
Volume 13 No. 1 Januari 2016

- Murniati, Nunuk P. 2004 *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Prespektif Agama, Budaya, dan Keluarga)*. Buku II. Magelang: Indonesia Tera.
- Nasikun, Dr, *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*, PT Tiara Wacana Jakarta, 1996
- Nugroho, Riant 2008 *Gender dan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Nurdin Widodo Dan Suradi. *Penelitian Profil Dan Peranan Organisasi Lokal Dalam Pembangunan Masyarakat*.
- Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, *Buku Pedoman Umum cetakan pertama*. Jakarta September 2004
- Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, *Buku Pedoman Umum cetakan revisi*. Jakarta September 2002
- Romani. 2007, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Saptari, Ratna dan Brigitte Holzner. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial. Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997
- Siahaan, H.M. 1993. *Dimensi Struktural dan Kultural Kemiskinan Pedesaan* Surabaya Post, Senin, 3 Maret 1993.
- Soelaeman, M. Munandar. Ir. MS. *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 1998
- Stowasser, Barbara Freyer. *Reinterpretasi Gender*. 2001. Pustaka Hidayah: Bandung.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek edisi revisi V*. Jakarta November 2002.
- Suharto Edi, *Makalah Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Pusaran Desentralisasi dan Good Governance*, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, 21 Maret 2006.
- Sumodiningrat, Gunawan dkk.; *Kemiskinan Teori Fakta dan Kebijakan*, Impac, Jakarta, Surapaty, Surya Chandra "Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Nasional", dalam www.pdiperjuangan.or.id. Di akses pada tanggal 5 September 2012.
- UNDP (2007), *Memberdayakan Masyarakat dengan mendayagunakan Telecenter*, Panduan Untuk Fasilitator Infomobilisasi, Jakarta.

**MODEL PENGELOLAAN KONFLIK POLITIK PADA
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KOTA TASIKMALAYA****Moh. Ali Andrias
Akhmad Satori**

Dosen Ilmu Politik Universitas Siliwangi

Abstract

This article discusses the results of research regarding the fight "power" politics displayed by one of the parties PPP, the internal armed conflict is one of the internal conflicts of political parties in Indonesia. The internal political disputes of political parties for their leadership dualism, this dualism political party elites have always claimed that the version of the National Conference (National Conference) it is most true. Although the government through the Ministry of Justice and Human Rights (Menkumham) has attempted to reconcile the internal political dispute and the political parties, but still, their alleged political interests that will happen, the government must take a decision on the dispute or political conflicts so that this conflict from spreading. The purpose of this study to know the political forces after the PPP congress performances in two different places, how the PPP political forces in the face of political power struggle in the election performance of Tasikmalaya 2017. This study used qualitative methods, using data analysis Miles and Huberman, and validity of the data using triangulation data and resources. Expected to look for a model or pattern of conflict resolution how the PPP is able to solve the problems inside. From the research that has been carried out, the internal conflict PPP in Tasikmalaya, basically a condition similar to the internal conditions of PPP in Tasikmalaya regency when the performances of the election in 2015 and then, the condition of this problem is not a problem that a partial, but a condition of the conflict nationwide from PPP itself, and spread into the PPP board at the DPD and DPC. From the chaos of the conflict, all the prominent scholars, practitioners and political elite PPP is already saturated with this conflict and immediately wanted reconciliation (peace), because this turmoil had an impact on the strength of the PPP and the integrity of the PPP in the eyes of the public and PPP cadres, which is split on the performance of the General Election in Tasikmalaya city in the year 2017.

Keywords: Conflict Resolution, PPP, election Tasikmalaya

Pendahuluan

Pertarungan politik Indonesia pasca reformasi telah mengubah perspektif masyarakat terhadap politik. Era reformasi ini secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat mampu menilai tentang kebenaran politik maupun kepentingan politik dari kalangan elit politik yang berkuasa di dalam maupun di luar pemerintahan. Proses demokratisasi di Indonesia berbagai cara dilakukan, salah satu aktivitas politik yakni melalui pemilu presiden dan kepala daerah secara langsung maupun aktivitas politik lainnya agar kebebasan politiknya sesuai dengan substansi demokrasi.

Aktivitas politik yang membebaskan hak politik rakyat merupakan preferensi yang membebaskan masyarakat lebih rasional, cerdas, dan transparan memilih pandangan politik yang sesuai dengan hati nurani rakyat, terutama *platform* dan program politik yang jelas demi kemaslahatan bersama. Bahkan masyarakat Indonesia bisa dikatakan mampu membedakan kebenaran politik ataupun kebohongan politik yang dipamerkan kalangan elit politik di berbagai institusi politik.

Pertarungan politik yang ditampilkan elit politik dari berbagai ideologi dan aliran politik, memang sudah dimunculkan ketika Indonesia mulai melaksanakan sistem politik dan kenegaraan pasca kemerdekaan. Dari berbagai aliran politik dan ideologi saling berbenturan untuk merebut hati rakyat dan meraih kekuasaan politik. Bahkan tidak segan-segan antar elit politik saling menuding, memfitnah, bahkan "menghabisi" elit politik lain dengan berbagai cara. Jika elit politik tidak memiliki kedewasaan secara politik tidak menutup kemungkinan, negara Indonesia hanya dipenuhi konflik politik yang tidak kunjung selesai hingga kini.

Membicarakan pertarungan dan konflik politik dalam penelitian ini akan memfokuskan pertarungan politik di internal parpol yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Meskipun secara rasional pertarungan politik itu sebuah kenormalan, namun sebenarnya sangat merugikan keutuhan dan kesolidan parpol itu sendiri, bahkan publik (konsituen) akan menilai bahwa sebuah parpol sebagai intitusi politik yang memiliki fungsi dan tugasnya, harus memberikan komunikasi, sosialisasi, rekrutmen, pendidikan politik, ditambah sebagai sarana pengatur konflik (Gatara, dan Said 2007).

Peristiwa konflik politik yang terjadi di internal parpol dalam satu dekade terakhir ini sudah terjadi di beberapa parpol antara lain, kemelut elit parpol di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 2008 lalu yang menjadi dua kubu versi Muhaemin dan versi Gus Dur yang kini telah menghancurkan kesolidan dan keutuhan partai PKB. Begitupula adanya kemelut Partai berlambang beringin (Golkar) yang terjadi dua versi yakni versi Agung Laksono dan versi Aburizal Bakrie. Sengketa politik internal parpol ini adanya dualisme kepemimpinan, memberi runyam perpolitikan Indonesia, dualisme kepemimpinan ini para elit parpol selalu mengklaim bahwa versi Musyawarah Nasional (Munas) nya adalah paling benar.

Meski pemerintah melalui Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) sudah berupaya mendamaikan sengketa politik internal parpol tersebut, namun tetap saja adanya dugaan kepentingan politik yang akan terjadi, bahkan ada dugaan pemerintah (salah satu partai yang berkuasa) mengambil keuntungan politik dari kekisruhan parpol tersebut. Namun pemerintah harus ambil keputusan dari sengketa atau konflik politik tersebut agar konflik ini tidak semakin meluas.

Belum selesainya sengketa politik di tubuh partai Golkar pada waktu itu, pemerintah sudah diberi tugas lain untuk menyelesaikan sengketa politik di tubuh partai berlambang Ka'bah, titik penyelesaian yang dilakukan pemerintah atas kemelut politik pada PPP, mekanismenya hampir sama apa yang terjadi di Golkar. Namun hingga kini proses damai (*islah*) PPP belum usai, namun kondisi konflik politik elit PPP di tingkat pusat, berdampak luas kepada kekisruhan PPP di tingkat daerah.

Dengan ketertarikan peneliti terhadap konflik politik PPP, apakah konflik ini telah berimplikasi juga ke tingkat lokal, kemudian bagaimana PPP di Kota Tasikmalaya mampu mengelola konflik ini agar basis massa di tingkat "*grass root*" tidak berpengaruh besar akibat kemelut di tingkat pusat. Dengan melakukan penelitian di Kota Tasikmalaya, dengan alasan wilayah Kota Tasikmalaya merupakan miniatur permasalahan tentang konflik PPP di daerah, karena wilayah ini memiliki basis massa PPP cukup besar selain wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Mengapa tertarik dengan konflik politik PPP, partai yang dibentuk pada era Orde Baru ini merupakan partai yang sudah memiliki basis massa yang kuat di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat terutama Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Kekisruhan PPP ini dimulai pasca pemilu presiden tahun 2014 sampai dengan saat ini, dimana PPP di terpa dengan konflik dualisme kepengurusan yang terjadi di dalam tubuh PPP. Adanya muktamar untuk memilih Ketua Umum yang digelar di dua kota besar yakni Surabaya menghasilkan Ir. H. M. Romahurmuziy, M.T sebagai Ketua Umum PPP, sementara di Jakarta mengklaim bahwa Djan Farid sebagai Ketua Umum yang sah, dualisme keputusan muktamar ini mengakibatkan kekuatan PPP terpecah.

Akhir dari sengketa muktamar ini adalah dikeluarkannya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) nomor 504 K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015, dimana keputusan MA tersebut membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor 120/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 10 Juli 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 25 Februari 2015 yang dimana isinya adalah mengesahkan Ir. H. M. Romahurmuziy, M.T sebagai Ketua Umum PPP hasil Muktamar VIII Surabaya periode 2014-2019. Keputusan tersebut merupakan serangan balik dari kubu Djan Faridz hasil muktamar Jakarta yang tidak mau menyerah untuk tetap melayangkan protes dan mengajukan banding untuk menetapkan kembali bahwa kepemimpinan di bawah M. Romahurmuziy tidak sah.

Apalagi saat ini kekuatan politik PPP sedang diuji oleh pertarungan Pemilu Kepala Daerah (pemilukada) di Kota Tasikmalaya yang akan digelar pada tahun 2017 mendatang. Jika kesolidan partai belum pulih (islah), maka tidak menutup kemungkinan akan berimplikasi negatif terhadap kemenangan PPP pada pemilukada nanti. Apalagi beberapa kali pemilukada maupun anggota dewan yang diusung oleh PPP selalu menang dalam peregelaran politik tersebut.

Konflik politik internal PPP seharusnya bisa diselesaikan oleh parpol itu sendiri bukan oleh pihak lain (pemerintah), namun karena kekisruhan bisa berimplikasi negatif terhadap perpolitikan Indonesia, sehingga pemerintah turut campur tangan untuk menyelesaikan konflik politik ini. Di sisi lain konflik ini akan berpengaruh negatif terhadap kekuatan PPP baik secara nasional maupun regional daerah di Indonesia. Terutama menjelang pesta demokrasi (pemilukada) di beberapa daerah. Secara prinsipil isu-isu politik yang berkembang sudah adanya peregelaran dualisme kepemimpinan dari pasangan kepala daerah Budi Budiman (Walikota) dan Dede Sudrajat (Wakil Walikota) yang sama-sama dari kader PPP.

Namun dua pemimpin ini tidak satu kubu, melainkan terpecah ada yang mendukung Muktamar Surabaya dan Muktamar Jakarta. Sehingga kekuatan PPP ini di Kota Tasikmalaya juga berpengaruh terhadap kekuatan PPP untuk melanjutkan kemenangan pemilukada yang akan digelar pada 2017 nanti. Sehingga bagaimana pengelolaan partai (PPP) dalam memanager konflik ini agar kelangsungan PPP dalam peregelaran politik pada masa mendatang tidak terlalu berpengaruh besar akibat kekisruhan dualisme kepemimpinan di dalam institusinya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, begitu pentingnya melakukan penelitian ini bagaimana model pengelolaan konflik partai PPP di Kota Tasikmalaya ?

Konflik Politik PPP Sudah Dimulai Pada Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya 2015

Membahas mengenai sebuah penelitian tentang konflik internal PPP di Kota Tasikmalaya, kondisinya hampir serupa dengan internal PPP di Kabupaten Tasikmalaya, situasi ini bukan masalah yang parsial, akan tetapi merupakan kondisi konflik secara nasional, namun merembet ke pengurus PPP di tingkat DPD dan DPC di daerah. Pada pengantar penelitian ini akan mengulas secara singkat beberapa permasalahan yang ada di Kab Tasikmalaya, bagaimana kepentingan politik PPP terpecah keputusan politiknya, ketika mendukung Bupati dan Wakil Bupati Uu Ruzhanul Ulum (Uu) dan Ade Sugianto (Ade). Uu merupakan kader PPP, sementara Ade merupakan kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun ketika Uu ingin mencalonkan lagi menjadi Bupati ke dua kalinya, terjadi perpecahan dan konflik politik yang menolak keras Uu dicalonkan lagi dari PPP. Sementara kondisi politik Pemilukada Kab Tasikmalaya yang diselenggarakan 9 Desember 2015, mengalami ketidakpastian penyelenggaraan pemilukada. Pasalnya pemilukada di Kab Tasikmalaya ini merupakan kasus baru di Indonesia, karena hanya satu calon yang mengajukan diri (calon tunggal).

Sementara calon pemimpin politik lainnya diklaim belum siap bertarung. PPP sebagai parpol berkuasa di DPRD tidak setuju dan terpecah mendukung Uu menjadi Bupati Kab Tasikmalaya periode mendatang, bahkan ingin menggagalkan penyelenggaraan pemilukada 2015 lalu, alasannya karena aturan dan mekanisme peraturan perundangan tidak boleh hanya mengajukan calon tunggal. Namun setelah berlarut-larut hingga tingkat Mahkamah Konstitusi, akhirnya MK memutuskan penyelenggaraan pemilukada Kab Tasikmalaya tetap diberlangsungkan.

Kondisi ini dipicu dualisme PPP di tingkat nasional yang mengakibatkan konflik merembet ke tingkat DPD dan DPC PPP di daerah-daerah. Dua kubu yang berkonflik adalah kubu muktamar Surabaya yang memilih Romahurmuzy jadi ketua umum, dan kubu muktamar Jakarta dengan Djan Faridz diakui sebagai ketua umumnya. Beberapa anggota PPP di DPRD Kab Tasikmalaya terpecah, dan menyatakan dirinya berada dibawah kepengurusan muktamar Surabaya dan sebagian lagi berada dibawah kepengurusan muktamar Jakarta.

H. Ruhimat yang sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KabTasikmalaya, yang menjabat sebagai ketua DPRD Kab Tasikmalaya, menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa dirinya berada di pihak Jakarta (kubu Djan Faridz). Sementara Uu yang mencalonkan lagi menjadi bupati merupakan kader PPP berada di pihak muktamar Surabaya (Rohmaurmuzy). Sehingga rencana Uu pada pemilukada 2015 akan berjalan mulus, realitasnya terganjal oleh parpol yang pernah mendukungnya pada periode sebelumnya. Tidak didukungnya Uu dalam pencalonannya sebagai bakal calon bupati periode kedua, menjadikan kubu Uu harus berjuang ekstra keras meyakinkan konstituen dan masyarakat agar pemilukada calon tunggal berjalan mulus.

Uu mengklaim telah mendapatkan restu secara lisan dari Sekjen DPP PPP Pusat, namun dalam kenyataannya DPC PPP Kab Tasikmalaya tidak mengeluarkan SK apapun, baik mengusung atau tidak mengusung Uu sebagai calon Bupati Kab Tasikmalaya. Meskipun tidak mendapatkan restu politik dari DPC PPP Kab Tasikmalaya, Uu tetap bersikukuh maju menjadi calon Bupati Kab Tasikmalaya dengan dukungan dari partai lain, akan tetapi Uu selaku kader dari PPP tidak tinggal diam dalam mensukseskan pencalonannya. Pihaknya sudah melakukan konsolidasi sampai ke tingkat ranting, 38 Kecamatan sudah dikonsolidasikan., begitu juga dengan legitimasinya karena sampai saat ini kami berada di kubu yang sudah mempunyai legitimasi.

Berdasarkan hasil survey, tentang pasangan calon tunggal Pilkada Kab Tasikmalaya oleh lembaga survey citra komunikasi LSI pasangan Uu dan Ade sebagai calon tunggal Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2015-2020, 64,7% memilih setuju, 25,1% memilih tidak setuju dan yang memilih tidak tahu 10,2%. Sementara itu pandangan pendukung yang juga memilih PPP pada Pemilu legislatif 2014, yang menyatakan setuju untuk memilih dalam Pilkada calon tunggal hasilnya adalah 80,0%. Ini merupakan hasil yang cukup untuk memuluskan pasangan Uu dan Ade maju pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Meskipun adanya konflik politik akibat dualisme kepemimpinan di kubu PPP, para partisan dan pemilih PPP masih percaya bahwa partai ini masih tetap solid untuk pemilu-pemilu berikutnya.

Kekuatan PPP Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 504 K/TUN/2015, Sebagai Acuan Kekuatan PPP di Kota Tasikmalaya

Mahkamah Agung (MA) sudah memutuskan surat nomor 504 K/TUN/2015 Tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 120/B/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 10 Juli 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 25 Februari 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Hasil Muktamar Surabaya (Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia : 2015).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 42a ayat 1 yang menjelaskan bahwa "Masing-masing parpol yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) menyerahkan keputusan persetujuan pasangan calon kepada pengurus parpol tingkat provinsi atau kabupaten/kota". Dengan demikian dapat diartikan bahwa pencalonan Uu dalam pilkada lalu, tidak mendapatkan persetujuan dari masing-masing kepengurusan, karena PPP sedang mengalami konflik. Bagaimana dengan kekuatan pasangan pilkada di Kota Tasikmalaya tahun 2017, apakah PPP akan terpecah kekuatannya ketika mengusung "jagoannya" ?.

Jika mengacu kepada peraturan KPU memang sangatlah sulit adanya pengusungan calon pemimpin politik dilaksanakan oleh partai politik yang sedang berkonflik. Bahkan dalam pra penyelenggaraan pemilukada tahun lalu, PPP terpecah, bahkan PPP yang berseberangan dengan kader pendukung Rohmahurmuzi, secara terang-terangan menyerukan kepada masyarakat untuk memilih tidak setuju terhadap calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya yang *notabene*nya adalah kader PPP sendiri, dengan alasan adanya permasalahan korupsi dan narkoba di Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.

Permasalahan pilkada calon tunggal sudah terjadi juga di beberapa daerah di Indonesia. Dimana berdasarkan hasil perolehan suara dalam pemilukada serentak yang di laksanakan di beberapa daerah dengan calon tunggal seperti Kabupaten Blitar dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Kabupaten Tasikmalaya memperoleh suara terendah dibandingkan dengan dua Kabupaten tersebut. Di Kabupaten Blitar mendapatkan sebesar 78% yang memilih setuju, sedangkan di Kabupaten Timor Tengah Utara mendapatkan persentase kemenangan sebesar 79%, dan Kabupaten Tasikmalaya memperoleh perolehan persentase kemenangan hanya sebanyak 65,35%. Namun jumlah tersebut Uu dan Ade masih tetap melenggang menjadi Bupati Kabupaten Tasikmalaya untuk dua periode.

Menjadi menarik bagi hasil penelitian sebelumnya mengenai benturan politik secara internal PPP. Jika menelaah partai berlambang Ka'bah ini, memiliki sikap politik yang sudah lama mengakar di kalangan masyarakat Kabupaten maupun Kota Tasikmalaya. Memang sebagian besar pendukung partai ini adalah kalangan Nahdiiyin. Dimana adanya dukungan juga dari kalangan alim ulama pesantren. Terbentuknya PPP ini didirikan oleh para ulama, sehingga PPP lebih mendengarkan saran dan masukan para alim *ulama*. Selain itu penentuan sikap politik ini merupakan hasil *istikharah* yang mana tradisi tersebut merupakan budaya yang sudah terbangun sejak dulu di PPP. Atau bisa dikatakan bahwa kekuatan PPP di Tasikmalaya pada umumnya adalah pemilih kultural yang masih mapan, dengan dasar ke Islamannya, ditambah alasan lain bahwa keputusan tidak mendukung adalah hasil *istikharah* dan saran dari para *ulama* Kabupaten Tasikmalaya.

PPP secara kultural telah melekat menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penentuan sikap politik masyarakat Kabupaten maupun Kota Tasikmalaya, karena karakter masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang Islami dan kultural masih dominan, dan cenderung relevan dengan azaz Islam yang dimiliki oleh PPP, selain itu lambang Ka'bah yang dimiliki oleh PPP mampu mempengaruhi sikap politik masyarakat dan menentukan pilihannya pada PPP, sehingga menjadikan perolehan suara PPP pada pemilu legislatif di Kabupaten maupun Kota Tasikmalaya selalu mendapatkan suara tertinggi.

Pengamat sosial Asep Tamam, mengatakan dalam konteks Pemilukada Tahun 2015 lalu, fenomena kekuatan politik PPP tidak menghilang begitu saja meskipun saat ini sedang berkonflik. Tetapi kekuatan politik yang dimiliki kelembagaan tersebut harus berhadapan dengan bangunan politik, ketokohan serta popularitas Uu selaku *incumbent* Bupati Tasikmalaya. Sehingga identitas Uu sebagai kader PPP, ulama dan pemimpin masyarakat telah melekat menjadi kekokohan bangunan politik yang tidak dapat diruntuhkan dengan pembangunan isu dalam satu kondisi saja, apalagi diharapkan dapat merubah perilaku politik masyarakat dalam jangka waktu yang terbatas. Almond dan Powell (Efriza, 2012:126) perilaku politik adalah sebagai keseluruhan tingkah laku politik para aktor politik dan warga negara yang dalam manifestasi konkretnya telah saling memiliki hubungan dengan kultur politik. Lingkup budaya politik meliputi pola orientasi individu yang diperoleh dari pengetahuan yang luas dan sempit orientasinya dipengaruhi oleh perasaan keterlibatan, keterlekatan maupun penolakan, serta orientasinya yang bersifat menilai terhadap obyek dan peristiwa politik.

Bagi masyarakat Kabupaten maupun Kota Tasikmalaya memilih PPP merupakan budaya yang sudah melekat bagi mereka yang beragama Islam. Bangunan politik tersebut telah dibangun semenjak era Orde Baru, karena pada masa tersebut seluruh umat Islam bergabung di dalam naungan PPP, sehingga memilih PPP merupakan suatu kewajiban karena merupakan bagian dari implementasi ajaran Islam. Tetapi dalam konteks Pemilukada, memilih seorang pemimpin juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga dengan adanya persepsi tersebut masyarakat dapat menanggalkan keterikatan terhadap lembaga menjadi keterikatan yang lebih substansial, yaitu memilih dan memiliki seorang pemimpin.

Putusan yang dikeluarkan oleh MA untuk PPP sedikit banyaknya memang mempengaruhi terhadap kesolidan internal dari PPP Kab/Kota Tasikmalaya, akan tetapi pada dasarnya semua anggota dari DPC PPP Tasikmalaya masih terus menjalin komunikasi yang baik dengan sesama kader partai, Basuki Rahmat, M.Si masyarakat sepertinya tidak terlalu menghiraukan keputusan, silahkan mau hasilnya seperti apa, kalau persoalan politik internal. PPP dapat menyelesaikan konflik internal yang terjadi saat ini, karena sebetulnya konflik yang berakar dari kepentingan golongan dan relatif tidak terlalu pengaruh terhadap PPP secara utuh. Kalaupun di Tasik ditengarai konflik PPP imbas dari pusat, saya rasa ini hanya karena ada pilkada saja di Tasik. Karena pilkada telah memunculkan kepentingan golongan dalam berbagai pihak. Kekuatan PPP di Kab/Kotam Tasikmalaya secara kultural memang sangat kuat dan sangat sulit untuk digoyahkan. Kekuatan PPP di Tasik tidak hanya terdapat pada kekuatan struktural tetapi juga terdapat kekuatan kulturalnya juga yang sama-sama kuat, bahkan tidak goyang sama sekali, dan ini dibuktikan kita masih bisa memenangkan Pilkada dan kader yang maju itu adalah kader PPP, sehingga perlu analisis yang lebih mendalam mengenai hal tersebut, kalau menurut saya PPP itu mempunyai kekuatan yang sulit untuk dipecahkan, dan itu sudah dibuktikan.

Walaupun ada beberapa dari kader PPP berkonflik namun tidak serta merta itu terjadi didalam fraksi PPP DPRD juga ikutan pecah, fraksi PPP di DPRD berupaya tidak terpengaruh, artinya sebagai legislatif tetap menjalankan fungsi legislasi, *budgeting*, pengawasan. Karena tujuan utamanya tidak hanya kepentingan politik internal saja, tetapi kepentingan rakyat banyak. Meskipun pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya “memisahkan diri” pada 2001. Akan tetapi dari segi kultural, sosial, historis, agama, bahkan apapun tidak begitu berbeda secara signifikan, begitupula dengan hal perpolitikan.

Analisis dan Model Kepemimpinan Sebagai Resolusi Konflik Internal di PPP

Partai ini sebagaimana dijelaskan pada beberapa literature “dipaksa” dibentuk oleh pemerintah pada tahun 1970-an, beberapa aliran dan organisasi Islam turut membentuk PPP seperti Persatuan Islam (Persis), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan organisasi Islam lainnya yang secara gerakan politik sedikit berbeda satu sama lainnya. Namun karena keterpaksaan politik tersebut akhirnya kelompok-kelompok Islam tersebut pasrah dan mau menuruti kebijakan politik Pemerintahan Soeharto. Setelah sekian lama berkecimpung mengikuti pemilu dan kegiatan politik PPP pada dasarnya tidak terlepas dengan kelompok kaum Nahdiyin, dari beberapa literature dan pengamat Islam mengatakan bahwa kelompok ini disebut juga dengan kelompok Islam tradisional. Namun penulis lebih senang dengan kaum nahdiyin atau NU. Maka oleh karena itu, berkaitan dengan analisis dan kajian PPP pada penelitian ini akan dijelaskan juga mengenai perpolitikan PPP yang juga berpengaruh dan masih dipengaruhi oleh kelompok NU beserta beberapa kyai dan pemimpin agama dari kelompok nahdiyin. Sesuai dengan kajian penelitian ini, bahwa bagaimana resolusi konflik dalam mengatasi perpecahan PPP di Kota Tasikmalaya ini tidak terlepas oleh adanya bimbingan dan saran dari kyai sebagai tokoh dibalik kuatnya PPP di Indonesia.

Sikap politik NU pada tataran akar rumput, sudah barang tentu akan berbeda dalam tataran operasional pada kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan politik maupun pada pengamalan ajaran agama Islam, hal ini, disebabkan pokok-pokok pikiran tersebut tidak banyak kegiatan sosialisasi instruksi PBNU, sehingga tidak terinternalisasi di massa pendukung NU/kaum Nahdiyin. Agar partai politik dengan basis massa warga nahdiyin dapat meraih suara banyak di berbagai daerah dan memiliki perwakilan yang dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan warga nahdiyin. Dengan hal tersebut, berbicara mengenai nahdiyin (NU), PPP, dan model kepemimpinan pada lingkungan PPP beserta kondisi dan situasi politiknya. Juga berkaitan dengan kalangan kyai dan pesantren. Sama halnya apa yang dikaji pada penelitian ini yakni adanya pengaruh kyai dan pondok pesantrennya yang memiliki dukungan dan pengaruh dalam membesarkan PPP di Kota Tasikmalaya secara khusus, dan PPP di beberapa daerah di Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan membahas mengenai hubungan kyai dan pesantren, yang juga berhubungan dengan kisruh perpolitikan PPP di Indonesia, bagaimana kyai mampu mengatasi permasalahan di Kota Tasikmalaya. Namun setidaknya kita akan membahas sedikit hubungan tersebut, agar kajian penelitian ini bisa komprehensif. Kyai dan tokoh pesantren sering kali menjadi lahan sasaran para politisi dalam membangun basis dukungan politik. Pada setiap pemilu maka suara kyai dan santri selalu diperebutkan bukan saja oleh partai-partai politik berbasis Islam saja melainkan juga partai-partai politik berbasis nasionalis. Dalam upaya meraup simpati dan dukungan dari kalangan Islam yang menjadi pengikut setia kyai, banyak partai politik yang menempatkan kyai dan tokoh pesantren pada jajaran pengurus partai dengan harapan dapat menjadi *vote getter* dalam pemilu.

Pada proses politik di tataran lokal seperti yang terjadi di Kota Tasikmalaya pada saat pemilu legislatif 2014, maupun nanti pada pemilukada yang akan digelar pada tahun 2017 mendatang, sekarang ini partisipasi dan warga nahdhiyin pun sedang mengalami pergeseran politik. Semula pada pemilu sebelumnya aktor politik yang biasanya dilakukan oleh politisi, pengusaha, akademisi, masyarakat umum dan profesional. Sekarang ada perubahan yakni ada tambahan aktor politik dan adanya aktor lain yaitu; Kyai, Ulama, Ustadz, *Ajengan* (sunda) yaitu guru ngaji. Mereka adalah sosok yang selama ini dikenal hidup di tengah-tengah santri dan masyarakat local disekitar pesantren maupun di Kota Tasikmalaya khususnya. Sebagian Ulama/Ustadz/Ajengan NU, mulai merambah wilayah politik partisan lokal, dengan peran sebagai katalisator dan mediator pada proses pemilu yang intinya memberikan dukungan kepada kandidat legislatif dan calon pemimpin eksekutif untuk memberi restu.

Namun demikian, memang tidak seluruhnya kyai mengambil peran dan aktif dalam proses politik di tingkat lokal, masih banyak para kyai di Kota Tasikmalaya ini tetap konsisten menjalankan perannya sebagai pimpinan pondok pesantren, sebagai guru bagi santrinya dalam mengajarkan ilmu-ilmu agama, menjadi pengayom dan pelindung para santri dan warga masyarakat di sekitarnya, memberikan da'wah bagi masyarakat, menjadi suri tauladan bagi warga masyarakat dan kyai sebagai pewaris nabi.

Pada sebagian pondok pesantren NU, perilaku politik kyai NU mempunyai pengaruh pada sikap politik masyarakat dan santrinya, sehingga pondok pesantren tertentu seringkali didatangi oleh para kandidat kepala daerah dan kandidat legislator. Kehadiran para kandidat kepala daerah atau kandidat legislatif, disamping untuk melakukan kunjungan silaturahmi, ke para kyai di Pondok Pesantren tertentu, juga sekaligus meminta restu dari para kyai. Permintaan restu ini ditafsirkan sebagai permintaan dukungan suara dari kyai, karena kyai memiliki aset calon pemilih yang mudah dipengaruhi.

H. Asep Marbu yang merupakan pimpinan ponpes Al Munawar Al Jarnauziyah, di Pasir Bokor Mangkubumi Kota Tasikmalaya menuturkan, bahwa untuk saat ini kalau boleh jujur pengaruh kyai di Kota Tasikmalaya, dalam mengikuti percaturan politik saat ini sudah terpecah-pecah, dan mereka tidak istiqomah dalam memposisikan dirinya sebagai kyai. Padahal sebagai kyai seharusnya harus berposisi netral dan harus tahu arti tanggungjawab sebagai pemimpin ponpes dan guru. Namun saya tegaskan untuk saat ini figuritas kyai di Kota Tasikmalaya dalam hal ini sebagai salah satu figur demi kepentingan politik memang tidak banyak. Bahkan beberapa kyai yang pernah mendukung salah satu elit politik, dan mengerti dampaknya ketika mendukung salah satu calon elit politik. Para kyai tidak tertarik lagi dalam hal dukung mendukung salah satu calon elit politik. Mereka berupaya untuk netral, namun saya tidak memungkiri bahwa masih ada calon elit politik yang masih memanfaatkan kyai dan ponpes sebagai kantung suara bagi kepentingan calon elit politik.

Sementara bagi kyai yang hanya memberikan nasehat dan dukungan moril saja alias memposisikan sebagai kyai yang netral terhadap politik, menurut H.Asep Marbu, kadang-kadang dijadikan alasan bagi calon elit politik sebagai alat dukungan. Bahkan petuah dan nasehat mereka dijadikan alasan untuk label politik atau merk politik bahwa kyai tersebut mendukung golongan partai dari pendukung ini. Padahal disatu sisi kyai sebagai tetua atau sebagai guru ingin menyelesaikan permasalahan politik yang sedang berkembang saat ini. Salah satu contoh adalah pertikaian PPP, namun perpecahan ini dianggap tidak selesai karena masing-masing pengurus masih saja mengklaim dan *keukeuh* terhadap keegoisan mereka bahwa pengurusnya lah yang paling benar. Oleh karena itu saya katakan figuritas kyai yang benar-benar berpengaruh untuk menyatukan PPP di Kota Tasikmalaya khususnya belum ada, tapi saya yakin dengan adanya nasehat dan kesadaran diri dari masing-masing pengurus parpol setidaknya mereka menyelesaikan permasalahan ini dengan kedamaian demi menjaga solidaritas partai.

Respon ulama menjelang Pemilu legislatif 2014 sama halnya dengan respon ulama pada Pemilu-pemilu sebelumnya, bahwa dalam setiap konstelasi politik dalam tataran idealitas para ulama ingin memperjuangkan nilai-nilai religius. Tetapi karena berbagai dinamika dan kepentingan-kepentingan politik tertentu, tidak ada batasan yang jelas antara perjuangan mengakomodasikan nilai-nilai religius dengan perjuangan mendapatkan kekuasaan.

Ramdhani Mun'im sebagai anggota DPRD fraksi PPP Kota Tasikmalaya, perpecahan demi kisruh politik memang sampai saat ini belum reda, mereka masih saling mengklaim yang paling legal memimpin PPP, Rommy maupun Djan Faridz. Akan tetapi setelah muncul keputusan pemerintah bahwa kubu Rommy lah yang memenangkan gugatan politik yang dibawa ke ranah hukum. Sesuai dengan UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Kementrian Hukum dan HAM diperintahkan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya kekosongan hukum demi kepentingan umum. Artinya, Kemenkumham mencabut pengesahan DPP PPP hasil Muktamar VIII Surabaya tahun 2014, pada saat bersamaan DPP PPP hasil Muktamar VIII Jakarta tidak dapat memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Maka terjadi kekosongan hukum bagi PPP. Realitasnya, PPP mempunyai 1.300 wakil rakyat dari tingkat pusat, provinsi, sampai kabupaten/kota.

“Kalau tidak ada DPP PPP yang sah, lalu kemana sebanyak 1.300 orang wakil rakyat itu menginduk?, termasuk saya sebagai anggota DPRD Kota Tasikmalaya?. Pertanyaan mendasar apakah wakil rakyat itu sah sebagai wakil rakyat? Jika tidak ada parpol yang memayungi mereka, karena seluruh wakil rakyat harus berasal dari parpol. Di atas itu, masih ada pertanyaan yang lebih penting lagi, jika keberadaan 1.300 itu dipertanyakan keabsahannya, maka bagaimana nasib Perda atau UU yang disahkan DPRD atau DPR RI yang melibatkan 1.300 wakil rakyat itu? Apakah sah ?, ungkapannya dengan penyampaian yang tegas.

Jika kekosongan hukum terus terjadi, bukan tidak mungkin Kemenkumham akan digugat sebagai pihak yang tidak memberikan kepastian hukum, dan bahkan memicu terjadinya kekosongan hukum, bahkan konflik semakin meluas dan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, ketika nanti ada parpol-parpol lain yang sama kesiruhannya dengan PPP saat ini. Jika ini terjadi jelas Kemenkumham melanggar UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Karena alasan itu, menurut Rhamdhani, dapat dipahami akhirnya Kemenkumham mengesahkan kembali DPP PPP hasil Mukmtar VII Bandung tahun 2011 lalu. Dengan begitu, kepastian hukum bagi 1.300 wakil rakyat tercipta, dan pada saat bersamaan mencegah kekosongan hukum bagi wakil rakyat itu. Walau begitu, hasil putusan ini bagi DPP PPP hasil Mukmtar VII Bandung Tahun 2011, tidak bisa bersenang-senang begitu saja. ada tanggungjawab memberikan tugas demi kemajuan PPP sendiri. Terutama dalam rangka keutuhan dan kesejahteraan NKRI. Dalam konteks inilah Keputusan Ketiga Kemenkumham harus dipahami. Keputusan itu berbunyi : "Kepengurusan yang disahkan kembali dengan Surat Keputusan ini mempunyai kewenangan untuk membentuk panitia yang akan menyelenggarakan Mukmtar/Mukmtar Luar Biasa sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PPP yang demokratis, rekonsiliatif, dan berkeadilan.

Demokrasi disini jelas bahwa harus melibatkan seluruh elemen PPP seperti yang diatur dalam AD/ART PPP, serta memberikan ruang yang besar kepada mereka untuk mengeluarkan pendapat dan menentukan pilihan politiknya. Rekonsiliatif artinya muktamar/muktamar luar biasa yang diadakan harus mempertemukan kader-kader PPP yang berbeda pendapat untuk mendapatkan solusi yang bersifat *win-win solution*. Berkeadilan artinya muktamar/muktamar luar biasa memberikan kesempatan yang sama kepada setiap kader PPP untuk ikut dalam (jika dipilih secara langsung), atau untuk melakukan pemilihan ketua/anggota formatur (jika menggunakan system pemilihan ketua umum melalui formatur).

Di lain pihak, K.H. Sofyan Tsaury pimpinan cabang Ponpes Al Munawar Al Jarnauziyah, menuturkan berbicara mengenai perpecahan PPP yang sedang terjadi saat ini, memang harus dikembalikan lagi terhadap asas komitmen dan konsistensi pengurus PPP seluruhnya. Untuk hal apa mereka bepolitik dan untuk apa mereka berjuang melalui PPP, terutama mereka bepolitik yakni demi kepentingan kader dan partisipan PPP yang sudah komitmen sejak awal mendukung PPP. Kesatuan umat PPP yang paling diutamakan, bukan kepentingan elit PPP di tingkat pusat. Karena kepentingan umat di daerah yang paling penting, ketimbang memikirkan kepentingan golongan dan elit semata di tingkat pusat. hingga kini beberapa kali para kader PPP sering bertemu beliau untuk meminta saran dan masukan terkait sosial, agama dan politik. Akan tetapi, K.H. Sofyan mengaku posisi saya pribadi netral, karena saat ini sulit membedakan mana pendukung siapa, dan kepentingannya untuk apa. Namun beliau menegaskan untuk saat ini tokoh-tokoh kyai yang posisinya netral memang banyak, hanya saja kadang-kadang saran dan tokoh kyai NU misalnya banyak juga tidak digubris oleh kalangan elit politik. Sehingga anda bisa lihat kisruh politik PPP ini hanya kepentingan beberapa orang saja. Tapi dia sangat yakin dengan adanya rasa kesadaran, tanggungjawab dan pentingnya *islah* demi kekuatan PPP ke depan, PPP akan kembali bersatu demi kepentingan umat dan kepentingan politik bangsa Indonesia.

Namun K.H.Sofyan menyarankan untuk saat ini kalangan kyai ataupun sesepuh NU dan sesepuh Ponpes sebaiknya harus berupaya netral dan tidak memihak siapapun. Karena kehancuran tokoh-tokoh kyai ini karena adanya fitnah politik dan pandangan berbeda dari elit partai politik. Dengan mengupayakan agar tetap netral, sehingga tokoh-tokoh kyai ini bisa dijadikan panutan tidak hanya oleh kader-kader PPP, tapi bagi masyarakat umum yang masih mempercayai bahwa kyai sebagai pemimpin yang mampu sebagai perantara atau tokoh yang jadi panutan umat saat ini.

Majelis Syariah PPP dalam Mengupayakan Islah, Tokoh Ulama Secara Kolektif Berupaya Menyatukan PPP

Pada pasal 17 ayat (1) anggaran dasar PPP Hasil muktamar VII Bandung Tahun 2011 menjelaskan bahwa (1) Majelis Syariah adalah institusi yang terdiri atas para ulama yang bekerja secara kolektif, bertugas, dan berwenang memberikan fatwa keagamaan serta memberikan nasihat/arahan tentang persoalan kebangsaan dan kenegaraan berdasarkan ajaran agama kepada Pengurus Harian DPP, (2) Fatwa agama sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat mengikat bagi seluruh anggota, pengurus, dan aparat PPP. Berdasarkan ketentuan itu, Majelis Syariah secara kolektif mempunyai dua macam kewenangan, yaitu (1) mengeluarkan fatwa keagamaan yang bersifat mengikat dan (2) memberikan nasihat/arahan, yang tidak mengikat, namun harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh DPP PPP.

Selama konflik, secara institusional, Majelis Syariah tidak pernah mengeluarkan fatwa, dalam artian dihasilkan oleh Majelis Syariah secara kolektif. Namun, terkait dengan konflik antara kubu Muktamar Surabaya dan Muktamar Jakarta. K.H. Maimoen Zubair memberikan kemungkinan bagi dilaksanakannya adanya perdamaian bagi kelompok yang berkonflik (*islah*), dengan melaksanakan Muktamar kembali, dengan catatan (a) Muktamar itu dipelopori oleh kedua belah pihak, dan (b) Muktamar itu sesuai dengan AD/ART PPP.

Harapan dari K.H. Maimoen Zubair agar Kemenkumham untuk mengesahkan DPP PPP hasil Mukatamar VIII Jakarta Tahun 2014, tidak dapat dipenuhi pemerintah, karena mereka tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, seperti absensi peserta Muktamar, untuk melihat kesesuaian antara pelaksana Muktamar VII Jakarta dengan AD/ART PPP. Sesuai permintaan dari K.H. Maimoen Zubair, pemerintah harus netral, dengan tidak memihak kepada salah satu kubu, mendorong kedua kubu melaksanakan Muktamar, sehingga persoalan internal PPP dapat diselesaikan oleh kader-kader PPP.

Ramdhani menegaskan hal ini jelas dari pandangan "sesepuh" PPP ataupun dari kyai PPP sudah berupaya keras untuk mendamaikan kelompok-kelompok yang berkonflik, dengan berbagai cara dilakukan. Namun kembali lagi permasalahan islah ini harus menjadi pegangan bagi semua kader PPP agar tidak mementingkan kelompok dan pribadi saja, ini harus berpegang dari visi dan misi PPP, dan kekuatan PPP di Indonesia agar tidak lemah secara politik.

Dari Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Drs H. Zarkasih Nur, Mantan Menteri Koperasi ini sudah menjalin silaturahmi dengan fungsionaris dari hasil Muktamar Jakarta dan Surabaya. Persoalan PPP harus diselesaikan melalui jalur politis, yakni melalui Muktamar untuk Islah. Jalan keluarnya gampang sekali. Kalau seluruh fungsionaris PPP melaksanakan Khittah dan Program Perjuangan PPP, maka semua persoalan akan mudah diselesaikan. Di dalam Khittah, kita mempunyai ideologi Islam. "Kalau kita mengembalikan segala macam perbedaan pada ajaran Islam, maka persoalan akan mudah. Di dalam Islam kita diajarkan *wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin*, sehingga fungsionaris PPP harus mempunyai menyebarkan kasih sayang untuk alam semesta. Untuk itu, fungsionaris PPP harus mempunyai *akhlak karimah*."

Penutup

Konflik internal PPP di Kota Tasikmalaya, pada dasarnya kondisinya hampir serupa dengan kondisi internal PPP di Kabupaten Tasikmalaya, yang merupakan “saudara kandung” pemerintahan Kota Tasikmalaya. Kondisi permasalahan bukan masalah yang parsial, akan tetapi merupakan kondisi konflik secara nasional dari PPP itu sendiri, dan merembet ke pengurus PPP di tingkat DPD dan DPC. Kepentingan politik PPP terpecah keputusannya ketika mendukung Bupati dan Wakil Bupati Uu dan Ade. Kondisi politik Pemilukada yang diselenggarakan pada 9 Desember 2015, mengalami ketidakpastian penyelenggaraan pemilukada. Namun menariknya PPP yang notabene parpol berkuasa di DPRD Kabupaten Tasikmalaya tidak setuju dan tidak mendukung Uu menjadi Bupati Kabupaten Tasikmalaya, bahkan ingin menggagalkan penyelenggaraan pemilukada diberlangsungkan pada 2015 lalu, alasannya karena aturan dan mekanisme peraturan perundangan tidak boleh hanya mengajukan calon tunggal. Namun setelah berlarut-larut hingga tingkat Mahkamah Konstitusi, akhirnya MK memutuskan penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Tasikmalaya tetap diberlangsungkan.

Kekuatan PPP di Tasikmalaya pada umumnya adalah pemilih kultural yang masih mapan, dengan dasar ke Islamannya, ditambah alasan lain bahwa keputusan tidak mendukung adalah hasil *istikharah* dan saran dari para *ulama* Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. PPP secara kultural telah melekat menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penentuan sikap politik masyarakat Kabupaten maupun di Kota Tasikmalaya, karena karakter masyarakat Kabupaten dan Kota Tasikmalaya yang Islami dan kultural masih dominan, dan cenderung relevan dengan azas Islam yang dimiliki oleh PPP, selain itu lambang Ka'bah yang dimiliki oleh PPP mampu mempengaruhi sikap politik masyarakat dan menentukan pilihannya pada PPP, sehingga menjadikan perolehan suara PPP pada pemilu legislatif di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya selalu mendapatkan suara tertinggi.

Bagi masyarakat Kabupaten maupun Kota Tasikmalaya memilih PPP ataupun memilih Kader PPP merupakan budaya yang sudah melekat bagi mereka yang beragama Islam. Bangunan politik tersebut telah dibangun semenjak era Orde Baru, karena pada masa tersebut seluruh umat Islam bergabung di dalam naungan PPP, sehingga memilih PPP merupakan suatu kewajiban karena merupakan bagian dari implementasi ajaran Islam. Tetapi dalam konteks Pemilukada, memilih seorang pemimpin juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga dengan adanya persepsi tersebut masyarakat dapat menanggalkan keterikatan terhadap lembaga menjadi keterikatan yang lebih substansial, yaitu memilih dan memiliki seorang pemimpin.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis membahas mengenai hubungan kyai dan pesantren, yang juga berhubungan dengan kisruh perpolitikan PPP di Indonesia, bagaimana kyai mampu mengatasi permasalahan di Kota Tasikmalaya. Namun setidaknya kita akan membahas sedikit hubungan tersebut, agar kajian penelitian ini bisa komprehensif. Kyai dan tokoh pesantren sering kali menjadi lahan sasaran para politisi dalam membangun basis dukungan politik. Pada setiap pemilu maka suara kyai dan santri selalu diperebutkan bukan saja oleh partai-partai politik berbasis Islam saja melainkan juga partai-partai politik berbasis nasionalis. Dalam upaya meraup simpati dan dukungan dari kalangan Islam yang menjadi pengikut setia kyai, banyak partai politik yang menempatkan kyai dan tokoh pesantren pada jajaran pengurus partai dengan harapan dapat menjadi *vote getter* dalam pemilu.

Pengaruh kyai di Kota Tasikmalaya, dalam mengikuti percaturan politik saat ini sudah terpecah-pecah, dan mereka tidak istiqomah dalam memposisikan dirinya sebagai kyai. Padahal sebagai kyai seharusnya harus berposisi netral dan harus tahu arti tanggungjawab sebagai pemimpin ponpes dan guru. Namun saya tegaskan untuk saat ini figuritas kyai di Kota Tasikmalaya dalam hal ini sebagai salah satu figur demi kepentingan politik memang tidak banyak. Bahkan beberapa kyai yang pernah mendukung salah satu elit politik, dan mengerti dampaknya ketika mendukung salah satu calon elit politik. Para kyai tidak tertarik lagi dalam hal dukung mendukung salah satu calon elit politik. Mereka berupaya untuk netral, namun saya tidak memungkiri bahwa masih ada calon elit politik yang masih memanfaatkan kyai dan ponpes sebagai kantung suara bagi kepentingan calon elit politik.

Sementara bagi kyai yang hanya memberikan nasehat dan dukungan moril saja alias memposisikan sebagai kyai yang netral terhadap politik, menurut H.Asep Marbu, kadang-kadang dijadikan alasan bagi calon elit politik sebagai alat dukungan. Bahkan petuah dan nasehat mereka dijadikan alasan untuk label politik atau merk politik bahwa kyai tersebut mendukung golongan partai dari pendukung ini. Padahal disatu sisi kyai sebagai tetua atau sebagai guru ingin menyelesaikan permasalahan politik yang sedang berkembang saat ini. Salah satu contoh adalah pertikaian PPP, namun perpecahan ini dianggap tidak selesai karena masing-masing pengurus masih saja mengklaim dan *keukeuh* terhadap keegoisan mereka bahwa pengurusnya lah yang paling benar. Oleh karena itu saya katakan figuritas kyai yang benar-benar berpengaruh untuk menyatukan PPP di Kota Tasikmalaya khususnya belum ada, tapi saya yakin dengan adanya nasehat dan kesadaran diri dari masing-masing pengurus parpol setidaknya mereka menyelesaikan permasalahan ini dengan kedamaian demi menjaga solidaritas partai.

Perpecahan PPP yang sedang terjadi saat ini, memang harus dikembalikan lagi terhadap asas komitmen dan konsistenan pengurus PPP seluruhnya. Untuk hal apa mereka bopolitik dan untuk apa mereka berjuang melalui PPP, terutama mereka bopolitik yakni demi kepentingan kader dan partisipan PPP yang sudah komitmen sejak awal mendukung PPP. Kesatuan umat PPP yang paling diutamakan, bukan kepentingan elit PPP di tingkat pusat. Karena kepentingan umat di daerah yang paling penting, ketimbang memikirkan kepentingan golongan dan elit semata di tingkat pusat.

Untuk saat ini kalangan kyai ataupun sesepuh NU dan sesepuh Ponpes sebaiknya harus berupaya netral dan tidak memihak siapapun. Karena kehancuran tokoh-tokoh kyai ini karena adanya fitnah politik dan pandangan berbeda dari elit partai politik. Dengan mengupayakan agar tetap netral, sehingga tokoh-tokoh kyai ini bisa dijadikan panutan tidak hanya oleh kader-kader PPP, tapi bagi masyarakat umum yang masih mempercayai bahwa kyai sebagai pemimpin yang mampu sebagai perantara atau tokoh yang jadi panutan umat saat ini.

Daftar Referensi

- Budiardjo, Miriam. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Duverger, Maurice.1981. *Partai Politik Dan Kelompok Penekan*. Alih Bahasa Laila Hasyim. Jakarta
- Gaffar, Afan, 1999. *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi* " Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar.
- Gatara dan Said. 2007. *Sosiologi Politik, Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*". Bandung : Penerbit Pustaka Setia
- J. Prihatmoko Moesafa, Joko, 2008. *Menang Pemilu di tengah Oligarki Partai*", Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.
- _____, 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*", Yogyakarta : Penerbit :Pustaka Pelajar.
- _____, 2008. *Mendemokrasikan Pemilu dari system sampai elemen teknis*", Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar 2008

SPEKTRUM

Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional
Volume 13 No. 1 Januari 2016

- Kusmayadi, Edi *"Realitas dan Dinamika Politik Lokal"* Penerbit DEEPUBLISH Yogyakarta, Tahun 2015.
- Moleong, Lexy J., 2004. *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, Edisi Revisi, Bandung Penerbit, Remaja Rosdakarya 2004.
- Muzadi, Hasyim, 1999. *"NU di Tengah Agenda Persoalan Bangsa"* Logo, Jakarta.
- Mukti, Muslim. 2012. *"Teori-Teori Politik"* Bandung : Penerbit Pustaka Setia
- Mas'ood, Mochtar dan Colin Mac Andrews. 2000. *"Perbandingan Sistem Politik"* Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Putra, Fadillah. 2003. *"Partai Politik dan Kebijakan Publik"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *"Memahami Ilmu Politik"* Jakarta, Grasindo Gramedia Widiasarana, 2010
- Toha, Miftah. 1993. *"Perilaku Organisasi"*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Widayatun, Tri Rusmi. 1999. *"Ilmu Perilaku"*. Jakarta: Sagung Seto
- Andrias, Ali dan Wiwi Widiastuti. 2011. *"Persepsi Partai Politik Terhadap Ketentuan Kuota 30% Perempuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Deskripsi Tentang Persepsi PKB, Golkar, PKS, PPP, dan PDIP di Kabupaten Tasikmalaya)*. Dipublikasikan pada Jurnal Aliansi Politik dan Pemerintahan. Vol 3. Nomor 1 Tahun 2011.
- _____. 2012. *"Partai Politik dan Demokrasi Prosedural Indonesia (Minimnya Peran dan Fungsi Parpol dalam Mengimplementasikan Sistem Politik yang Demokratis di Indonesia)"*. Di Prosiding Seminar Nasional Mewujudkan Demokrasi yang Mensejahterakan di Indonesia FISIP Unsoed XXVI. ISBN : 978-979-9204-51-6
- Satori, Akhmad dan M. Ali Andrias. 2012. *"Pergeseran Perilaku Politik Islam Tradisional Pasca Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kota Tasikmalaya"*. Dipublikasikan pada Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan. Vol 1. Nomor 1 Tahun 2012.
- Satori, Akhmad dan Subhan Agung. 2011. *"Kepemimpinan Politik Masyarakat Adat (Studi Model Pembagian Peran dan Relasi Kuasa Pemimpin Adat di Kampung Naga, Neglasari, Salawu, Tasikmalaya)"*. Dipublikasikan pada Swara Politika Jurnal Politik dan Pembangunan. Vol 12, Nomor 2 Oktober 2011

ISU ISLAMOPHOBIA DI AUSTRALIA PADA MASA KEPEMIMPINAN PM TONY ABBOTT**Anna Yulia Hartati**

Staf Pengajar Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Wahid Hasyim Semarang

Ahmad Hanafi Ash Shiddiq

Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Wahid Hasyim Semarang

Abstraksi

Artikel ini membahas peran Pemerintah Australia pada masa kepemimpinan PM Tony Abbott dalam mengatasi Isu Islamophobia. Peristiwa Serangan 9/11 yang telah melibatkan pihak kepolisian, militer, aspek politik, hukum, dan ideologi dalam melawan terorisme, khususnya terorisme Islam, menjadikan Islam momok yang menakutkan. Apalagi dengan terjadinya peristiwa-peristiwa yang melibatkan identitas Islam di dalam aksinya. Hal ini memberikan kontribusi yang besar dalam memunculkan kembali Islamophobia di Australia. Di Australia sendiri, isu Islamophobia juga meningkat dengan pesat. Pemerintah Australia mulai melakukan kegiatan monitoring yang sangat ketat terhadap kelompok-kelompok yang berpotensi memberikan ancaman terhadap negara tersebut, khususnya kelompok/komunitas muslim yang tinggal di sana. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi komunitas muslim di negara tersebut, karena tidak bisa bebas dalam melakukan kegiatan mereka sehari-hari. Sebagai negara demokrasi dan negara penjunjung Hak Asasi Manusia kebijakan pemerintah terkait Isu Islamophobia menjadi taruhannya. Walaupun pemerintah Australia melancarkan kebijakan-kebijakan yang sangat ketat dalam rangka membatasi pergerakan kelompok teroris di negara tersebut, akan tetapi secara eksplisit pemerintah Australia tidak memberlakukan kebijakan yang diskriminatif terhadap umat Islam di negaranya. Banyaknya komentar negatif yang keluar dari mulut pejabat Australia yang ditujukan kepada umat Muslim, tidak berarti pemerintah Australia menerapkan kebijakan-kebijakan publik yang diskriminatif terhadap umat Muslim.

Kata Kunci: *Islamophobia, peran pemerintah, kepemimpinan Tony Abbott*

Pendahuluan

Tragedi 9/11 merupakan serangkaian serangan bunuh diri yang ditujukan kepada Negara Amerika Serikat ke empat tempat yang diduga dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda pada Hari Selasa tanggal 11 September 2001. Empat tempat itu adalah Gedung Kembar WTC, Gedung Pentagon, Gedung Putih (White House), Gedung Kapital Amerika Serikat. Dengan adanya empat serangan ini Presiden George W. Bush Presiden Amerika Serikat kala itu menyerukan kepada dunia internasional bahwa dunia sedang dalam keadaan teror. Amerika Serikat menyatakan akan berperang melawan terorisme serta mengajak negara-negara di seluruh dunia agar menabuh genderang perang atau mengikuti jejak Amerika Serikat untuk berperang juga terhadap terorisme. Dalam pernyataan Presiden George W. Bush, bahwa teroris yang akan dia perangi adalah teroris Islam yang berada di kawasan Timur Tengah.

Dengan pernyataan dari Presiden Amerika Serikat banyak dari masyarakat internasional percaya bahwa Islam adalah agama yang buruk. Terbukti ketika tidak berselang lama pasca peristiwa 9/11 banyak masyarakat yang Bergama Islam di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat khususnya mendapatkan perlakuan dan tindakan yang tidak baik. Mulai dari dicela, dikucilkan, dilecehkan dan bentuk-bentuk tindakan tercela verbal maupun non verbal lainnya.

Fenomena sosial inilah yang kemudian memunculkan adanya fenomena Islamophobia. Islamophobia ini muncul di negara-negara yang mana warga Muslim (sebutan orang yang memeluk agama Islam) menjadi minoritas di negara-negara tersebut. Jika dilihat dari sejarahnya, istilah Islamophobia muncul pertama kali bukan karena peristiwa 9/11. Istilah Islamophobia ini muncul pada tahun 1990an, tapi pernyataan resmi tentang Islamophobia pertama kali dikemukakan oleh *The Runnymede Trust* dalam jurnal yang berjudul *Islamophobia a challenge for us all* pada tahun 1997 di London, Inggris. Adalah jurnal yang isinya rangkuman tentang Islamophobia. Di jurnal tersebut Islamophobia adalah: "*The dread, hatred and hostility towards Islam and Muslims perpetrated by a series of closed views that imply and attribute negative and derogatory stereotypes and beliefs to Muslims.*"¹

The Runnymede Trust menyatakan bahwa Islamophobia adalah merupakan bentuk dari perilaku ketakutan, kebencian dan perlawanan terhadap Islam dan Muslim dari sudut pandang yang sempit dalam bentuk respon dan pernyataan yang negatif tentang apapun yang berhubungan dengan Muslim. Pernyataan yang dibuat oleh *The Runnymede Trust* ini dibuat dari beberapa penelitian dan diskusi yang melibatkan peserta diskusi dari pemuda Muslim antara umur 18-24 dengan wali mereka di Komunitas Muslim yang berada di London, Inggris. Sehingga dari penelitian dan diskusi langsung tersebut dapat disimpulkan tentang arti dari Islamophobia yang tengah terjadi di masyarakat Inggris khususnya di Kota London kala itu. Dalam jurnal tersebut juga dikemukakan bentuk sudut pandang tertutup dan terbuka terhadap Muslim dari masyarakat London. Jelas terjadi perbedaan yang mencolok di antara kedua sudut pandang tersebut. Tapi dari jurnal tersebut itulah pemerintahan Inggris dapat merancang dan memprediksi bentuk aksi apa yang dilakukan terhadap fenomena Islamophobia kala itu.

Dengan adanya peristiwa 9/11 muncul kembali istilah Islamophobia dan menjalar ke seluruh dunia. Yang disayangkan adalah yang masyarakat internasional lihat dari Islamophobia hanyalah kebencian dan ketakutan terhadap Islam dan Muslim tanpa memperhatikan ras dan suku bangsa. Sehingga Islam dan Muslim di seluruh dunia menjadi sebuah ancaman internasional yang ambigu yang mana oleh tercipta dari pemikiran masyarakat internasional itu sendiri. Mulai dari ranah politik, sosial, pendidikan bahkan sampai lapangan pekerjaan pun merasakan Islamophobia dari level yang elit sampai level paling bawah. Segala aspek kehidupan dari manusia terkena dampak dari Islamophobia. Dengan latar belakang 9/11 seperti yang disebutkan sebelumnya, pelaku dari 9/11 disinyalir adalah Kelompok Al-Qaeda. Yang mana kelompok ini dibentuk oleh Osama bin Laden. Muncul pertama kali pada tahun 1984 di Afganistan dalam memerangi pemerintahan Afganistan yang didukung oleh Uni Soviet. Seperti yang telah diketahui tahun tersebut masih terjadi Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet dan Afganistan menjadi korban dari konflik dua negara tersebut. Al-Qaeda kebanyakan beranggotakan seorang keturunan Arab. Dari sinilah Islamophobia berkembang. Pada tahun 2004, seorang jurnalis eropa menulis artikel bahwa "*Arabs are threatening our civilian populations with chemical and biological weapons. They are promising to let suicide bombers loose in Western and American cities. They are trying to terrorize us, disrupt our lives*"².

Dari pernyataan jurnalis eropa tersebut dapat disimpulkan bahwa Islamophobia berubah makna menjadi sebuah bentuk pernyataan rasis terhadap obyek yang mana obyek tersebut merupakan obyek yang dibenci oleh subyek berdasarkan agama, budaya dan latar belakang ras. Sehingga Islamophobia menjadi sebuah bentuk baru selain bentuk ketakutan akan Islam dan Muslim, tapi secara bersamaan juga mempunyai makna ganda yaitu menyinggung rasisme.

¹ John L. Esposito and Ibrahim Kalin, *Islamophobia: The Challenge of Pluralism in the 21st Century*, Oxford University Press, 2011, hlm.8.

² Ibid, hlm.11.

Keterkaitan Islamophobia dengan Australia sudah berlangsung sejak lama. Bermula pada tahun 1802an ketika banyak Muslim dari Negara Lebanon mencari kehidupan yang lebih baik di Australia. Mereka kemudian menjadi nelayan teripang sebagai lahan penghidupan³. Bahkan samapai dengan tahun 1947, penduduk Muslim di Australia hanya menyumbang 0,04 % dari total penduduk Australia kala itu⁴. Akhirnya pada tahun 2001, penduduk Australia kala itu sebanyak 200,000an didapati dapat berbahasa arab. Kebanyakan asal penduduk tersebut dari Negara Lebanon. Tapi sebagian ada yang berasal dari Negara Mesir, Iraq dan Suriah⁵. Kebencian masyarakat Australia terhadap Islam dan Muslim terjadi ketika adanya Perang Teluk di Iraq dan Iran pada tahun 1990. Ada beberapa masyarakat Australia secara terbuka menyatakan ketidak sukaannya terhadap masyarakat Arab Muslim akibat ketidak sukaan mereka terhadap Perang Teluk. Bahkan mereka, beberapa dari masyarakat Australia akan mengancam akan membakar masjid tiap kali ada tentara Australia yang mati di medan Perang Teluk⁶. Dari sini bisa dilihat bahwa keterkaitan Islam dan Australia sudah berlangsung sejak lama. Kemudian berlanjut pada tahun 1990an. Di daerah padat penduduk seperti Kota Sydney dan Kota Melbourne yang banyak terdapat banyak warga keturunan imigran dan merupakan daerah yang mempunyai banyak ragam budaya dan etnis, telah terjadi tindakan criminal dengan kata kunci "perang gang"⁷. Kemudian keadaan menjadi lebih parah lagi ketika pada tahun 1998 telah terjadi tindakan kriminal dengan berbuah korban penusukan bernama Edward Lee di kawasan padat penduduk imigran dari Lebanon⁸. Kemudian pihak kepolisian setempat secara cepat mencari sekelompok remaja berparas Arab. Sehingga banyak orang dengan perawakan Timur Tengah diberhentikan dan diperiksa oleh pihak kepolisian⁹. Situasi semakin tidak kondusif bagi para warga imigran dengan diperburuk dengan media-media yang membuat keadaan semakin keruh. Bahkan mengecap para komunitas Lebanon ini sebagai setan yang berkeliaran di lingkungan jalan kota¹⁰. Keadaan semakin tidak kondusif ketika terjadi peristiwa yang menyangkut para imigran Lebanon. Ini terjadi pada Bulan Agustus 2000 sampai Bulan Agustus 2001. Peristiwa ini menyangkut Isu Pemerksaan. Dan sudah dapat diduga, peristiwa ini menjadi bahan pokok media. Pihak kepolisian kepada pihak media, bahwa peristiwa pemerksaan ini menyangkut motif etnis dan ras. Sehingga pihak kepolisian menyarankan agar hati-hati dalam membuat sebuah berita. Karena peristiwa ini sangat sensitif. Tapi media rupanya tidak terlalu mengindahkan saran dari pihak kepolisian. Media semakin membesar besarkan peristiwa ini. Sehingga terjadi bentuk hiperbola keadaan dan semakin memperuncing masalah yang sudah ada. Kemudian di tahun yang sama yaitu pada tahun 2001, telah terjadi gelombang besar-besaran imigran dari Afganistan datang ke Australia. Ini merujuk kepada peristiwa Krisis Tampa. Yaitu krisis yang terjadi di perairan Australia antara pemerintahan Kapal MV Tampa dengan Pasukan Bersenjata Australia. Inti dari Krisis ini adalah penolakan Perdana Menteri John Howard untuk menerima para imigran yang berada di Kapal MV Tampa. Meskipun pada akhirnya Pemerintahan Australia menerima para imigran ini dengan menampung di pulau Nauru dengan dipindahkan melalui Kapal Perang AL Australia HMAS Manoora.

³ Nahid A. Kabir, *Muslims in Australia: Immigration, Race Relations and Cultural History*, London: Kegan Paul, 2004, hlm.5.

⁴ Nahid A. Kabir, *op. cit.* hlm.5-6.

⁵ Scott Poynting and Victoria Mason, *Journal of Sociology - The Resistible Rise of Islamophobia: Anti-Muslim Racism in The UK and Australia Before 11 September 2001*, Sage, 2010, hlm.67.

⁶ Ghassan Hage, *Racism, Multiculturalism and the Gulf War*, Arena 96, 1991, hlm.11.

⁷ Scott Poynting and Victoria Mason, *op. cit.* hlm.75.

⁸ J. Collins, et al, *Kebabs, Kids, Cops and Crime: Youth, Ethnicity and Crime*, Sydney: Pluto Press, 2000.

⁹ Scott Poynting, *When "Zero Tolerance" Looks Like Racial Intolerance: "Lebanese Youth Gangs", Discrimination and Resistance*, Current Issues in Criminal Justice 11(1): 1999, hlm.74-8.

¹⁰ Scott Poynting and Victoria Mason, *op. cit.* hlm.76.

Tinjauan Teori

Sebenarnya teori konstruktivisme atau sosial konstruktivisme belum bisa dikatakan sebagai sebuah teori. Lebih tepat jika disebut sebagai sebuah perspektif atau pendekatan¹¹. Mengapa demikian? Karena konstruktivisme masih belum mempunyai asumsi hipotesis yang jelas dan ajeg serta sifatnya yang masih berubah-ubah. Teori konstruktivisme bisa dikatakan teori yang baru dalam dunia hubungan internasional. Teori ini muncul pada tahun 1990an sampai awal 2000an¹². Teori ini muncul ketika terjadi perdebatan besar studi HI yang ketiga yaitu antara neoliberalisme dan neorealisme. Tokoh dalam teori konstruktivisme ini adalah Alexander Wendt. Alexander Wendt terkenal dengan tulisannya "*anarchy is what states make of it*" dalam jurnal *International Organization* pada tahun 1992¹³. Wendt berkata bahwa konstruktivisme adalah sebuah jembatan diantara neoliberalisme dan neorealisme. Wendt mengatakan dalam dua teori tersebut ada tiga kesamaan¹⁴, 1). Negara-negara merupakan aktor dominan dalam dunia hubungan internasional, 2). Rasionalisme adalah sebuah disposisi teoritis dijelaskan melalui bagaimana rasionalisme menjelaskan tentang perilaku negara-negara internasional, 3). Dan keamanan merupakan istilah yang disebut sebagai "*self-interested*". *Self-interested* adalah sebuah istilah didalam neorealisme yang bisa disebut jug dengan istilah *self-help*. Dalam penuturannya pada neorealisme, Kenneth Waltz mengatakan bahwa "*international anarchy is the permissive cause of war*", kemudian *self-help* didefinisikan sebagai perilaku negara-negara di dalam sistem anarki struktural, di mana di dalam sistem tersebut tidak ada yang mengatur atau penetapan yang mengatur¹⁵. *Self-help* ini menurut neorealisme, mengalir di dalam aturan atau penetapan yang terstruktur pada politik internasional. Menurut Waltz, secara institusional tidak bisa diubah. Sedangkan menurut neoliberalisme, *self-help* diartikan kurang lebih sama apa yang dijelaskan oleh neorealisme.

Yang menjadi perhatian di sini adalah bahwa neorealisme dan neoliberalisme sama-sama tidak mempunyai daya atau *power* yang membuat negara-negara internasional dapat mencerminkan identitas dan kepentingan nasional mereka secara terbuka dan leluasa. Karena kepentingan nasional para negara tersebut akan terkekang oleh terkekang oleh sistem anarki internasional itu sendiri. Di sinilah konstruktivisme muncul. Menurut Wendt, *anarchy is what states make of it*. Dari gagasan Wendt tersebut, menurut Weber, muncul tiga pilar fundamental konstruktivisme yang dianut oleh Alexander Wendt¹⁶ yaitu:

1) *Social Knowledge* adalah masyarakat bergerak atau bereaksi terhadap objek, termasuk aktor-aktor yang lain atas dasar bahwa makna objek itu berarti bagi mereka. Dalam pengertian lain objek di sini adalah sesuatu yang diinginkan para aktor. Untuk mendapatkan objek tersebut maka para aktor ini akan melakukan suatu tindakan yang mana tindakan tersebut apakah itu didapatkan melalui *soft way* atau *hard way*, tergantung seberapa penting objek bagi para aktor dan karakteristik dari aktor itu sendiri.

¹¹ Jill Steans, et al. *An Introduction to International Relations, Perspectives & Themes*. Pearson & Longman, 2010. hlm.185 - 186.

¹² Cynthia Weber, *International Relations Theory, a Critical Introduction*. Routledge, 2010. hlm.62.

¹³ Jill Steans, et al, *op. cit.* hlm.195.

¹⁴ Alexander Wendt, "*Anarchy is What States Make of it: The Social Construction of Power Politics*," *International Organization* 46: 391-425. Dicitak di James Der Derian (ed.), 1995, *International Theory: Critical Investigations*. New York: New York University Press, 1992. hlm.130.

¹⁵ Cynthia Weber, *op. cit.* hlm.64.

¹⁶ Cynthia Weber, *op. cit.* hlm.67.

2) *Social Practice* adalah aktivitas atau kegiatan para aktor mencerminkan arti dari karakteristik dari aktor tersebut. Mengacu kepada pilar pertama bahwa karakteristik seorang aktor tidak dapat diprediksi secara langsung pada saat interaksi terhadap objek terjadi, karena tiap tindakan yang dilakukan, dilihat dari cara aktor mendapatkan objek tersebut.

3) *Social Identities and Interests* adalah identitas dan kepentingan akan terbentuk melalui situasi dan kondisi pada saat aktor tersebut berperilaku terhadap objek.

Kesimpulan dari teori konstruktivisme adalah seperti apa yang telah ditulis oleh Alexander Wendt, "*anarchy is what states make of it*". Bahwa para aktorlah yang menciptakan sebuah anarki, Untuk apa dan tujuan dari anarki tersebut, itu tergantung aktor-aktor yang bermain di dalamnya. Untuk melakukan identifikasi maksud dan tujuan dari anarki yang telah tercipta, sulit untuk diterka dalam waktu yang singkat, tapi bisa dilakukan bila aktor lain selain aktor pencipta anarki, masuk ke dalam anarki tersebut dan ikut di dalamnya dengan jangka waktu yang relatif lama.

Pembahasan

Pemicu Munculnya Islamophobia pada Masyarakat Australia Pada Tahun 2014-2015

Momen penting awal mula Islamophobia pada masyarakat Australia adalah dengan munculnya ISIS yang memproklamirkan diri sebagai Negara Islam Iraq dan Suriah ketika terjadi *Arab Spring* yang merembet kepada kerusuhan Suriah. Yang kemudian tiba-tiba menjadi sebuah isu yang penting di Australia. Sehingga PM Tony Abbott meningkatkan tingkat keamanan terhadap terorisme dari *level medium* ke *level high* pada tanggal 12 September 2014¹⁷. Kebijakan meningkatkan tingkat keamanan terhadap terorisme bukan tanpa alasan melainkan dengan menimbang beberapa faktor dan atas rekomendasi dari ASIO (Australian Security Intelligence Organisation). Pengumuman tentang peningkatan tingkat keamanan ini dilakukan setelah Direktur Jenderal ASIO David Irvine, memperingatkan akan menaikkan tingkat keamanan terhadap terorisme dari tingkat yang lebih tinggi dari *medium*.

Peringatan ini dilakukan dengan alasan timbulnya ketakutan akan bahaya masyarakat Australia setelah kembali dari pertempuran di Irak dan Suriah. Ketakutan timbul bukan karena tanpa alasan, karena Irvine mengatakan bahwa ada sekitar 60-70 warga Australia yang ikut bertempur ke medan perang di Irak dan Suriah bersama kelompok ekstrimis. Tapi PM Tony Abbott mengatakan bahwa seluruh masyarakat Australia tidak usah terlalu khawatir, karena peningkatan tingkat keamanan ini hanya untuk sebagai peningkatan kewaspadaan di masyarakat Australia.

¹⁷ Mitchell Nadin, "*Tony Abbot Lift Terror Alert Level to High, But Says No Attack is Imminent*", National Affairs, The Australian, 2014, <http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/tony-abbott-lifts-terror-alert-level-to-high-but-says-no-attack-is-imminent/story-fn59niix-1227056610235?sv=dc4b44bdc6061700d5fbede68646373f> diakses tanggal 06 November 2015.

Pada tanggal 21 September 2014, ISIS mengeluarkan sebuah klip audio berdurasi 42 menit. Yang isinya adalah memanggil kepada saudara-saudara seperjuangan yang berada di Australia (negara-negara yang disebutkan terdiri dari khususnya Amerika Serikat, Kanada, Perancis dan negara-negara lain yang ikut menyerang ISIS dan Australia termasuk di dalamnya) untuk menyerang warga non Muslim di Australia¹⁸. Pernyataan dari ISIS ini keluar ketika diketahui Pemerintahan Australia mengirim 600 personel militer dan 10 pesawat tempur guna menggempur ISIS pada tanggal 15 September 2014. PM Tony Abbott dan Jaksa Agung George Brandis menyatakan misi yang diemban personel militer Australia lebih kepada misi kemanusiaan dengan elemen pertahanan¹⁹. Militer Australia diturunkan di Iraq, untuk membantu pasukan pertahanan Iraq untuk mengamankan dan melindungi penduduk sekitar agar terhindar dari bahaya pertempuran. PM Tony Abbott sadar bila pasukan militer Australia diterjunkan ke medan perang, itu sama saja menjerumuskan penduduk Australia ke dalam serangkaian serangan teroris.

Kemudian pada tanggal 23 September 2014 terjadi peristiwa penusukan dua anggota kepolisian dan tersangkannya adalah remaja bernama Numan Haider seorang keturunan Afganistan yang kemudian ditembak mati oleh salah satu polisi korban penusukan²⁰. Setelah dilakukan penyelidikan pelaku membawa dua pisau, satu pisau berada di tubuh pelaku dan satu pisau digunakan untuk menyerang serta satu bendera ISIS. Pihak kepolisian setempat menyatakan belum bisa memastikan kalau pelaku adalah salah satu dari anggota ISIS meskipun pada kenyataannya di dalam tubuh pelaku terdapat bendera ISIS.

Kemudian pada tanggal 15-16 Desember 2015 telah terjadi penyanderaan di Café Coklat Lindt yang terletak di Martin Place, Sydney. Pelaku penyanderaan bernama Man Haron Monis. Dia menyandera 10 pengunjung dan delapan pegawai café. Penyanderaan berlangsung selama lebih dari 16 jam dengan hasil pelaku tertembak mati, dua sandera tewas dalam proses penyelamatan²¹. Pelaku menurut pihak keamanan dalam hal ini dari pihak militer, menyatakan bahwa pelaku bukan merupakan salah satu dari anggota ISIS tapi pelaku ingin menjadi bagian dari ISIS²².

Dari beberapa kejadian yang penulis jabarkan mempunyai pesan yang kuat yaitu: aktivitas terorisme, masyarakat Australia, pola kelakuan masyarakat Muslim Australia, dan media. Empat elemen tersebut dapat disimpulkan awal sebagai faktor-faktor pembentuk opini tentang Islamophobia. Dari empat elemen tersebut juga yang akan menjadi bahan pertimbangan Pemerintahan Australia dalam mengeluarkan kebijakan atau *statement* tentang situasi sosial terhadap Islamophobia yang berkembang di lingkungan masyarakat Australia.

¹⁸ Ian Lloyd Neubauer, "A Teenage Suspect Is Shot Dead in Australia after Attacking Police", World, Time, 2014, <http://time.com/3423975/isis-australia-melbourne-police-terrorism-suspect-abdul-numan-haider/> diakses tanggal 07 November 2015.

¹⁹ Daniel Hurst, "Tony Abbott says Australian Forces 'Aim is to dislodge' ISIS from Iraq", The Guardian, 2014, <http://www.theguardian.com/world/2014/sep/15/tony-abbott-spells-out-objectives-of-military-involvement-against-isis> diakses tanggal 07 November 2015.

²⁰ Cameron Houston, et al, "Terror Suspect Shot Dead after Two Police Officers Stabbed in Endeavour Hills", The Sydney Morning Herald, 2014, <http://www.smh.com.au/victoria/terror-suspect-shot-dead-after-two-police-officers-stabbed-in-endeavour-hills-20140923-1015d4> diakses tanggal 07 November 2015.

²¹ Rick Feneley, "Sydney Siege Ends: More than 16 Hours of Terror for Captives", The Sydney Morning Herald, 2014, <http://www.smh.com.au/nsw/sydney-siege-ends-more-than-16-hours-of-terror-for-captives-20141216-128j5f.html> diakses tanggal 07 November 2015.

²² Deborah Snow and Matthew Knot, "Inevitable That IS Would Try to Lionise Martin Place Gunman", The Sydney Morning Herald, 2014, <http://www.smh.com.au/national/inevitable-that-is-would-try-to-lionise-martin-place-gunman-20141230-12foa2.html> diakses tanggal 07 November 2015.

Peran Pemerintah Australia dalam Konteks Social Knowledge

Pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mempersempit gerak teroris di dalam negeri. Mulai dari Peraturan Anti Teror yang baru dan Pelarangan Memakai Burqa bagi Perempuan Muslim Australia. Tidak banyak kebijakan atau aksi yang dilakukan oleh Pemerintah Australia. Salah satu aksi yang dilakukan oleh Pemerintah Australia adalah Operasi Anti Teror yang dilakukan serentak di seluruh wilayah Australia pada tanggal 18 September 2014. Operasi Anti Teror ini disinyalir merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Kepolisian Federal Australia (AFP). Melibatkan lebih dari 800 personel bersenjata lengkap. Sasaran wilayah adalah Sydney dan Brisbane. Kode Operasi Anti Teror ini adalah *Operation Hammerhead*. Operasi ini merupakan respon dari video yang dikeluarkan oleh ISIS tentang ancaman pemenggalan bagi yang memusuhi dan memerangi ISIS. Seperti yang telah diceritakan sebelumnya bahwa Pemerintah Australia telah mengirim tentara Australia ke Iraq dengan tujuan kemanusiaan, tapi oleh pihak ISIS tindakan pengiriman tentara itu disebut sebagai tindakan memerangi ISIS. Sehingga PM Australia Tony Abbott menyuruh AFP untuk menggelar Operasi Hammerhead. Tujuan dari operasi ini adalah untuk memerangi teroris lokal yang nantinya akan menimbulkan keresahan di masyarakat Australia umumnya yang daerahnya padat akan penduduk Muslim.

Sebelumnya penulis sudah menuliskan tentang perubahan tingkat keamanan dari tingkat *medium* ke tingkat *high* pada tanggal 12 September 2014. Sumber dua kebijakan ini adalah tentang perubahan Peraturan Anti Teror pada tanggal 5 Agustus 2014. Terjadi perubahan pada Peraturan Anti Teror yang terkesan sangat ketat²³.

Kebijakan selanjutnya pelarangan memakai burqa di tempat tertentu yang dikeluarkan Pemerintah Australia pada Oktober 2014. Pelarangan ini tidak diketahui tujuannya. PM Tony Abbot dan Julia Bishop tidak memberitahu kepada alasan pelarangan memakai burqa bagi perempuan Muslim Australia. Penjelasan pelarangan ini bukan untuk memaksa membuka perempuan Muslim Australia yang memakai burqa untuk mencopot burqanya, melainkan dipisahkan dari masyarakat yang lain.

Efek dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah jika dilihat dari kacamata Muslim Australia sangat memojokkan dan tidak adil. Yang pertama tentang peraturan anti terror yang baru. Oleh komunitas Muslim di Australia dinilai bahwa Pemerintah Australia secara khusus memusuhi Muslim yang ada di Australia. Seperti yang disuarakan oleh Samier Dandan yang merupakan ketua dari Komunitas Lebanon Australia. Samier mengatakan bahwa *"If these new anti-terror changes are in lieu of 18C [the amendments to the Racial Discrimination Act], we would rather continue the debate of 18C as a nation than have the Australian Muslim community endure such discriminatory measures, these laws will be more destructive than the proposed legislation which has just been discarded. I urge the government to abandon these divisive measures and restore public confidence in our ostensible rights as citizens in a democratic nation"*²⁴.

²³ Greg Barns, *"Draconian Anti-Terrorism Bid an Affront to Freedom"*, ABC, 2014, <http://www.abc.net.au/news/2014-08-06/barns-draconian-anti-terror-plan-goes-too-far/5651156> diakses tanggal 07 November 2015.

²⁴ Daniel Hurst, *"Anti-Terrorism Bill More Destructive than Race Law Change: Muslim Group"*, The Guardian, 2014, <http://www.theguardian.com/world/2014/aug/07/terrorism-laws-more-frightening-racial-abuse-muslim-group> diakses tanggal 07 November 2015.

Dengan kata lain, Samier ingin menunjukkan bahwa peraturan Anti terror yang baru sama saja membuat masyarakat muslim Australia diperlakukan sama seperti teroris. Yang kedua, ketika Operasi *Hammerhead* dijalankan. 15 orang telah ditangkap karena dicurigai mempunyai kegiatan teror atau mempunyai hubungan dengan ISIS²⁵. Yang ketiga adalah pelarangan memakai burqa bagi perempuan Muslim Australia. Efek dari pelarangan ini adalah banyak perempuan Muslim Australia secara terbuka dijauhi oleh komunitas masyarakat Australia. Ini diungkapkan oleh beberapa perempuan Muslim Australia²⁶.

Peran Pemerintah Australia dalam Konteks *Social Practise*

Pemerintah Australia memerintahkan AFP dengan bantuan ASIO untuk menjalankan Operasi *Hammerhead*. Dengan hasil 15 orang pelaku ditangkap karena terduga mengikuti kegiatan terorisme. Berita internasional yang diwarnai dengan kasus penyanderaan yang terjadi di sebuah cafe di Sydney, juga menambah daftar yang merujuk ke isu islamophobia.²⁷ Penyanderaan pengunjung cafe dilakukan oleh seorang imigran muslim yang berasal dari Iran. Kejadian tersebut telah menewaskan dua korban sandera serta pelaku sendiri. Peristiwa ini tentunya telah mencoreng nama Islam kembali di daratan Australia. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan untuk melakukan tindakan-tindakan terorisme terhadap penduduk sipil. Stigma negatif terhadap Islam yang mulai memudar sejak terjadinya rangkaian peristiwa terorisme di tahun 2000-an, muncul kembali akibat terjadinya peristiwa tersebut.

Serangan 9/11 yang telah melibatkan pihak kepolisian, militer, aspek politik, hukum, dan ideologi dalam melawan terorisme, khususnya terorisme Islam, menjadikan Islam momok yang menakutkan hingga saat ini.²⁸ Apalagi dengan terjadinya peristiwa di atas yang melibatkan identitas Islam di dalam aksinya. Hal ini memberikan kontribusi yang besar dalam memunculkan kembali *Islamophobia* di Australia.

²⁵ AFP (Austalian Federal Police), 2014, <http://www.afp.gov.au/media-centre/news/afp/2014/september/media-release-15-people-detained-as-part-of-major-counter-terrorism-investigation> diakses tanggal 07 November 2015.

²⁶ Mohamed Taha and Philippa McDonald, "No-one Sits Next to Me Anymore: Australian Muslim Women on How Their Lives Have Changed", ABC, 2014, <http://www.abc.net.au/news/2014-10-02/australian-muslim-women-talk-about-how-their-lives-have-changed/5786374> diakses tanggal 07 November 2015.

²⁷ Ben Doherty, "Hostages in the Sydney cafe siege: 'We're not getting out of here'", <http://www.theguardian.com/australia-news/2014/dec/16/hostages-in-the-sydney-siege-were-not-getting-out-of-here>. Diakses pada tanggal 3 Januari 2015, pukul 19:32.

²⁸ Rohan Davis, "Civil Aviation Security: The ideologies the Australian Government subscribes to when identifying terrorists", *International Journal of Criminal Justice Sciences*, Vol. 5, No. 2, 2010, hal 252.

Akan tetapi, tragedi tersebut tidak membuat perdana menteri Tony Abbot untuk menyalahkan Islam sebagai dalang dalam aksi terorisme ini.²⁹ Walaupun kejadian ini meningkatkan wacana anti-Islam di negara tersebut,³⁰ tidak membuat warga Australia seluruhnya membenci Islam dan mendiskriminasi mereka dari kehidupan sosial masyarakat Australia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya dukungan dari rakyat Australia terhadap komunitas Muslim Australia dengan menolak isu *Islamophobia* dengan hashtag *#illridewithyou* di berbagai media sosial, khususnya twitter.³¹

Peran Pemerintah Australia dalam Konteks *Social Identities and Interest*

Pemerintah Australia menunjukkan bahwa mereka tidak takut dengan terorisme, tetapi di sisi lain melakukan blunder karena setiap kebijakan yang dikeluarkan mencederai *image* Australia sebagai negara merangkul semua ras. Pasca terjadinya serangan 9/11 dan pemboman di London, Perdana Menteri Australia, John Howard menegaskan bahwa para imigran harus memahami dan menganut nilai-nilai kehidupan yang ada di Australia.³² Dia juga berkomentar: *"There is a fragment [of the Muslim community] which is utterly antagonistic to our kind of society you can't find any equivalent in Italian, or Greek, or Lebanese, or Chinese or Baltic immigration to Australia. There is no equivalent of raving on about jihad"*.³³

Dapat kita pahami dari pernyataan Howard di atas bahwa ada sebagian dari masyarakat Australia (umat muslim) untuk menentang nilai-nilai yang ada di Australia. Menurutnya, kaum muslim cenderung bersifat antagonis terhadap nilai-nilai kehidupan yang ada di Australia. Sifat tersebut ditunjukkan dengan adanya keinginan dari pihak muslim untuk menegakkan syariat Islam di wilayah Australia.

Sebenarnya isu muslim menjadi ancaman bagi nilai-nilai Australia sudah didengarkan oleh beberapa pihak yang anti-Islam jauh sebelum terjadinya peristiwa 9/11. Di mana pihak ini melihat bahwa imigran muslim berpotensi menimbulkan ancaman terhadap nilai-nilai yang ada di Australia.³⁴ Akan tetapi, suara anti-Islam mereka belum terdengar kencang sampai terjadinya serangan 9/11.

Sentimen pemerintah Australia yang lain juga ditunjukkan oleh menteri pendidikan Australia pada saat itu, Brendan Nelson yang menyatakan: *"We want them to understand our history and our culture, the extent to which we believe in mateship and giving another person a fair go if people don't want to support and accept and adopt and teach Australian values then, they should clear off"*.³⁵

²⁹ Lenore Taylor, "Sydney siege: Abbot refuses to blame Islam for Man Haron Monis's actions", <http://www.theguardian.com/australia-news/2014/dec/17/sydney-siege-abbott-refuses-to-blame-islam-for-man-haron-monis-actions>. Diakses pada tanggal 3 Januari 2015, pukul 19:54.

³⁰ Mohamed Taha, "'No-one sits next to me anymore': Australian Muslim women on how their lives have changed", <http://www.abc.net.au/news/2014-10-02/australian-muslim-women-talk-about-how-their-lives-have-changed/5786374>. Diakses pada tanggal 3 Januari 2015, pukul 20:09.

³¹ Mairi Mackay, "Hostage siege: Australians stand up to Islamophobia with #illridewithyou", <http://www.cnn.com/2014/12/15/world/asia/australia-hostage-illridewithyou/>. Diakses pada tanggal 3 Januari 2014, pukul 20:16.

³² Jennifer E. Cheng, "Promoting 'National Values' In Citizenship Tests In Germany & Australia. A Response To The Current Discourse On Muslims?", Macquarie University, Hal 57.

³³ *Ibid.*

³⁴ Salih Yucel, "Is Islam Part of the Problem or Solution: An Australian Immigrant Experience?", Monash University, Turkish Journal of Politics, Vol. 2, No. 1, 2011, hal 100.

³⁵ Alice Aslan, "Islamophobia in Australia", Agora Press, Australia, 2009, hal 5.

Jika kita perhatikan lebih lanjut, argumen-argumen di atas yang dikemukakan oleh para pejabat pemerintahan Australia menunjukkan bahwa isu sentimen terhadap muslim sangat tinggi sekali pada saat itu. Ketakutan terhadap gerakan Islam fundamentalis yang berlebihan membuat pemerintah Australia memonitor aspek-aspek kehidupan umat muslim di wilayahnya. Salah satunya pendidikan, di mana sekolah-sekolah Islam wajib memberikan pemahaman terhadap murid-muridnya mengenai nilai-nilai kehidupan di Australia.

Alasan pemerintah Australia menysasar aspek pendidikan adalah karena aspek tersebut merupakan sisi yang sangat strategis dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan di Australia. Dengan menanamkan nilai-nilai Australia sejak kecil, maka diharapkan pengaruh-pengaruh Islam fundamentalis yang ada dalam darah mereka dapat diminimalisir, sehingga tidak menimbulkan ancaman yang besar bagi rakyat Australia secara keseluruhan.

Selain daripada itu, Danna Vale, anggota parlemen federal Australia memberikan pernyataan yang sangat mengejutkan terkait masalah imigrasi. Menurutnya, jika kebijakan keimigrasian tidak diubah dan dibiarkan seperti itu, dia memprediksi bahwa tidak lama lagi, sekitar kurang lebih 50 tahun, Australia akan menjadi negara Muslim.³⁶ Tentunya pernyataan tersebut mengejutkan bagi kalangan pejabat di parlemen. Apalagi asumsi yang dikemukakan berkaitan dengan *Islamophobia* yang bisa saja menimbulkan diskriminasi kebijakan terhadap para imigran muslim di negara tersebut.

Beberapa politikus dari partai Liberal, seperti Bronwyn Bishop dan Sophie Panopoulou memberikan pernyataan terkait pelarangan hijab di sekolah.³⁷ Mereka berpendapat bahwa penggunaan hijab di sekolah-sekolah harus dilarang. Menurut keduanya, penggunaan hijab tidak merepresentasikan pendidikan di sekolah. Di mana sekolah mengajarkan kebebasan berpikir sedangkan orang yang memakai hijab menurut mereka masih belum bisa mengekspresikan kebebasan yang sebenarnya.

Akan tetapi, usulan ini segera ditolak oleh perdana menteri John Howard.³⁸ Menurutnya penggunaan hijab bukanlah isu yang harus dipermasalahkan. Karena setiap orang di Australia berhak untuk mengekspresikan dirinya selama itu tidak mengganggu pihak lain. Dan penggunaan hijab adalah menunjukkan kebebasan seorang muslimah untuk mengekspresikan kehendak yang diinginkannya.

Jika kita perhatikan lebih lanjut, dapat kita simpulkan bahwa tidak semua pejabat pemerintah anti terhadap Islam. Walaupun mereka berasal dari satu partai, itu tidak menjamin mereka memiliki pandangan yang sama. Tentunya perdana menteri John Howard pasti mempertimbangkan terlebih dahulu sebuah usulan sebelum menolak atau menyetujui usulan tersebut. Apalagi terkait masalah sensitif seperti diskriminasi agama terhadap muslim. Jika perdana menteri John Howard menyetujui usulan-usulan di atas, secara tidak langsung dia telah mengkhianati nilai-nilai Australia yang multikulturalisme dan penuh toleransi.

³⁶ Mark Chipperfield, "Will be Muslim in 50 Years", <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/australiaandthepacific/australia/1510565/Australia-will-be-Muslim-in-50-years.html>. Diakses pada tanggal 3 Januari 2015, pukul 13:01.

³⁷ Louise Yaxley, "Bronwyn Bishop calls for hijab ban in school", <http://www.abc.net.au/worldtoday/content/2005/s1448343.htm>. Diakses pada tanggal 3 Januari 2015, pukul 13:21.

³⁸ Brendan Nicholson, "PM rejects headscarves ban", <http://www.theage.com.au/news/national/pm-rejects-headscarves-ban/2005/08/29/1125302511538.html>. Diakses pada tanggal 3 Januari 2015, pukul 13:32.

Penutup

Pemerintah Australia bergerak dan bereaksi sesuai dengan apa yang mereka diskusikan bersama. Pemerintah bereaksi terhadap apa yang terjadi di dunia internasional yang pada saat itu bergaung *War on Terrorism*, yang kali ini pelaku terorisnya adalah ISIS. Berdasarkan Teori Konstruktivis, Wendt mengatakan bahwa "*anarchy is what states make of it*". Situasi dalam negeri pun berlaku demikian. Pemerintah Australia merespon apa yang telah ISIS berikan kepada situasi dalam negeri Australia. Berdasarkan Wendt, tiga pilar konstruktivisme adalah:

1. *Social Knowledge*. Pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mempersempit gerak teroris di dalam negeri. Mulai dari Peraturan Anti Teror yang baru dan Pelarangan Memakai Burqa bagi Perempuan Muslim Australia.
2. *Social Practice*. Pemerintah Australia memerintahkan AFP dengan bantuan ASIO untuk menjalankan Operasi *Hammerhead*. Dengan hasil 15 orang pelaku ditangkap karena terduga mengikuti kegiatan terorisme.
3. *Social Identities and Interest*. Pemerintah Australia menunjukkan bahwa mereka tidak takut dengan terorisme, tetapi di sisi lain melakukan blunder karena setiap kebijakan yang dikeluarkan mencederai *image* Australia sebagai negara merangkul semua ras.

Terkait dengan isu Islamophobia, bisa dinilai bahwa Pemerintah Australia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Tony Abbot gagal dalam mengatasi isu tersebut. Setiap kebijakan yang dikeluarkan mengarah ke satu pihak yaitu Komunitas Muslim. Media juga cukup ambil andil dalam meningkatkan isu Islamophobia. Bukan secara sengaja ataupun dikondisikan, tetapi masyarakat Australia non-Muslim sudah terlanjur menilai bahwa Muslim adalah teroris karena informasi yang pertama diterima oleh masyarakat Australia bahwasanya Muslim adalah teroris. Menagapa? Karena jika melihat ke belakang, peristiwa Perang Teluk I dan II serta 9/11 adalah peristiwa yang sangat membekas di ingatan masyarakat Australia. Dan Pemerintah Australia tidak menunjukkan iktikad baik dalam memperbaiki Isu Islamophobia yang sudah menjalar ke seluruh masyarakat non-Muslim Australia.

Seperti kebijakan tidak boleh memakai burqa / hijab bagi muslim wanita dan kebijakan baru tentang terorisme. Meskipun untuk kebijakan baru tentang terorisme baik, tapi kebijakan tersebut berdampak tidak baik bagi beberapa komunitas seperti komunitas Muslim di Australia. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak bisa mengangkat nama baik komunitas Muslim di Australia di mata masyarakat Australia yang sudah terlanjur mengecap bahwa komunitas Muslim di Australia adalah komunitas penghasil teroris.

Daftar Referensi

- Collins, J., G. Noble, S. Poynting and P. Tabar. 2000. *Kebabs, Kids, Cops and Crime: Youth, Ethnicity and Crime*. Sydney: Pluto Press.
- Esposito, John L., Ibrahim Kalin. 2011. *Islamophobia: The Challenge of Pluralism in the 21st Century*. New York: Oxford University Press.
- Hage, Ghassan. 1991. *Racism, Multiculturalism and the Gulf War*. Arena 96.
- Kabir, Nahid A. 2004. *Muslims in Australia: Immigration, Race Relations and Cultural History*, London: Kegan Paul.
- Poynting, Scott. 1999. *When "Zero Tolerance" Looks Like Racial Intolerance: "Lebanese Youth Gangs", Discrimination and Resistance*, Current Issues in Criminal Justice 11(1): 74-8.
- Poynting, Scott, Victoria Mason. 2010. *Journal of Sociology - The Resistible Rise of Islamophobia: Anti-Muslim Racism in the UK and Australia before 11 September 2001*. Sage. Diunduh di <http://www.islamiccouncilwa.com.au/wp-content/uploads/2014/05/poynting2007a-2.pdf> pada tanggal 16 Oktober 2015.

- Stears, Jill, Lloyd Pettiford, Thomas Diez and Imad El-Anis. 2010. *An Introduction to International Relations, Perspectives & Themes*. Harlow: Pearson & Longman.
- Wendt, Alexander. 1992. "Anarchy is What States Make of it: The Social Construction of Power Politics," *International Organization* 46: 391-425. Dicitak di James Der Derian (ed.), 1995, *International Theory: Critical Investigations*. New York: New York University Press.
- Weber, Cynthia. 2010. *International Relations Theory, a Critical Introduction*. London: Routledge.
- AFP(Australian Federal Police). 2014. <http://www.afp.gov.au/media-centre/news/afp/2014/september/media-release-15-people-detained-as-part-of-major-counter-terrorism-investigation> diakses tanggal 07 November 2015.
- Barns, Greg. 2014. *Draconian Anti-Terrorism Bid an Affront to Freedom*. ABC. <http://www.abc.net.au/news/2014-08-06/barns-draconian-anti-terror-plan-goes-too-far/5651156> diakses tanggal 07 November 2015.
- Feneley, Rick. 2014. *Sydney Siege Ends: More than 16 Hours of Terror for Captives*. The Sydney Morning Herald. <http://www.smh.com.au/nsw/sydney-siege-ends-more-than-16-hours-of-terror-for-captives-20141216-128j5f.html> diakses tanggal 07 November 2015.
- Houston, Cameron, Craig Butt, Tammy Mills, Rania Spooner, Caroline Zielinski, Henrietta Cook. 2014. *Terror Suspect Shot Dead after Two Police Officers Stabbed in Endeavour Hills*. The Sydney Morning Herald. <http://www.smh.com.au/victoria/terror-suspect-shot-dead-after-two-police-officers-stabbed-in-endeavour-hills-20140923-10l5d4> diakses tanggal 07 November 2015.
- Nadin, Mitchell. 2014. *Tony Abbot Lift Terror Alert Level to High, But Says No Attack is Imminent*. National Affairs. The Australian. <http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/tony-abbott-lifts-terror-alert-level-to-high-but-says-no-attack-is-imminent/story-fn59niix-1227056610235?sv=dc4b44bdc6061700d5fbede68646373f> diakses tanggal 06 November 2015.
- Hurst, Daniel. 2014. *Anti-Terrorism Bill More Destructive than Race Law Change: Muslim Group*. The Guardian. <http://www.theguardian.com/world/2014/aug/07/terrorism-laws-more-frightening-racial-abuse-muslim-group> diakses tanggal 07 November 2015.
- Daniel. 2014. *Tony Abbott says Australian Forces 'Aim is to dislodge' ISIS from Iraq*. The Guardian. <http://www.theguardian.com/world/2014/sep/15/tony-abbott-spells-out-objectives-of-military-involvement-against-isis> diakses tanggal 07 November 2015.
- Neubauer, Ian Lloyd. 2014. *A Teenage Suspect Is Shot Dead in Australia after Attacking Police*. World. Time. <http://time.com/3423975/isis-australia-melbourne-police-terrorism-suspect-abdul-numan-haider/> diakses tanggal 07 November 2015.
- Snow, Deborah, Matthew Knot. 2014. *Inevitable That IS Would Try to Lionise Martin Place Gunman*. The Sydney Morning Herald. <http://www.smh.com.au/national/inevitable-that-is-would-try-to-lionise-martin-place-gunman-20141230-12foa2.html> diakses tanggal 07 November 2015.
- Taha, Mohamed, Philippa McDonald. 2014. *No-one Sits Next to Me Anymore: Australian Muslim Women on How Their Lives Have Changed*. ABC. <http://www.abc.net.au/news/2014-10-02/australian-muslim-women-talk-about-how-their-lives-have-changed/5786374> diakses tanggal 07 November 2015.

INTERREGIONALISME: DUKUNGAN UE TERHADAP MASYARAKAT ASEAN**Irwan Iskandar, S.IP, MA**Dosen Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau,
Pekanbaru, dan alumni Hochschule Bremen, Bremen, Jerman.**Abstraksi**

Uni Eropa (UE) sebagai sebuah organisasi regional telah menjadi kajian ilmiah sejak pasca PD II. Salah satu yang menarik yaitu UE tidak hanya memiliki kebijakan yang terkait dalam kawasan (intraregional) namun juga kebijakan terhadap kawasan-kawasan lainnya (interregional), terutama dengan ASEAN (Association of South East Asian Nations). Kini, ketika ASEAN merencanakan Masyarakat ASEAN (ASEAN Community), UE pun menunjukkan dukungan penting. Untuk itu, penelitian ini mempertanyakan mengapa UE mendukung Masyarakat ASEAN dan apa bentuk dukungannya? Menjawab pertanyaan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dimana semua data diambil dalam bentuk tertulis, baik dari dokumen resmi UE dan ASEAN, website UE dan ASEAN, juga berbagai sumber terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan UE terkait Masyarakat ASEAN dikarenakan UE dan ASEAN memiliki kesamaan kepentingan dan nilai-nilai, ekonomi dan dinamisasi geografi. Dukungan UE terkait Masyarakat ASEAN adalah dalam bentuk bantuan dana dan program-program yang mengarah ke integrasi kawasan.

Kata Kunci: *Uni Eropa, Masyarakat ASEAN, integrasi kawasan, interregionalism, konstruktivisme*

Pendahuluan

Perkembangan politik global telah mengalami perubahan fokus yang signifikan yang ditandai dengan berakhirnya Perang Dunia I. Momentum perubahan ini menjadi lebih meluas setelah Perang Dunia II. Fokus yang pada awalnya pada hubungan antara negara-negara, kemudian lebih meluas kepada berbagai aspek lainnya, seperti; migrasi penduduk dari sebuah negara ke negara lainnya secara legal ataupun ilegal dan berkembangnya perusahaan-perusahaan yang mampu melintasi dan melingkupi batas negara-negara yang berbeda. Dinamika politik global juga turut diwarnai dengan kemunculan berbagai organisasi non pemerintah lintas negara dan organisasi yang dibentuk antar pemerintah (*intergovernmental organisation*) yang bersifat universal.

Tidak hanya terbentuknya organisasi antar pemerintah yang bersifat universal, pasca Perang Dunia II pendirian organisasi antar pemerintah yang bersifat kawasan (regional) pun makin menggeliat. Di antara organisasi yang terbentuk tersebut adalah UE (Uni Eropa)/EU (*European Union*) yang merupakan sebuah organisasi yang lahir dari proses panjang pasca Perang Dunia. Sebagai sebuah organisasi antar Pemerintah, UE memang pada awalnya dimaksudkan sebagai upaya menghindari peperangan yang acap kali terjadi di kawasan tersebut. Sebagai sebuah kawasan, Eropa memang seringkali menghadirkan peperangan dalam skala kecil antara negara-negara dan juga peperangan dalam skala besar, seperti Perang Dunia, dimana kedua Perang Dunia tersebut telah mengambil tempat dominan di Eropa dan merenggut korban yang juga mayoritas dari Eropa.

Perkembangan UE beranjak dari sekedar upaya untuk mencegah terjadinya kembali perang di Eropa menuju penyatuan dan harmonisasi dari berbagai macam aspek, seperti dalam bidang ekonomi, politik, keamanan dan hukum. Penyatuan dan harmonisasi Eropa dirintis dengan dibentuknya Masyarakat Batubara dan Baja Eropa/*ECSC*(*European Coal and Steel Community*) pada tahun 1950 oleh Belgia, Prancis, Jerman, Italia, Luxemburg dan Belanda sebagai langkah awal penyatuan secara ekonomi dan politik dalam rangka menjaga perdamaian.¹ Pembentukan ECSC tertuang dalam Traktat Paris yang ditandatangani pada 18 April 1951² dan diterapkan pada 23 Juli 1952 dimana Jean Monnet diangkat sebagai Presiden dari Otoritas Tinggi/*High Authority* dan Paul Henri Spaak sebagai Presiden Majelis Umum/*Common Assembly*.³

Langkah penting berikutnya diambil oleh negara-negara di Eropa dengan membentuk MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa)/ME (Masyarakat Eropa)/*EEC* (*European Economic Community*)-*EC* (*European Community*) melalui Traktat Roma pada tanggal 25 Maret 1957 dan mulai efektif pada tanggal 1 Januari 1958. Keberadaan MEE ini pun terus bermetamorfosis menuju UE setelah ditandatanganinya Traktat Maastricht/*Maastricht Treaty* pada 7 Februari 1992 yang diimplementasikan pada 1 November 1993. Metamorfosis MEE/ME menuju UE pun mengalami proses *widening* melalui penambahan jumlah negara anggota UE dan *deepening* melalui pembuatan beberapa kebijakan yang bersifat menyatukan ikatan diantara negara-negara anggota UE, seperti; *customs union, the Internal Market* dan *Euro Zone*.⁴

Sebagai sebuah organisasi antar pemerintah yang bersifat internasional dan juga regional UE tidak menutupi diri dari berinteraksi dan bekerjasama dengan negara dan organisasi internasional dan regional lainnya, seperti ASEAN (*Association of South East Asian Nations*).

Kini, semenjak ASEAN menetapkan akan mengadakan Masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*), UE tetap mempertahankan kerjasama yang telah terjalin sejak tahun 1972. Apalagi pasca diterapkan Traktat Lisbon, bentuk kerjasama ini makin dikukuhkan dan kerjasama antar kawasan (*inter-regional co-operation*) ini terus mengalami peningkatan baik dalam kuantitas ataupun kualitas, yang merambah dari segi ekonomi, politik, budaya dan pendidikan, konflik, lingkungan hidup dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian hendak mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yakni; 1). Mengapa UE mendukung ASEAN dalam Masyarakat ASEAN? dan 2). Apa bentuk dukungan yang diberikan UE untuk Masyarakat ASEAN?. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong dan memotivasi UE dalam mendukung Masyarakat ASEAN dan menggambarkan bentuk-bentuk dukungan yang diberikan UE terkait Masyarakat ASEAN. Dengan demikian diharapkan penelitian ini akan bermanfaat dalam memperkaya khazanah tulisan ilmiah yang terkait regionalisme dan organisasi internasional, terutama UE dan ASEAN.

¹http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_en.htm, diakses pada tanggal 21 Mei 2015

²http://europa.eu/about-eu/eu-history/1945-1959/1951/index_en.htm, diakses pada tanggal 12 Agustus 2015

³http://europa.eu/about-eu/eu-history/1945-1959/1952/index_en.htm, diakses pada tanggal 12 Agustus 2015

⁴http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/deepening_european_integration_en.htm, diakses pada tanggal 30 Juni 2015

Lebih lanjut, untuk menggali lebih dalam terkait tema tersebut maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kepustakaan. Adapun sumber-sumber data akan diambil dari data primer yang berisi tentang UE dan ASEAN dilihat dari Perjanjian, Situs-situs, dan data tertulis lainnya yang berasal dari UE atau ASEAN langsung. Disamping data primer juga akan diambil data sekunder yang membahas UE, ASEAN, dan Masyarakat ASEAN secara umum.

Agar tersusun dengan baik, tulisan ini akan dibagi kedalam beberapa bagian. Bagian pertama berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang diangkatnya topik, rumusan masalah yang ingin dikaji beserta tujuan dan manfaatnya, serta metode penelitian yang digunakan. Bagian kedua akan membahas kajian teoritis dan konseptual yang mendukung penelitian. Pada bagian ketiga akan berisi hasil dan pembahasan, yakni pembahasan kebijakan *luar negeri* UE dalam Traktat Uni Eropa, selang pandang hubungan UE dan ASEAN berdasarkan kronologis waktu dan dukungan UE terhadap Masyarakat ASEAN. Bagian keempat akan menjadi kesimpulan dari diskusi terkait.

Telah menjadi suatu hal yang umum bagi kebanyakan pengamat bahwa telah terjadi peningkatan yang signifikan baik dalam jumlah keseluruhan insititusi kawasan ataupun dalam jangkauan kegiatan-kegiatan mereka sepanjang setengah abad yang lalu. Kesemua ini tampaknya menunjukkan bahwa regionalisme telah menjadi sebuah bagian yang lebih penting dan memang telah menjadi bagian yang tetap atau mapan dalam politik dunia.⁵

Walaupun regionalisme telah muncul sejak Perang Dunia Kedua dan bahkan telah berada sebelum itu, istilah regionalisme sering kali tumpang tindih dengan istilah region atau kawasan. Sering kali, memang, kawasan atau region lebih identik dengan wadah (jasad) sedangkan regionalisme sering diandaikan dengan isi (ruh) dari sebuah kawasan atau region. Dengan kata lain, regionalisme lebih bersifat abstrak, mengenai 'ruh' sebuah kawasan dibandingkan kawasan atau region yang lebih mengacu pada posisi teritori geografis, batas-batas terwujud dan mampu diterjemahkan dengan nyata. Lebih lanjut, regionalisme dapat dianggap sebagai posisi moral (deskripsi) dengan menganalogikan negara-negara yang berada dalam suatu wilayah tertentu seperti berada dalam sebuah perahu yang sama dalam melayari kehidupan. Sehingga, negara-negara tersebut harus saling bekerjasama dalam pemenuhan kebutuhan bersama, tidak saling menjatuhkan dan mampu menahan ego masing-masing untuk mencapai keselamatan. Di samping sebagai posisi moral, regionalisme juga diartikan sebagai doktrin atau ajaran tentang bagaimana seharusnya hubungan internasional diselenggarakan (preskripsi).⁶

Louise Fawcett juga memiliki pandangan yang sama terkait dengan region dengan melihat region sebagai unit-unit atau "zona-zona" yang didasarkan pada kelompok-kelompok, negara-negara atau teritori-teritori yang anggota-anggotanya memiliki beberapa ciri-ciri yang identik. Karakter utama dari zona-zona seperti itu adalah bahwa zona-zona tersebut lebih kecil dari sistem internasional negara-negara, namun lebih luas daripada tiap-tiap negara atau bagian non-negara; mereka dapat bersifat permanen atau sementara; terorganisasikan ataupun tidak.⁷

⁵Louise Fawcett (a). *Regionalism in World Politics: Past and Present*. Halaman 1, diakses dari <http://www.garnet-eu.org/pdf/Fawcett1.pdf>, pada tanggal 07 Juli 2015.

⁶Nuraeni S., Deasy Silvy dan Arifin Sudirman. *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Halaman 4-6

⁷Louise Fawcett (b). "Regionalism from an Historical Perspective" dalam Mary Farrel, Björn Hettne and Lukman van Langenhove (Ed). *Global Politics of Regionalism: An Introduction*. London: Pluto Press, 2005. Halaman 24

Pengertian tentang region tersebut secara alami menuntun kepada konsep regionalisme sebagai sebuah kebijakan dan rancangan dimana negara-negara dan aktor-aktor non negara bekerjasama dan berkoordinasi terkait sebuah strategi dalam sebuah kawasan tertentu. Dimana, tujuan regionalisme tersebut adalah untuk meraih dan memajukan cita-cita bersama terkait satu atau lebih isu. Dengan pemahaman seperti itu, regionalisme menjangkau dari memajukan rasa kepedulian regional dan komunitas (regionalisme lunak), melalui penggabungan kelompok dan jaringan regional menuju gabungan atau kelompok-kelompok sub-regional yang diformulasikan melalui penetapan-penetapan antar negara dan organisasi (regionalisme keras).⁸

Setiap kawasan memiliki berbagai macam komposisi, kemampuan dan keinginan. Oleh karena itu, regionalisme mencoba meningkatkan kapasitas kawasan dan disinilah terdapat letak peran masyarakat internasional.⁹ Walaupun bukan sesuatu yang baru, namun telah menjadi sesuatu yang lebih penting adalah fenomena kerjasama antar kawasan (*inter-regional cooperation*) yang potensial dimana kawasan-kawasan yang berbeda merancang dan menghubungkan strategi dan kebijakan umum sebisa mungkin dalam satu atau berbagai aspek.¹⁰

Namun, sejak berakhirnya Perang Dingin, kerjasama antar kawasan kembali menjadi perhatian para sarjana dan praktisi yang sebelumnya kurang menarik perhatian. Lebih lanjut, bentuk-bentuk baru dari hubungan antar kawasan yang seringkali berlapis-lapis telah muncul sebagai sebuah dampak yang wajar dari "regionalisme baru". Untuk itu, UE masih tetap sebagai aktor utama dalam mengembangkan jaringan kerjasama antar kelompok-kelompok kawasan. Meskipun demikian, jumlah rancangan kerjasama antar kawasan telah meningkat melebihi hubungan eksternal UE.¹¹

Menurut DR Heiner Hänggi perluasan jaringan hubungan-hubungan antar kawasan muncul dalam susunan yang luas pada manifestasinya. Rancangan-rancangan antar kawasan tersebut dapat dikategorikan atas tiga bentuk yang berbeda, yakni¹²:

- a) Hubungan antara kelompok-kelompok kawasan
hubungan-hubungan ini didasarkan pada frekuensi pertemuan rutin pada level pejabat senior atau kementerian dan pada peluncuran proyek dan program bersama. Hubungan-hubungan ini terfokus pada pertukaran informasi dan kerjasama dalam bidang-bidang isu tertentu, yang terutama dalam bidang ekonomi, perdagangan dan investasi. Dalam kasus tertentu, seperti UE, kerjasama tersebut mencakup unsur politik seperti dialog hak azasi manusia dan demokrasi.
- b) Rancangan biregional dan transregional
hubungan-hubungan biregional dan transregional merupakan fenomena yang relatif baru dalam hubungan internasional yang muncul dalam konteks Triad, yaitu hubungan segitiga antara tiga kawasan ekonomi dunia terbesar; Amerika Utara, Eropa Barat dan Asia Timur. Keanggotaan rancangan ini lebih tersebar dibandingkan dialog kelompok-ke-kelompok yang tradisional dan tidak harus sesuai dengan kelompok kawasan dan boleh melibatkan negara-negara anggota dari lebih dua kawasan. Keterlibatan negara-negara anggota bisa bersifat sendirian atau atas koordinasi kawasan. Agenda yang diangkat biasanya seputar ekonomi, namun bisa juga politik, sosial budaya dan kerjasama pembangunan.
- c) Hybrid; hubungan antara kelompok kawasan dan negara kuat

⁸*Ibid*

⁹*Ibid* Halaman 26

¹⁰*Ibid* Halaman 31-32

¹¹DR. Heiner Hänggi. *Interregionalism: Empirical and Theoretical Perspective*. Halaman 2-3. Diakses dari <http://www.cap.lmu.de/transatlantic/download/Haenggi.PDF>, pada tanggal 7 Juli 2015

¹²*Ibid*,

Selain kedua bentuk hubungan diatas, juga terdapat hubungan antara kelompok regional dengan negara kuat di kawasan dunia yang lain. Hubungan ini berbentuk hybrid dikarenakan hubungan kerjasama antar kawasan terjadi dengan salah satu negara kuat yang memiliki posisi dominan dalam kawasannya. Hubungan ini juga boleh jadi menyatakan komponen penting rancangan biregional atau transregional. Contoh dari bentuk ini antara lain hubungan EU-China/EU-India dan ASEAN-Jepang/ASEAN-Tiongkok.

Lebih lanjut, penjelasan hubungan antar kawasan ini jika disandarkan pada teori, maka akan ditemui dua aliran pemikiran utama, yakni realisme dan liberal institutionalisme. Namun, kedua pemikiran ini pun mengalami tantangan baru dari berbagai perspektif teori, salah satu diantaranya adalah perspektif sosial-konstruktivisme atau biasa disebut konstruktivisme. Pemikiran realisme memfokuskan diri pada dinamika persaingan regionalisme dan pada keseimbangan permainan antar aktor-aktor regional yang berbeda. Sedangkan para pendukung pendekatan liberal-institutionalisme menyorot pada keperluan untuk usaha bekerjasama dalam rangka mengatur kesalingtergantungan yang kompleks pada tingkat kerjasama antar kawasan. Terakhir, para pendukung pendekatan sosial konstruktivis akan merujuk pada pembentukan identitas melalui interaksi antar kawasan.¹³

Berdasarkan penjelasan teori diatas yang masih belum menemukan kata sepakat, maka penulisan ini pun akhirnya memutuskan memilih konstruktivisme. Dipilihnya pendekatan konstruktivisme dikarenakan teori ini lebih sesuai dengan tema tulisan yang berasal dan menggunakan prinsip-prinsip dasar UE ketika menjalin kerjasama dengan pihak luar. Prinsip-prinsip dasar tersebut tertuang dalam Traktat Uni Eropa dalam penjelasan tentang Ketentuan-Ketentuan Dasar Ayat 3 dan Ketentuan-Ketentuan Umum tentang Tindakan Eksternal Union ayat 21. Di samping itu, penulis juga sepakat dengan pendapat Stephen M Walt yang mengutarakan bahwa identitaspolitik sebagai proses kelanjutan integrasi UE¹⁴ dan Jürgen Rüländ ketika membahas UE sebagai aktor kerjasama antar kawasan.¹⁵

Konstruktivisme atau juga dikenal dengan pendekatan ideational berfokus pada kumpulan aturan-aturan dan norma-norma yang menuntun perilaku politik. Apabila dikaitkan dengan regionalisme maka pendekatan sosial-konstruktivisme bertumpu pada pengembangan kesadaran sebuah kawasan yang mengarahkan kepada pembentukan "identitas kawasan" atau perasaan "ke-kita-an" atau disebut sebagai "kognitif regionalisme".¹⁶

Dengan demikian, sebagai sebuah perilaku politik, ketika sebuah organisasi kawasan melakukan kerjasama antar kawasan maka ia akan merujuk pada prinsip-prinsip, aturan-aturan dan norma-norma yang dimiliki. Sebuah kesadaran yang akan menjalin hubungan dengan pihak luar yang memiliki persamaan identitas atau kognitif regionalisme yang serupa. Hal ini penting untuk memelihara ke-kita-an di dalam kawasan dan menyebarkan ke-kita-an ke pihak lain di luar kawasan.

¹³DR. Heiner Hänggi, *op. cit.* Halaman 8-9

¹⁴S. M Walt. "International Relations: one world, many theories" in Little R and Smith, M (eds). *Perspective on World Politics*, 3rd Edition. London: Routledge, 1998, in Christian Fjäder. "Regionalism in Asia and Europe in a Theoretical Perspective: 'Rationalist' and 'Ideational' Approaches", in *Asia-Pacific Journal of Financial Studies*. 2012, Halaman. 94, diakses dari http://www.researchgate.net/profile/Christian_Fjaeder/publication/236161719_Regionalism_in_Asia_and_Europe_in_a_Theoretical_Perspective_%27Rationalist%27_and_%27Ideational%27_Approaches/links/0c96051695d45eb9bc000000.pdf, pada 24 Juli 2015

¹⁵Jürgen Rüländ. "The EU as Inter-Regional Actor: The Asia-Europe Meeting (ASEM), Paper Prepare for the International Conferences "Asia-Europe on the Eve of the 21st Century, Bangkok, 19-20 August 1999, di dalam DR. Heiner Hänggi, *Ibid.*

¹⁶Christian Fjäder. *Op. cit.*, halaman. 93-94

Pembahasan**Kebijakan Luar Negeri UE dalam Traktat-Traktat**

Kebijakan luar negeri UE ditinjau dari Traktat Roma belum terlalu spesifik menjelaskan posisi UE, hanya menjelaskan penjelasan dasar. Dalam pasal 238 disebutkan¹⁷:

The Community may conclude with a third State, a union of States or an international organisation agreements establishing an association involving reciprocal rights and obligations, common action and special procedures. These agreements shall be concluded by the Council, acting unanimously after consulting the Assembly [European Parliament].

Dengan demikian sudah jelas bahwa kebijakan luar negeri telah dijalankan oleh UE (saat itu masih berbentuk Masyarakat Eropa) melalui perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga, baik itu negara, negara-negara uni dan organisasi internasional lainnya. Persyaratan yang diajukan yakni perjanjian tersebut harus memuat hak-hak dan kebijakan yang sama, memiliki aksi bersama dan prosedur yang khusus serta diputuskan oleh Dewan UE setelah berkonsultasi dengan Parlemen UE.

Kebijakan luar negeri UE menjadi lebih luas dan berpengaruh ketika ditandatangani Traktat Maastricht pada 7 Februari 1992 dan diterapkan pada 1 November 1993. Dalam traktat ini mulai dibentuk Kebijakan Bersama Luar Negeri dan Keamanan/*Common Foreign and Security Policy (CFSP)*, dimana kebijakan ini pun menjadi bagian dari tiga pilar berdirinya UE.¹⁸

Dalam bab V diatur secara tersendiri Kebijakan Bersama Luar Negeri dan Keamanan yang dijalankan oleh UE dan negara-negara anggota dengan tujuan¹⁹:

- untuk menjaga nilai-nilai bersama, kepentingan-kepentingan yang mendasar, dan kemerdekaan UE;
- untuk memperkuat keamanan UE dan negara-negara anggotanya dalam segala bentuk;
- untuk memelihara perdamaian dan memperkuat keamanan internasional, sesuai dengan prinsip Piagam PBB, *Helsinki Final Act* dan tujuan-tujuan Piagam Paris;
- untuk mempromosikan kerjasama internasional;
- untuk mengembangkan dan mengkonsolidasikan demokrasi dan penegakkan hukum, dan penghormatan pada HAM (Hak-hak Azasi Manusia) dan kebebasan-kebebasan dasar.

Kebijakan Bersama Luar Negeri dan Keamanan UE makin diperkokoh pasca Traktat Lisbon. Dalam versi gabungan Traktat tentang UE dan Traktat tentang Pengfungsiannya kebijakan tersebut diperluas dengan:

- meletakkan nilai-nilai dasar UE dan menyarankan UE agar turut serta dalam urusan-urusan luar negeri berdasarkan nilai-nilai tersebut sebagaimana tampak dalam Ketentuan-Ketentuan Bersama Pasal 3,
- menetapkan tujuan-tujuan kerjasama luar negeri UE dalam segala aspek hubungan internasional sebagaimana tertulis dalam Pasal 21,
- pendirian perwakilan keluar UE terkait Kebijakan Bersama Luar Negeri dan Keamanan sebagaimana tertulis dalam Pasal 15 dan Pasal 17,

¹⁷http://ec.europa.eu/archives/emu_history/documents/treaties/rometreaty2.pdf, diakses pada 04 Agustus 2015

¹⁸David Pinnemore. "The European Union: Establishment and Development" dalam Michelle Cini and Nieves P.S. Borragán (Eds). *European Union Politics*. Oxford: University Press, 2009. Halaman 36

¹⁹http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treaty_on_european_union/treaty_on_european_union_en.pdf, diakses pada 05 Agustus 2015

- penunjukkan Perwakilan Tinggi UE untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan (*High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 dan Pasal 27
- penentuan proses dan tujuan Kebijakan Bersama Luar Negeri dan Keamanan UE sebagaimana terbaca dalam Bab 2 Ketentuan Spesifik Kebijakan Bersama Luar Negeri dan Keamanan UE,
- penetapan Kebijakan Bersama Keamanan dan Pertahanan sebagai bagian dari Kebijakan Bersama Luar Negeri dan Keamanan UE di dalam Bagian 2 Bab 2 Ketentuan Spesifik Kebijakan Bersama Luar Negeri dan Keamanan UE.

Berdasarkan kesiapan UE ditinjau dari pedoman-pedoman dan peraturan-peraturan dasar dalam Traktat maka tidak mengherankan UE telah berani melakukan aksi-aksi kerjasama internasional yang ekspansif dengan pihak asing diluar negara-negara keanggotaan, baik dengan negara, kumpulan negara-negara, organisasi antar pemerintah dan organisasi non pemerintah.

Sejarah Singkat Kerjasama UE-ASEAN

Dalam tulisannya Lay Hwee Yeo mengatakan bahwa hubungan UE dan ASEAN telah mengalami pasang dan surut sejak awal kerjasama dalam bentuk dialog informal pada tahun 1972. Hubungan ini pada permulaannya berkisar tentang isu-isu perdagangan dan akses pasar dan berkembang menuju dialog politik dan kerjasama fungsional. Ia juga membagi hubungan kerjasama UE dan ASEAN dalam 4 fase, yakni²⁰:

1) Fase Pertama (1972-1980)

Dialog MEE dan ASEAN pertama kali berlangsung pada tahun 1972 antara Menteri-Menteri ASEAN dan Wakil Presiden dan Komisioner ME yang juga rekan dialog pertama ASEAN. Dialog dimaksudkan untuk memperoleh akses pasar yang lebih luas bagi ekspor ASEAN dan skema stabilisasi harga untuk komoditas-komoditas utama ASEAN.

Pada tahun 1975 dibentuk *Joint Study Group* yang mengkaji tidak hanya pada masalah-masalah perdagangan namun juga pada aspek sumber daya alam dan pembiayaan proyek-proyek ASEAN.

Pada tahun 1978 dikukuhkan Pertemuan Menteri-Menteri ASEAN-ME/*AEMM (ASEAN-EC Ministerial Meeting)* yang kemudian menyusun dan menandatangani Kesepakatan Kerjasama ASEAN-ME/*ASEAN-EC Cooperation Agreement* pada pertemuan kedua di Kuala Lumpur bulan Maret 1980.

2) Fase Kedua (1980-1991)

Penandatanganan Kesepakatan Kerjasama ASEAN-ME 1980 menandai awal tahapan baru kerjasama pada aspek ekonomi dan pembangunan. Kesepakatan tersebut juga membuka saluran eksklusif pertukaran informasi dan permintaan terhadap bantuan ME dalam beberapa proyek pembangunan sebagai jalur kedua kerjasama. Kesepakatan tersebut membentuk sasaran kerjasama komersial, ekonomi dan teknis; dan Panitia Kerjasama Bersama *//Joint Cooperation Committee (JCC)* sebagai mekanisme untuk mengawasi kerjasama ASEAN-ME.

²⁰Lay Hwee Yeo. "Political Cooperation Between the EU and ASEAN: Searching for a Long-Term Agenda and Joint Projects" in Paul J. Welfens, et.al (eds). *EU-ASEAN: Facing Economic Globalisation*. Berlin-Heidelberg: Springer, 2009. Halaman 45-49

Walaupun secara ekonomi kerjasama ASEAN dan ME saat itu kurang diprioritaskan dibandingkan negara-negara di kawasan lain, namun kerjasama politik ASEAN dan ME merangkak lebih tinggi pada tahun 1980-an untuk menghadapi ancaman ekspansi Uni Soviet, yaitu invasi Vietnam ke Kamboja dan invasi Uni Soviet ke Afganistan. Pada pertemuan AEMM 1980 dikeluarkan pernyataan bersama yang mengejutkan terkait penyesalan atas intervensi bersenjata Kamboja dan Afganistan serta menuntut penarikan Uni Soviet dan Vietnam. Kedua isu ini menjadi subyek diskusi politik yang dominan pada setiap pertemuan AEMM.

3) Fase Ketiga (1991-2001)

Peristiwa Timor Timur, perbedaan pendapat terkait Myanmar dan politisasi kebijakan bantuan dan kerjasama ekonomi sebagai “neo-kolonialisme” telah memperburuk hubungan politik antara UE dan ASEAN pada awal 1990an.

Di saat yang sama, di Eropa muncul semangat kejayaan menyusul rubuhnya Tembok Berlin, pecahnya Uni Soviet serta gelombang demokrasi di negara-negara bekas Komunis di Eropa Tengah dan Eropa Timur.

Begitu pun di ASEAN, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan dinamisme yang menyeluruh serta pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur telah membuat kawasan ini lebih percaya diri dan tegas dalam menentang dan menantang keputusan dan aksi negara-negara Barat.

Situasi-situasi tersebut memunculkan diskusi yang hangat pada pertemuan AEMM Kesembilan tahun 1991 dan Kesepuluh tahun 1992 terkait Timor Timur dan persyaratan baru kebijakan bantuan dan kerjasama MEE.

Citrabawa ASEAN adalah kawasan yang stabil dan menguntungkan bagi investasi Eropa muncul pasca penetapan AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) pada Konferensi Tingkat Tinggi tahun 1992 di Singapura dan AIA (*ASEAN Investment Area*). Pesan tersebut menjadi perhatian 4 negara besar UE (Inggris, Jerman, Prancis dan Italia) untuk mengutamakan masalah pragmatis ekonomi dan menyampingkan masalah politik yang sensitif. Akibat dari citra tersebut pun menggeser kebijakan UE terhadap Asia tercermin dalam *EC Communications 1994 “Toward a New Asia Strategy”* yang menandai sebuah langkah awal kerjasama baru Eropa dan ASEAN.

Pergeseran ini tercermin pada AEMM ke 11 di Karlsruhe bulan September 1994 dimana isu terkait Timor Timur dan HAM tidak dibahas secara mendalam. Pada pertemuan ini disepakati untuk melanjutkan dan mengembangkan kerjasama melalui *ASEAN-UE Eminent Group* yang ditugaskan untuk mengembangkan pendekatan yang menyeluruh terkait hubungan ASEAN-UE menyongsong tahun 2000 dan seterusnya.

Lebih lanjut, rekomendasi dalam laporan EEP 1996 tentang “*A Strategy for a New Partnership*” dan Komunikasi antara Komisi UE dan Dewan UE tentang “*Creating a New Dynamic in EU-ASEAN relations*” pada akhirnya menghasilkan ukuran-ukuran yang nyata.

Peristiwa krisis keuangan Asia, perluasan ASEAN yang memasukkan Kamboja, Laos dan Myanmar begitupula perluasan UE telah merubah gerak dasar dan mempengaruhi lebih lanjut keadaan kerjasama ASEAN-UE.

Walaupun muncul periode yang stagnan pada awal abad 21, perubahan dinamika antar kedua kawasan “memaksa” ASEAN dan UE untuk sekali lagi meletakkan perhatian pada hubungan keduanya.

4) Fase Keempat (2002-sekarang)

Fase keempat dikenal juga dengan fase rediscovery dan fase mencari agenda jangka panjang yang menghubungkan kedua kawasan lebih dekat.

Pada masa terkini, kerjasama ASEAN dan UE lebih meluas daripada hanya sekedar pada tataran pembuatan kebijakan ekonomi dan politik dan sedikit pada implementasi. Beberapa tindakan nyata dilakukan UE terkait dengan ASEAN antara lain:

- Keterlibatan UE dalam menyelesaikan konflik di Aceh antara GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan Pemerintah Indonesia.
Keterlibatan UE dalam penyelesaian konflik Aceh dimulai sejak dipilihnya CMI (*Crisis Management Initiative*) yang berasal dari Finlandia dan yang dikepalai oleh Marti Ahtasaari, seorang mantan Presiden Finlandia. Keterlibatan UE berlanjut dengan bekerjasama dengan ASEAN untuk membentuk AMM (*Aceh Monitoring Mission*) yang dikepalai oleh Pieter Feith.²¹
- Penunjukkan duta besar UE untuk ASEAN sebagai delegasi (perwakilan) UE pada tahun 2009. Delegasi ini mewakili, menjelaskan dan mengimplementasi kebijakan-kebijakan luar negeri UE. Delegasi ini menganalisa dan melaporkan kebijakan-kebijakan dan perkembangan-perkembangan ASEAN dan melakukan negosiasi sesuai dengan mandat yang diberikan.²²

Implementasi Sokongan UE untuk Masyarakat ASEAN

Motivasi UE Menyokong Masyarakat ASEAN

Masyarakat ASEAN merupakan sebuah visi yang ingin dicapai oleh negara-negara anggota ASEAN yang dirumuskan pada KTT ASEAN tahun 2003 di Bali dan tercantum dalam Kesepakatan Bali II (*Bali Concord II*). Kesepakatan itu berisi tentang pembentukan Masyarakat ASEAN yang terdiri atas pilar; 1). *Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN/ASEAN Political Security Community*, 2). *Masyarakat Ekonomi ASEAN/ASEAN Economic Community*, dan, 3). *Masyarakat Sosial Budaya ASEAN/ASEAN SocioCultural Community*. Pelaksanaan Masyarakat ASEAN ini dipercepat pelaksanaannya pada tahun 2015 dari awalnya pada tahun 2020 melalui KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina.

Dukungan UE terkait Masyarakat ASEAN telah tampak dalam kebijakan Komisi Eropa yang berjudul "*A new partnership with South East Asia*" pada tahun 2003, semasa dengan pembentukan Masyarakat ASEAN. Walaupun dalam kebijakan tersebut belum terdapat pernyataan terkait dukungan UE atas Masyarakat ASEAN, namun setidaknya dalam kebijakan tersebut UE telah mendukung terbentuknya integrasi kawasan di Asia Tenggara.

Menurut dokumen tersebut dinyatakan bahwa UE akan menyediakan bantuan keahlian yang terkait integrasi kawasan jika diminta oleh ASEAN. Bantuan ini dikarenakan UE berpendapat ASEAN yang kuat adalah mungkin sebuah jaminan yang terbaik atas perdamaian dan stabilitas kawasan.²³ Komitmen terhadap integrasi kawasan juga dinyatakan sebagai manifestasi yang paling jelas atas kesamaan kepentingan dan nilai-nilai yang dimiliki UE dan ASEAN. Kedua kawasan menyadari bahwa sebuah kesatuan kawasan adalah jalan terbaik untuk meneruskan pembangunan ekonomi, menguatkan keamanan mereka—baik antar mereka sendiri ataupun dengan tetangga-tetangganya—dan untuk memiliki suara yang lantang dalam urusan-urusan dunia. Oleh karena itu, kedua kawasan melakukan sebuah proses integrasi kawasan.²⁴

²¹Kerjasama ASEAN dan UE dalam penyelesaian konflik Aceh dalam Irwan Iskandar. *The European Union: Role and Achievement in Promoting Peaceful Condition between GAM (Gerakan Aceh Merdeka)/Free Aceh Movement and Government of Indonesia (GoI) in Nanggroe Aceh Darussalam Province, Indonesia*. Tesis. Bremen: University of Applied Sciences Bremen, 2011.

²²http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm, diakses pada 18. Agustus 2015.

²³COMMUNICATION FROM THE COMMISSION: *A new partnership with South East Asia*, halaman diakses dari http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2004/july/tradoc_116277.pdf, pada 21.08.2015,

²⁴*Ibid*, halaman 11

Penjelasan diatas mendukung argumen bahwa UE memperhatikan progres perdamaian dan stabilitas di kawasan ASEAN yang disandarkan pada traktat-traktat UE mulai dari Traktat Maastricht hingga Traktat tentang UE dan Traktat tentang Pengfungsiian UE. Sehingga, telah menjadi suatu syarat bagi UE ketika akan menjalin kerjasama dengan pihak kedua akan melihat kesesuaian nilai-nilai dan kepentingan yang dimiliki dengan pihak lain tersebut. Kesamaan nilai dan kepentingan akan menjadi dasar utama.

Lebih lanjut, langkah dan kedalam integrasi kawasan dalam ASEAN kadang kala menimbulkan rasa ketidaksabaran di Eropa. Walaupun demikian, memang, proses integrasi Eropa berbeda dengan ASEAN. Sehingga pada saat itu, pengharapan yang tidak realistis janganlah dibebankan terhadap ASEAN dan sekretariatnya. Negara-negara ASEAN lah yang akan menentukan isi dan ritme proses yang sebenarnya yang diinginkan untuk dikembangkan diantara mereka. UE harus berdiri siap untuk mendukung penuh integrasi ASEAN dengan pemikiran yang terbuka dan pada bidang-bidang dimana asistensi diminta, terutama pada pengalaman integrasi kawasan dan menyediakan asistensi teknis. UE juga mengembangkan dialog dari kawasan ke kawasan dan proses kerjasama. Memilih ASEAN sebagai kerangka kerja untuk melakukan dialog kebijakan dan kegiatan-kegiatan kooperatif yang sudah ditargetkan akan secara mendasar merangsang regionalisme melalui kegiatan-kegiatan yang dikembangkan dan disusun secara bersama. Sehingga, dialog politik seharusnya terkonsentrasi pada subyek-subyek kepentingan dan perhatianantar kawasan, dan meninggalkan isu-isu global untuk ASEM (*Asia-Europe Meeting*).²⁵

UE dan ASEAN memang dikenal sebagai dua kawasan yang mendukung inisiatif terjadinya integrasi kawasan. Oleh karena itu, UE dan ASEAN merupakan rekan yang alami dan memiliki kesamaan DNA. Kesamaan DNA tersebut ada pada tujuan yang ingin diwujudkan yakni perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan.²⁶

Kondisi kawasan yang damai, stabil dan aman dapat menghadirkan peluang-peluang baru termasuk pertumbuhan ekonomi dan dinamisasi demografi. Hal ini disadari oleh UE sehingga ikut mengambil peran dalam menyukseskan integrasi kawasan di ASEAN. UE menyadari kemampuan ASEAN sebagai ekonomi terbesar ketujuh dunia dan menjadi ekonomi terbesar keempat dunia pada tahun 2050.²⁷ Ditambah lagi, UE merupakan mitra dagang ASEAN terbesar ketiga pada tahun 2011 dengan nilai perdagangan diantara keduanya sebesar € 215 miliar atau US \$ 281 miliar. Disamping itu, UE menjadikan ASEAN sebagai tujuan dagang terbesar kelima dan menjadi sumber penanaman modal asing langsung (*foreign direct investment*) ASEAN.²⁸

Mengingat besarnya nilai ekonomi yang terjalin antara UE dan ASEAN, maka tidak heran pula jika UE pun turut mendukung terwujudnya pasar tunggal (*single market*) di ASEAN. Pasar tunggal ASEAN tersebut nantinya memiliki 600 juta konsumen dan kelas menengah yang terus berkembang. Tentunya hal ini akan menawarkan kesempatan investasi dan ekspor yang luas bagi bisnis Eropa.²⁹ Pasar tunggal tersebut tentunya akan hadir apabila Masyarakat ASEAN terwujud.

²⁵*Ibid*, halaman 12

²⁶EU-ASEAN: *Natural Partners*, halaman 1, diakses dari http://eeas.europa.eu/asean/docs/eu_asean_natural_partners_en.pdf, pada tanggal 16 Agustus 2015

²⁷JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL. *The EU and ASEAN: a partnership with a strategic purpose*, halaman 2, diakses dari <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=JOIN:2015:22:FIN&from=EN>, pada tanggal 18 Agustus 2015

²⁸EU-ASEAN: *Natural Partners. Op.cit.*, halaman 3

²⁹*Ibid*, halaman. 5

Selain pasar yang besar, ASEAN juga menawarkan kesempatan sumber daya manusia yang banyak. ASEAN terutama Indonesia merupakan penyedia tenaga kerja produktif yang siap berkarya apabila diberdayakan sebaik mungkin yang tentu saja akan meningkatkan perekonomian.

Dalam beberapa dekade mendatang, negara-negara ASEAN akan memiliki penduduk berusia emas (25 tahun hingga 54 tahun) lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya dan rasio ketergantungan penduduk pun akan turun. Sehingga, kondisi demografi ini akan membuka kesempatan untuk peluang investasi sumber daya yang lain.³⁰

Upaya-Upaya UE dalam Menyokong Masyarakat ASEAN

Keaktifan UE dalam menyokong Masyarakat ASEAN tampak dari berbagai dialog dan kesepakatan yang terjalin di antara kedua kawasan. Pada sidang AEMM ke-19 tertanggal 26-27 April 2012 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, UE dan ASEAN menyepakati *Bandar Seri Begawan Plan of Action to Strengthen the ASEAN-EU Enhanced Partnership (2013-2017)* yang berfokus lebih strategis pada kerjasama tingkat kawasan dalam area-area yang lebih luas; politik/keamanan, ekonomi/perdagangan dan sosial-budaya. Kesepakatan ini diarahkan oleh *Nuremberg Declaration* yang menetapkan visi dan komitmen jangka panjang kedua belah pihak untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan dan sasaran bersama di masa depan.³¹

UE telah melakukan beberapa langkah yakni; bantuan keuangan untuk proses integrasi, antara lain:

- UE telah berkontribusi dalam upaya pelaksanaan tiga pilar dalam Cetak Biru (*Blueprints*) ASEAN sejak tahun 2007 hingga 2013 dengan bantuan keuangan sebesar € 70 juta untuk tiga Masyarakat dalam Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*).³² Bantuan ini rencananya akan mengalami peningkatan pada penganggaran berikutnya dari tahun 2014 hingga 2020 yang akan digunakan pada upaya mendukung integrasi ASEAN dan Kesekretariatan ASEAN sebesar € 170 juta.³³
- Program ARISE
Program ARISE (*the ASEAN Regional Support from the EU*) merupakan sebuah program UE yang dijalankan dari November 2012 hingga tahun 2016 dan menggunakan anggaran sebesar € 15 juta. Tujuan program ini adalah untuk mendukung pelaksanaan inisiatif integrasi kawasan yang utama yang diprioritaskan dalam *Master Plan for ASEAN Connectivity* dalam membangun pasar tunggal ASEAN dan berbasis produksi. Program ini melibatkan beberapa organ ASEAN seperti Sekretariat ASEAN, *the Committee of Permanent Representatives* dan organ-organ ASEAN lainnya.³⁴ Program ini merupakan kelanjutan dari Program APRIS (*the ASEAN Programme for Regional Integration Support*) yang menghabiskan anggaran € 7,2 juta dari tahun 2006 hingga 2010 yang mendukung pendirian Masyarakat Ekonomi ASEAN.³⁵

³⁰ASEAN Economic Outlook: Are Southeast Asian Countries Set To Reap The Demographic Dividend?, diakses dari <http://www.ibtimes.com/asean-economic-outlook-are-southeast-asian-countries-set-reap-demographic-dividend-1458638>, pada tanggal 29 Agustus 2015

³¹Overview of ASEAN-EU Dialogue Relations, diakses dari www.asean.org/news/item/overview-of-asean-eu-dialogue-relations pada tanggal 16 Agustus 2015

³²EU-ASEAN: Natural Partners. *Op.cit.*, halaman 4

³³The EU - ASEAN relationship in twenty facts and figures, diakses dari http://eeas.europa.eu/asean/docs/key_facts_figures_eu_asean_en.pdf, pada tanggal 16 Agustus 2015

³⁴Programme Objectives, diakses dari <http://arise.asean.org/about-arise/>, pada tanggal 04 September 2015

³⁵EU-ASEAN: Natural Partners. *Op.cit.*, halaman 7

- Program migrasi dan pengelolaan perbatasan UE-ASEAN/*EU-ASEAN Migration and Border Management Programme*
Program ini meliputi dukungan kepada INTERPOL, pertukaran informasi antar pegawai imigrasi di ibukota-ibukota ASEAN dan dukungan terhadap kemudahan persyaratan visa untuk negara-negara ASEAN dan non ASEAN di dalam kawasan. Anggaran yang digunakan sebesar € 4,7 juta dengan rentang waktu dari tahun 2012 hingga tahun 2015.³⁶ Sebuah program dalam mendukung agenda konektivitas antar masyarakat ASEAN dengan memperkuat jaringan lembaga-lembaga penegakan hukum dan kerjasama pada pusat penghubung transit kawasan pun sedang dirancang. Anggaran yang akan digunakan sebesar € 3,4 juta.³⁷ Program-program ini akan memfasilitasi pasar tunggal ASEAN.³⁸
- Program *Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument (READI) Facility*
Program ini telah dijalankan dari tahun 2011 hingga 2014 menggunakan anggaran € 3,4 juta. Program ini mendukung dialog kebijakan dan perkembangan pengetahuan (seperti; kunjungan belajar, program pertukaran) dalam area Pengurangan Resiko Bencana/*Disaster Risk Reduction (DRR)*, IPTEK, TIK, dan energi. Program ini juga meliputi perubahan iklim, pendidikan, kerjasama maritim dan HAM melalui jaringan kerjasama, dialog dan seminar-seminar, sehingga dapat mengintensifkan dialog kebijakan dan berbagi pengalaman antara UE dan ASEAN.³⁹
Program EU Support to Higher Education in ASEAN Region (EU SHARE)
Program ini merupakan sebuah program dalam bidang pendidikan tinggi yang berkontribusi dalam pengharmonisasian sistem pengakuan antara institusi pendidikan tinggi di ASEAN. Program ini akan memperbaiki tingkat perbandingan kualifikasi universitas dan peringanan transferring credits antara satu universitas dengan yang lainnya, melalui sistem yang disebut *Qualification Framework, Quality Assurance* dan *Credit Transfer system*. Program ini bernilai € 10 juta dengan masa pelaksanaan dari 2013 hingga 2017.⁴⁰ Melalui program ini UE mendukung terwujudnya Jaringan Antar Universitas ASEAN/*ASEAN Inter-University Network*.⁴¹

Penutup

Pergerakan politik global pasca PD II makin kompleks seiring munculnya berbagai macam aktor politik internasional, seperti organisasi kawasan yang terdiri dari berbagai negara-bangsa. Salah satu aktor internasional berbentuk organisasi kawasan tersebut yaitu UE. Sebagai sebuah organisasi kawasan, UE cukup menarik perhatian akademisi hubungan internasional. Selain dikarenakan faktor kebijakan ke dalam kawasan (intra regional), faktor kebijakan ke luar kawasan (ekstra regional), termasuk kebijakan antara kawasan (inter regional), terus menjadi perhatian pengamat UE.

Salah satu perhatian tertuju pada Kebijakan UE terkait ASEAN yang terus mengalami fluktuasi sejak awal dialog pada tahun 1972. Kerjasama antara kedua kawasan itu pun memasuki tahap baru ketika ASEAN pada tahun 2003 melalui Bali Concord memutuskan untuk melaksanakan Masyarakat ASEAN yang meliputi Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN.

³⁶*The EU - ASEAN relationship in twenty facts and figures, op.cit.*

³⁷*EU-ASEAN: Natural Partners. Ibid*, halaman 8

³⁸*Mapping EU-ASEAN Relations*, halaman 9, diakses dari http://fride.org/descarga/Mapping_EU_ASEAN_Relations.pdf, pada tanggal 04 September 2015.

³⁹*EU-ASEAN: Natural Partners. Op.cit.*, halaman 8

⁴⁰*ibid*

⁴¹*The EU - ASEAN relationship in twenty facts and figures, op.cit.*

UE sebagai mitra ASEAN turut mendukung Masyarakat ASEAN dikarenakan kebijakan ASEAN tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan kepentingan UE, ditambah lagi konsep tiga pilar yang diajukan Masyarakat ASEAN pun pernah diterapkan UE dalam bentuk yang hampir sama. Dengan mendukung Masyarakat ASEAN, UE telah berinvestasi dalam pasar tunggal ASEAN yang besar sebagai hasil logis penerapan kebijakan ASEAN tersebut.

Dukungan yang diberikan UE dapat ditemui dalam hibah dana langsung ataupun dalam bentuk program-program yang meliputi ketiga pilar Masyarakat ASEAN.

Daftar Referensi

Data Resmi UE dan ASEAN:

- http://ec.europa.eu/archives/emu_history/documents/treaties/rometreaty2.pdf,
http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm,
EU-ASEAN: *Natural Partners*, diakses dari
http://eeas.europa.eu/asean/docs/eu_asean_natural_partners_en.pdf,
Joint Declaration of the ASEAN-EU Commemorative Summit, diakses dari
http://eeas.europa.eu/asean/docs/joint_decl_summit07.pdf.
The EU - ASEAN relationship in twenty facts and figures, diakses dari
http://eeas.europa.eu/asean/docs/key_facts_figures_eu_asean_en.pdf,
Bandar Seri Begawan Action Plan of Action to Strengthen the ASEAN-EU Enhanced Partnership (2013-2017), diakses dari
http://eeas.europa.eu/asean/docs/plan_of_action_en.pdf,
The European Union and the Association of South East Asian Nations: Towards an Ever Stronger Natural Partnership, diakses dari
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140722_03_en.pdf
http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_en.htm,
http://europa.eu/about-eu/eu-history/1945-1959/1951/index_en.htm,
http://europa.eu/about-eu/eu-history/1945-1959/1952/index_en.htm,
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/deepening_european_integration_en.htm,
http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treaty_on_european_union/treaty_on_european_union_en.pdf,
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION: A new partnership with South East Asia, diakses dari
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2004/july/tradoc_116277.pdf,
JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL. The EU and ASEAN: a partnership with a strategic purpose, diakses dari <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=JOIN:2015:22:FIN&from=EN>,
Overview of ASEAN-EU Dialogue Relations, diakses dari
www.asean.org/news/item/overview-of-asean-eu-dialogue-relations
APRIS II: The ASEAN Programme for Regional Integration Support Phase II, diakses dari www.asean.org/apris2/index.htm

Jurnal dan Publikasi Ilmiah:

- Fawcett, Louise (a). *Regionalism in World Politics: Past and Present*, diakses dari <http://www.garnet-eu.org/pdf/Fawcett1.pdf>,
Fawcett, Louise. 2005 (b). "Regionalism from an Historical Perspective" dalam Mary Farrel, Björn Hettne and Lukman van Langenhove (Ed). *Global Politics of Regionalism: An Introduction*. London: Pluto Press.

SPEKTRUM

Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional
Volume 13 No. 1 Januari 2016

- Fjäder, Christian. 2012. "Regionalism in Asia and Europe in a Theoretical Perspective: 'Rationalist' and 'Ideational' Approaches", in *Asia-Pacific Journal of Financial Studies*, diakses dari http://www.researchgate.net/profile/Christian_Fjaeder/publication/236161719_Regionalism_in_Asia_and_Europe_in_a_Theoretical_Perspective_%27Rationalist%27_and_%27Ideational%27_Approaches/links/0c96051695d45eb9bc00000.pdf.
- Walt, S. M. 1998. "International Relations: one world, many theories" in Little R and Smith, M (eds). *Perspective on World Politics*, 3rd Edition. London: Routledge, dalam Christian Fjäder. "Regionalism in Asia and Europe in a Theoretical Perspective: 'Rationalist' and 'Ideational' Approaches", in *Asia-Pacific Journal of Financial Studies*. 2012, diakses dari http://www.researchgate.net/profile/Christian_Fjaeder/publication/236161719_Regionalism_in_Asia_and_Europe_in_a_Theoretical_Perspective_%27Rationalist%27_and_%27Ideational%27_Approaches/links/0c96051695d45eb9bc00000.pdf.
- Hänggi, DR. Heiner. *Interregionalism: Empirical and Theoretical Perspective*, diakses dari <http://www.cap.lmu.de/transatlantic/download/Haenggi.PDF>.
- Rüland, Jürgen. "The EU as Inter-Regional Actor: The Asia-Europe Meeting (ASEM), Paper Prepare for the International Conferences "Asia-Europe on the Eve of the 21st Century, Bangkok, 19-20 August 1999, di dalam DR. Heiner Hänggi. *Interregionalism: Empirical and Theoretical Perspective*, diakses dari <http://www.cap.lmu.de/transatlantic/download/Haenggi.PDF>.
- Iskandar, Irwan. 2011. "The European Union: Role and Achievement in Promoting Peaceful Condition between GAM (Gerakan Aceh Merdeka)/Free Aceh Movement and Government of Indonesia (GoI) in Nanggroe Aceh Darussalam Province, Indonesia." *Tesis*. Bremen: University of Applied Sciences Bremen.

Buku-buku:

- Cini, Michelle and Nieves P.S. Borragán (Eds). 2009. *European Union Politics*. Oxford: University Press.
- Pinnemore, David. "The European Union: Establishment and Development" dalam Cini, Michelle and Nieves P.S. Borragán (Eds). 2009. *European Union Politics*. Oxford: University Press.
- Nuraeni S., Deasy Silvy dan Arifin Sudirman. 2010. *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yeo, Lay Hwee. 2009. "Political Cooperation Between the EU and ASEAN: Searching for a Long-Term Agenda and Joint Projects" in Paul J. Welfens, et.al (eds). *EU-ASEAN: Facing Economic Globalisation*. Berlin-Heidelberg: Springer.
- Blair, Alasdair. 2005. *The European Union since 1945*. Edinburgh: Pearson Education Limited.
- Warleigh, Alex. 2009. *European Union: the basics*. New York: Routledge.

Situs-situs:

- Zhang, Moran. *ASEAN Economic Outlook: Are Southeast Asian Countries Set To Reap The Demographic Dividend?*, diakses dari <http://www.ibtimes.com/asean-economic-outlook-are-southeast-asian-countries-set-reap-demographic-dividend-1458638>,
- Programme Objectives*, diakses dari <http://arise.asean.org/about-arise/>,
- Khandekar, Gauri. *Mapping EU-ASEAN Relations*, diakses dari http://fride.org/descarga/Mapping_EU_ASEAN_Relations.pdf,
- Fitriani, Evi. *The impact of EU crisis on EU-ASEAN Relations*, diakses dari http://moderndiplomacy.eu/index.php?option=com_k2&view=item&id=423:the-impact-of-eu-crisis-on-eu-asean-relations&Itemid=490,

SPEKTRUM

Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional
Volume 13 No. 1 Januari 2016

Mathuros, Fon. ASEAN Economic Community 2015 Poised to Surpass EU in the Next Decade diakses dari <https://agenda.weforum.org/news/asean-economic-community-2015-poised-to-surpass-eu-in-the-next-decade/>

POPULISME DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI DI INDONESIA

Imelda Masni Juniaty Sianipar, M.A.
Dosen Universitas Kristen Indonesia

Abstrak

Pada 20 Oktober 2014 lalu, Joko Widodo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono yang telah berakhir masa pemerintahannya karena telah memimpin selama dua periode. Joko Widodo berhasil memperoleh suara mayoritas masyarakat Indonesia dan mencapai kekuasaan karena diyakini memiliki gaya kepemimpinan populis yaitu pemimpin yang pro rakyat. Kehadiran pemimpin populis dikancah perpolitikan internasional tentu perlu mendapat perhatian serius dari negara-negara lain. Pasalnya, pemimpin populis sering diidentikkan dengan pemimpin yang otoriter, anti imperialisme dan anti pasar. Kehadiran pemimpin populis radikal seperti Hugo Chavez dari Venezuela dan Mahmoud Ahmadinejad dari Iran mendapat perhatian serius dari negara-negara lain di dunia terutama dari Amerika Serikat. Kebijakan luar negeri Chavez dan Ahmadinejad cenderung mengarah pada anti-imperialisme dan anti Amerika Serikat sehingga kebijakan luar negeri kedua pemimpin populis tersebut perlu diwaspadai. Apakah pemimpin populis baru Indonesia, Joko Widodo memiliki kebijakan luar negeri seperti itu. Tulisan ini akan mengidentifikasi dan meneliti arah kebijakan luar negeri Joko Widodo. Tulisan ini berargumen bahwa Joko Widodo merupakan pemimpin populis rasional. Joko Widodo memiliki karakter yang terbuka terhadap pihak asing tetapi tetap mengedepankan kepentingan nasional. Dengan demikian, Indonesia dibawah kepemimpinan Joko Widodo tidak akan menjadi ancaman bagi pihak asing tetapi justru bisa bekerjasama dengan baik untuk mencapai kepentingan nasional bersama. Tulisan ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data-data yang digunakan oleh penulis adalah data-data sekunder berupa buku, dokumen, surat kabar, artikel, dan lain-lain yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Tulisan ini akan menggunakan konsep populisme dan kebijakan luar negeri untuk menjelaskan keterkaitan populisme dan kebijakan luar negeri di Indonesia tersebut.

Keywords: populisme, kebijakan luar negeri, Indonesia, Joko Widodo, populis rasional

Pendahuluan

Pada tanggal 20 Oktober 2014 lalu, Joko Widodo dan Jusuf Kalla dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia ke-7 menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Joko Widodo-Jusuf Kalla memperoleh suara sebesar 53,5 %, sementara pesaingnya Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendapat suara sebesar 46,85 %. Mayoritas rakyat Indonesia memilih Jokowi karena Jokowi diyakini merupakan pemimpin populis yaitu pemimpin yang peduli pada rakyat kecil.

Kehadiran pemimpin populis di kancah perpolitikan baik nasional maupun internasional memiliki efek positif dan negatif. Efek positifnya adalah pemimpin populis cenderung memiliki semangat nasionalisme yang tinggi.

Pemimpin populis juga akan berusaha menjaga kepentingan nasional negaranya dari intervensi pihak asing. Karenanya tidak mengherankan jika pemimpin populis sering melakukan tindakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Hal tersebut dilakukan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan dana agar dapat memenuhi kebutuhan rakyat kecil yang merupakan pengikutnya.

Sementara efek negatifnya adalah pemimpin populis memiliki potensi untuk menjadi pemimpin otoriter dan anti pihak asing. Hal ini pernah terjadi di Venezuela dan Iran. Ketika Hugo Chavez terpilih sebagai presiden pada tahun 1998, Chavez menjalankan kebijakan luar negeri yang anti pihak asing. Chavez juga menasionalisasi perusahaan minyak dan gas dari Amerika.

Hal ini berefek pada munculnya ketegangan antara Venezuela dan Amerika Serikat. Demikian pula halnya dengan Mahmoud Ahmadinejad dari Iran. Ketika terpilih sebagai presiden Iran, Ahmadinejad menyerukan sikap anti Amerika. Ahmadinejad menyerukan sikap tersebut karena Amerika Serikat dinilai terlalu berupaya untuk mengintervensi Iran. Hal ini kemudian menimbulkan ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat.¹

Berkaca dari fakta diatas maka tulisan ini akan menyoroati arah kebijakan luar negeri Indonesia terhadap pihak asing. Apakah Joko Widodo akan menjalankan sikap yang menentang atau justru kooperatif terhadap pihak asing. Arah kebijakan luar negeri Joko Widodo akan menentukan bentuk hubungan yang akan tercipta antara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia terutama dengan Amerika Serikat.

Definisi Populisme

Populisme (*populis* dalam bahasa latin) merupakan sebuah istilah yang masih diperdebatkan oleh para pakar ekonomi politik.² Berdasarkan pengalaman negara-negara di benua Amerika Latin, populisme diidentikkan dengan rezim personalistik yang tumbuh subur di era ISI (Industrialisasi Substitusi Import) pada tahun 1940-1960an. Populisme juga sering diartikan sebagai sebuah gerakan, sebuah rezim, seorang pemimpin atau bahkan sebuah negara yang mengklaim memiliki kedekatan dengan rakyat.³

Allan Knight (1998) berpendapat bahwa populisme merupakan sebuah gaya politik khusus yang memperlihatkan adanya kedekatan hubungan dengan rakyat.⁴ Kenneth M. Roberts (2007) menyatakan bahwa populisme merupakan mobilisasi politik massa dari atas ke bawah yang dilakukan oleh pemimpin personalistik untuk menentang sekelompok elit dengan mengatasnamakan penderitaan rakyat (*the top-down political mobilization of mass constituencies by personalistic leaders who challenge elite groups on behalf of an ill-defined pueblo, or "the people"*).⁵ Sedangkan Kurt Weyland (2001) berargumen bahwa populisme adalah strategi politik yang digunakan oleh pemimpin populis untuk mencapai kekuasaan dengan melakukan kontak langsung dengan massa yang tidak terorganisir (*a political strategy through which a personalistic leader seeks or exercises government power based on direct, unmediated uninstitutionalized support from large numbers of mostly unorganized followers*).⁶ Berdasarkan definisi Knight, Roberts dan Weyland tersebut nampak jelas bahwa populisme merupakan strategi yang digunakan oleh pemimpin untuk mencapai kekuasaan baik itu sebagai gaya politik maupun sebagai model penggerakan (mobilisasi) massa.

¹ Michael Dodson dan Manochehr Dorraj, "Populism and Foreign Policy in Venezuela, and Iran", *The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations*, Winter/Spring 2008, h. 71-73.

² Alan Knight, "Populism and Neo-populism in Latin America," *Journal of Latin American Studies*, 30, 2 (May 1998). h. 22.

³ Kurt Weyland, "Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics," *Comparative Politics*, 34, 1 (October 2001). h. 2.

⁴ Opcit., h. 22.

⁵ Kenneth M. Roberts, "Latin America's Populist Revival", *SAIS Review*, Vol. XXVII No. 1 (Winter-Spring 2007), h.5-6.

⁶ Weyland, Op.cit, h. 14.

Menurut Roberts, populisme memiliki lima karakteristik utama.⁷ *Pertama*, pola kepemimpinan populis bersifat personalistik dan paternalistik bahkan terkadang karismatik. *Kedua*, populisme merupakan aliansi politik multikelas dan heterogen yang mana pengikutnya merupakan masyarakat yang terkonsentrasi di daerah pinggiran. *Ketiga*, terjadi mobilisasi politik dari atas ke bawah. *Keempat*, ideologi yang diadopsi oleh pemimpin populis cenderung tidak jelas. *Kelima*, populisme merupakan proyek ekonomi yang menggunakan metode redistributif atau klientilistik untuk menciptakan fondasi materi bagi dukungan rakyat.

Varian Populisme

Populisme dalam beberapa tahun terakhir menjadi objek perdebatan para pakar ekonomi politik internasional. Populisme dikaitkan dengan adanya pergeseran ke kiri negara-negara di benua Amerika Latin pada penghujung tahun 1990an atau yang lebih dikenal dengan fenomena *Latin America's Turn Left*. Pergeseran ke kiri tersebut muncul karena para pemimpin negara-negara di benua Amerika Latin yang mengadopsi model neoliberalisme gagal mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Amerika Latin. Pengadopsian model neoliberalisme justru menggeser peran negara dalam aktivitas ekonomi dan politik, menyuburkan praktek korupsi dan memperlebar kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Ketiga hal tersebut memicu munculnya penolakan terhadap model neoliberalisme.

Untuk mengatasi hal tersebut, para pemimpin negara di benua Amerika Latin mencari model alternatif. Pilihan untuk bergeser ke kiri pun muncul. Kiri yang dimaksud disini adalah terdiri dari beberapa varian mulai dari sosial demokrat, populis hingga komunis.

Jorge Castaneda dalam artikelnya yang berjudul *Latin America's Turn Left* mengelompokkan kiri di Amerika Latin menjadi dua yaitu kiri moderat (*moderat left*) dan kiri radikal/populis (*left radical*). Yang dimaksud dengan kiri moderat adalah yang modern, terbuka, reformis dan internasionalis. Kelompok kiri moderat menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan di masa lalu dengan menolak bekerjasama dengan blok barat. Penolakan tersebut telah berefek pada merosotnya perekonomian negara karenanya mereka berupaya untuk mereformasi diri dan bersedia bekerjasama dengan blok barat. Pemimpin Amerika Latin yang termasuk dalam kelompok ini adalah Lula Da Silva dari Brazil. Kelompok kiri radikal merupakan kelompok yang memiliki keterkaitan dengan tradisi populisme Amerika Latin. Mereka adalah nasionalis, vokal dan tertutup. Pemimpin Amerika Latin yang termasuk dalam kelompok ini adalah Hugo Chaves dari Venezuela, Evo Morales dari Bolivia dan Rafael Correa dari Ekuador.⁸

Alvaro Vargas Llosa dalam artikelnya yang berjudul *Carnivores vs. Herbivores* menyebut kiri moderat sebagai kiri karnivora (*carnivores*) dan kiri radikal/populis sebagai kiri herbivore (*herbivores/vegetarian*). Menurut Llosa, kelompok kiri karnivora memiliki karakter yang keras dan tidak mau berkompromi dengan asing. Kelompok kiri karnivora memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan ketegangan etnis untuk mempertahankan pemerintahannya. Sedangkan kelompok kiri herbivore lebih lembut dan mau bekerjasama dengan pihak asing. Yang termasuk kedalam kiri karnivora adalah Chaves dan Morales. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok herbivore adalah Lula, Bachelet. Menurut Llosa, Argentina dibawah kepemimpinan Krichner berada diantara kelompok kiri karnivora dan kelompok kiri herbivora karena krichner menentang bekerjasama dengan pihak asing namun memiliki karakter kepemimpinan yang lembut.⁹

⁷ Kenneth M. Roberts, "Neoliberalism and the Transformation of Populism in Latin America: The Peruvian Case", Op.cit, hal. 88.

⁸ Jorge Castaneda, *Latin America's Turn Left*, Foreign Affairs, May/June 2006, h. 1-8.

⁹ Alvaro Vargas Llosa, *Carnivores vs. Herbivores*, http://www.ideasinactiontv.com/tcs_daily/2006/01/carnivores-vs-herbivores.html

Baik pemimpin kelompok kiri radikal maupun kelompok kiri moderat, keduanya mengklaim bahwa mereka adalah pemimpin populis dan memiliki kedekatan dengan rakyat. Mereka berjanji bahwa mereka akan berjuang bagi kesejahteraan rakyat kecil dan akan mengeluarkan mereka dari penderitaan.

Terkait dengan situasi politik di Indonesia, kehadiran pemimpin populis pun menjadi sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Pasalnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merupakan pemimpin sebelumnya dinilai terlalu sibuk membangun citra dan menjadi jauh dengan rakyat. Kredibilitas SBY semakin merosot ketika terbukti banyak pejabat di pemerintahannya yang tersangkut dengan kasus korupsi. Hal ini kemudian menimbulkan apatisme dalam diri masyarakat terhadap kepemimpinan SBY termasuk terhadap partainya yaitu Partai Demokrat.

Munculnya Jokowi sebagai pemimpin yang peduli dengan masyarakat khususnya masyarakat kecil dan kegemarannya melakukan *blusukan* ke tengah-tengah masyarakat untuk mendengarkan secara langsung keluhan masyarakat telah memberikan warna baru dalam wajah kepemimpinan politik Indonesia. Jokowi dinilai sebagai pemimpin populis dan dianggap mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan penggolongan yang dilakukan oleh Castaneda dan Ilosa terhadap pemimpin-pemimpin populis di benua Amerika Latin maka Jokowi dikategorikan sebagai pemimpin populis moderat atau populis herbivora. Adapun karakteristik populis yang dimiliki oleh Jokowi adalah sebagai berikut:

1. Jokowi menghargai nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia;
2. Jokowi memberikan subsidi secara hati-hati kepada masyarakat miskin;
3. Jokowi memprioritaskan terciptanya lapangan kerja bagi seluruh masyarakat terutama di daerah-daerah tertinggal.
4. Jokowi bersikap ramah dan mau bekerjasama dengan pihak asing termasuk Amerika Serikat;
5. Jokowi menentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang telah beroperasi di Indonesia.

Profil Singkat Jokowi

Joko Widodo atau yang akrab dikenal dengan Jokowi merupakan seorang tokoh yang muncul dari kalangan bawah menuju pentas politik nasional. Jokowi bukan keturunan bangsawan, bukan konglomerat, bukan ketua umum partai serta bukan seorang mantan Jenderal. Lalu apa yang membuat Jokowi menjadi populer bahkan kepopulerannya melebihi popularitas ketua umum partai pendukungnya, PDI-P Perjuangan, yaitu Megawati Soekarnoputri.

Pada awal keterlibatannya dalam politik, banyak orang meragukan kemampuan Jokowi. Beliau awalnya merupakan seorang pengusaha mebel dan kemudian memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai walikota Solo dengan Partai Politik PDI Perjuangan pada tahun 2005. Selama kepemimpinannya, kota Solo banyak mengalami kemajuan. Jokowi berhasil mengembangkan Solo yang buruk penataannya menjadi maju dan berkembang dan bahkan menjadikan Solo sebagai kajian di universitas luar negeri. Ide penataan kota Solo tersebut terinspirasi oleh pengamatannya terhadap pengembangan kota-kota di Eropa yang dikunjungi dalam rangka perjalanan bisnisnya. Pada Tahun 2006, Jokowi mengajukan Surakarta (Solo) menjadi anggota Organisasi Kota-kota warisan Dunia. Selanjutnya, Jokowi juga menjadikan Surakarta (Solo) sebagai Tuan Rumah Konferensi Organisasi Kota-kota warisan Dunia pada Oktober 2008.¹⁰

¹⁰ www.pemilu.com/profil/jokowi/. Diakses 4 November 2014.

Keberhasilan Jokowi mengembangkan kota Solo pada 2005-2012 mendorong PDI-P mencalonkan Jokowi sebagai kandidat gubernur DKI bersama dengan Basuki Tjahaja Purnama. Setelah melalui pemilihan 2 putaran pasangan Jokowi-Basuki berhasil menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mulai dari 15 Oktober 2012. Di Jakarta yang merupakan ibukota negara Republik Indonesia tersebut, Jokowi kembali memperlihatkan prestasinya. Jokowi melakukan berbagai penataan terhadap kota Jakarta antara lain dengan merelokasi warga di waduk Ria Rio Pulogadung, Jakarta Timur, ke Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Pinus Elok, Cakung dan warga sekitar Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara ke Rusun Marunda (megapolitan.kompas.com) Jokowi melakukan pembenahan transportasi umum Jakarta dengan meresmikan pembangunan Angkutan Massal Cepat (MRT) yang sebelumnya sempat tertunda selama bertahun-tahun dan pembangunan jalur hijau Monorel Jakarta sepanjang sebelas kilometer. Jokowi juga berencana untuk mengadakan seribu bus untuk jalur bis Transjakarta untuk mencukupi kebutuhan transportasi masyarakat Jakarta. Untuk memperbaiki pendidikan dan kesehatan, Jokowi meluncurkan program Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Kartu Jakarta Sehat memungkinkan masyarakat DKI Jakarta mendapat pelayanan paling dasar tanpa harus mengeluarkan uang banyak, sementara Kartu Jakarta Pintar adalah program terseleksi bagi murid yang tidak mampu agar mampu membeli peralatan dan kebutuhan pendidikan.¹¹

Prestasi demi prestasi yang dibuat oleh Jokowi menyebabkan popularitas Jokowi semakin meningkat. Hal ini memunculkan gagasan dari kelompok masyarakat tertentu untuk memajukan Jokowi sebagai calon Presiden RI pada Pemilu 2014. Berdasarkan survey CSIS yang dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1.180 responden di 33 provinsi pada 13-20 November 2013, dukungan yang menginginkan Jokowi menjadi presiden datang dari berbagai pihak. Pendukung Jokowi terbesar masih berasal dari PDI-P yaitu sebesar 63,6%, Partai Demokrat sebesar 42,7%, Partai Golkar sebesar 22,7% dan Partai Gerindra sebesar 20,6%. Menurut Philips. J. Vermonte, ada satu hal yang menarik dari hasil survey tersebut. *Pertama*, pendukung Jokowi berasal dari lintas partai. *Kedua*, dukungan terhadap Jokowi mengalahkan dukungan terhadap Ketua Umum PDI-P yaitu Megawati Soekarno Poetri. Melihat kenyataan ini, PDI-P hanya mempunyai satu pilihan yaitu mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden RI pada Pilpres 2014.

Menurut Marcus Meitzner, Jokowi menjadi tokoh dan idola masyarakat karena mampu merebut hati masyarakat yang kecewa terhadap kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam periode kedua kepemimpinannya. SBY sebagai presiden yang sebelumnya diharapkan mampu membawa gerbong reformasi menuju perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami kemunduran popularitas karena di era kepemimpinannya sarat dengan kasus korupsi. SBY dipandang sibuk membangun citra melalui berbagai media, dan kepemimpinan SBY dianggap semakin menjauh dari masyarakat. Masyarakat memperoleh jawaban dari fenomena gaya kepemimpinan Jokowi yang berempati, dekat dengan rakyat dan tidak bekerja di belakang meja.¹²

¹¹<http://news.liputan6.com/read/710305/jokowi-relokasi-warga-ria-rio-ke-rusun-pinus-elok-rampung>. Diakses 4 November 2014.

¹² Daud Anselmus, Jokowi Dimata Pengamat Asing, <http://www.tempokini.com/2014/05/jokowi-dimata-pengamat-asing/>. Diakses 4 November 2014.

Pendapat Meitzner tersebut sejalan dengan pemikiran Christian Von Lübke yang merupakan Peneliti Senior Fellow Departemen Ilmu Politik Universitas Freiburg. Von Lübke berpendapat bahwa kehadiran Jokowi ke pentas politik nasional merupakan jawaban terhadap kerisauan dan apatisme masyarakat terhadap praktek politik selama ini yang sarat dengan kasus-kasus pelanggaran hukum publik dan korupsi. Kehadiran Jokowi menuju puncak kekuasaan presiden Indonesia merupakan sebuah tanda munculnya pemimpin responsif dan partisipatif.¹³

Von Lübke mengamati paling tidak ada tiga aset politik yang dimiliki oleh Jokowi yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan popularitasnya. *Aset politik pertama* adalah Jokowi bukan berasal dari lingkaran penguasa masa lalu (Oligarki) sehingga Jokowi memiliki keleluasan menjadi pemimpin reformis. Jokowi bisa menjadi pemimpin bersifat pluralis melampaui batas-batas etnis, ekonomi dan administrasi. Jokowi memungkinkan menjadi pemimpin inklusif dan kurang partikularistik dalam membuat kebijakan. *Aset politik kedua* yang dimiliki Jokowi adalah keberhasilannya meluncurkan reformasi masyarakat luas. Jokowi mampu membuat keseimbangan portofolio kebijakan yang seimbang antara kepentingan masyarakat kecil dengan kepentingan pengusaha besar. Contohnya adalah seperti yang dilakukannya di Solo. Jokowi melakukan relokasi pedagang kaki lima menjadi pedagang formal dan memiliki tempat yang layak di pasar tradisional Solo sehingga pendapatan mereka meningkat. Pada saat yang sama, Jokowi juga memberi peluang bagi pembangunan hotel, apartemen dan hadirnya bisnis ritel seperti Solo Paragon, Center Point, Kusuma Tower dan Solo Square. Jokowi juga berhasil memperbaiki kinerja bawahannya dan menekan inefisiensi serta korupsi di dalam birokrasi. Kemampuan Jokowi untuk memediasi berbagai kepentingan, mengurangi birokrasi administrasi dan menciptakan peluang ekonomi baru telah melambungkan nama Jokowi ke pentas politik nasional maupun internasional dan memperkuat citranya sebagai pemimpin yang responsif dan reformis, sehingga menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri 'Walikota Terbaik' pada tahun 2011, tampil sebagai runner-up untuk 'World Mayor Prize' di awal tahun 2012 dan terpilih menjadi gubernur Jakarta pada September 2012 (Ibid).

Aspek ketiga yang berkontribusi untuk meningkatkan popularitas Jokowi adalah gaya kepemimpinan partisipatifnya. Dalam membuat keputusan Jokowi terlebih dahulu akan mendengarkan semua kalangan. Jokowi sabar membujuk dan bernegosiasi. Kegemaran Jokowi untuk blusukan ke lapangan juga telah menghipnotis masyarakat dan elit politik dan membangkitkan antusiasme masyarakat untuk mengidolakannya.

Dalam rangka memenangkan pemilihan umum, Jokowi mengandalkan partai politik sebagai kendaraannya. PDI-P merupakan partai politik pendukung utama Jokowi. PDI-P kemudian membangun koalisi dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Koalisi ketiga partai tersebut yaitu PDI Perjuangan (18,95 %), Partai Nasional Demokrat (6,7 %) dan Partai Kebangkitan Bangsa (9,04 %) menghasilkan kekuatan suara sebesar 34,06 % dan memperoleh sebanyak 191 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sementara itu, kekuatan partai pengusung Prabowo Subianto-pesaing Jokowi terdiri dari Partai Gerindra (11,81 %), Partai Persatuan Pembangunan (6,53 %), Partai Keadilan Sejahtera (6,7 %), dan Partai Amanat Nasional (7,59 %). Koalisi empat partai tersebut akan menghasilkan suara sebesar 31,63 % dan memperoleh 201 kursi.

Berdasarkan fakta tersebut nampak jelas bahwa di DPR periode 2014-2019, koalisi partai pendukung Prabowo memiliki jumlah kursi lebih banyak dibandingkan dengan koalisi partai pendukung Jokowi. Karenanya, jika Jokowi terpilih sebagai presiden, besar kemungkinan kedua koalisi ini akan beradu kekuatan.

¹³ *Ibid*

Dalam rangka mencapai kekuasaan, Jokowi tidak hanya bersandar pada dukungan dari partai politik pendukungnya tetapi juga dari masyarakat-masyarakat yang menyatakan diri sebagai relawan Jokowi. Masyarakat ini bukanlah kader maupun simpatisan dari PDI-P. Mereka secara spontan membentuk komunitas untuk mencalonkan Jokowi sebagai Presiden. Mereka pada umumnya adalah masyarakat yang berasal dari kalangan menengah ke bawah terdiri dari masyarakat petani, masyarakat nelayan, pedagang kaki lima, dan lain-lain yang berasal dari Aceh hingga Papua.

Di Aceh, tim relawan Jengjala Center mendeklarasikan diri mendukung Jokowi sebagai calon Presiden 2014. Deklarasi tersebut dilakukan di depan sekretariat Jengjala yang berada di Jalan Loeng. Deklarasi ini merupakan deklarasi perdana di Aceh untuk mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK. Menurut H. Sayed Fuad Zakaria yang merupakan koordinator relawan Jengjala Aceh dan juga anggota DPR RI dari partai Golkar, tim Jengjala Center Aceh adalah tim relawan yang langsung dibentuk oleh Jusuf Kalla dan seluruh Surat Kerja (SK) yang diberikan kepada relawan langsung berasal dari Jusuf Kalla. Tim ini mendukung pencalonan Jokowi-JK karena Jokowi dianggap sebagai orang yang merakyat dan Jusuf Kalla dianggap sebagai orang yang sangat berjasa bagi Perdamaian Aceh. Berkat peran aktif Jusuf Kalla pada masa peninjauan, perdamaian RI dengan GAM bisa diwujudkan pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.¹⁴

Di Jakarta, Komunitas Pedagang Kaki Lima (PKL) Jakarta juga membuat deklarasi untuk menyatakan dukungan terhadap pencalonan Jokowi sebagai presiden dalam pilpres 2014. Deklarasi itu diadakan di Posko Relawan Merah Putih, di jalan Cik Di Tiro 10, Menteng, Jakarta. Hampir 100 orang PKL hadir dalam deklarasi itu. Mereka merupakan anggota PKL Paguyuban Kota Tua, PKL Rusunawa Tambora, PKL Jembatan 5, serta PKL Pasar Senen.¹⁵

Di Yogyakarta dan sekitarnya, masyarakat mendeklarasikan gerakan gotong royong mendukung Jokowi atau disingkat Gong Jokowi di titik nol kilometer depan kantor pos besar Yogyakarta. Puluhan masyarakat yang tergabung di Gong Jokowi ini berasal dari beberapa elemen masyarakat dari Kabupaten Bantul, Sleman, Kulonprogo, Gunungkidul, Kota Yogyakarta, Kabupaten, Magelang, Temanggung Purwokerto, dan Klaten. Deklarasi dilakukan sebagai bentuk semangat gotong royong mereka mendukung Jokowi sebagai Capres. Mereka mengklaim bahwa gerakan mereka ini adalah gerakan murni masyarakat pendukung Jokowi dan bukan partai politik. Menurut masyarakat Yogyakarta, Jokowi merupakan sosok yang cocok memimpin Indonesia 2014 mendatang. *Track record* Jokowi sebagai pemimpin Jakarta dan Surakarta telah membuktikan bahwa Jokowi adalah sosok pemimpin yang mau dan bisa bekerja.¹⁶

Di Bali, relawan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) mendeklarasikan dukungannya terhadap pencalonan Joko Widodo. Menurut Wayan Tirja, Koordinator Almisbat Bali, mereka mendukung Jokowi karena Jokowi adalah seorang pemimpin yang tidak saja mau mendengarkan rakyat, tetapi juga mau bekerja sepenuh hati untuk kepentingan rakyat.¹⁷

¹⁴ Pendukung Jokowi-JK di Aceh Deklarasikan Relawan Jengjala. <http://aceh.tribunnews.com/2014/06/21/pendukung-jokowi-jk-di-aceh-deklarasikan-relawan-jengjala>. Diakses 8 November 2014

¹⁵ <http://news.detik.com/read/2014/06/02/172959/2597573/1562/komunitas-pedagang-kaki-lima-jakarta-deklarasi-dukung-jokowi-jk?9922022> Diakses 4 November 2014.

¹⁶ Dukung Capres, Puluhan Masyarakat DIY Dirikan Gong Jokowi. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/13/11/24/mwrcsm-dukung-capres-puluhan-masyarakat-diy-dirikan-gong-jokowi> Diakses 4 November 2014

¹⁷ Almisbat Bali Deklarasi Dukungan untuk Jokowi-JK. <http://m.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/22/almisbat-bali-deklarasi-dukungan-untuk-jokowi-jk>. Diakses 8 November 2014.

Di Kota Ambon, Maluku, komunitas pemuda dan mahasiswa Pela Gandong, menggelar aksi deklarasi mendukung Jokowi, sebagai calon presiden tahun 2014. Dukungan datang dari berbagai elemen masyarakat yang terdiri dari kelompok buruh, Pedagang kaki lima, serta kelompok kaum miskin kota yang tergabung dalam aliansi rakyat merdeka. Mereka mendukung pencalonan Jokowi dan karena dianggap mampu mensejahterahkan masyarakat di masa mendatang.¹⁸

Di Papua, relawan yang mengatas namakan relawan Honai Jokowi-JK, mendeklarasikan dukungannya untuk memenangkan pasangan calon Presiden Jokowi Widodo di Kabupaten Mimika. Deklarasi relawan kemenangan Jokowi-JK, diadakan di posko Honai Jokowi-JK. Menurut Anastasia Tekege, koordinator tim relawan Honai Jokowi-JK, relawan yang dibentuk dalam wadah tim Honai Jokowi-JK, merupakan relawan-relawan yang terdorong secara sukarela untuk membantu Jokowi-JK dalam memenangkan Pilpres 2014. Relawan yang ada di Papua kebanyakan dari kaum muda yang merupakan jurnalis, pekerja LSM, pegawai negeri sipil, dan juga masyarakat adat setempat. Mereka mendukung Jokowi karena Jokowi merupakan orang kecil dan program-program yang dicanangkan pasangan Jokowi-JK merupakan program yang disukai dan dianggap mampu dalam menjalankan roda pembangunan Bangsa Indonesia kedepannya.¹⁹

Kebijakan Pro Rakyat (Populis) Jokowi

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa Jokowi dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia karena Jokowi dinilai sebagai pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan populis. Berdasarkan hal tersebut maka perlu diketahui kebijakan pro rakyat (populis) seperti apa yang ditawarkan oleh Jokowi kepada masyarakat Indonesia.

Bagi para pemimpin populis, masalah paling krusial yang perlu ditangani secepatnya setelah terpilih menjadi pemimpin adalah mengenai penanggulangan kemiskinan. Para pemimpin mendapat dukungan masyarakat karena dianggap mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan yang diderita oleh rakyat kecil. Paling tidak ada dua pilihan yang dapat ditempuh oleh para pemimpin populis dalam rangka hal tersebut. Pilihan pertama adalah dengan memberikan uang dan subsidi besar-besaran kepada masyarakat miskin. Pilihan kedua adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Pilihan pertama biasanya dilakukan oleh para pemimpin populis radikal/karnivora. Pemimpin populis radikal lebih suka mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah. Karenanya, untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, para pemimpin radikal akan memberikan uang dan subsidi besar-besaran. Dana untuk subsidi diperoleh dari eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam negara atau melalui hutang luar negeri. Tindakan ini tentu akan menimbulkan efek serius di masa yang depan yaitu akan menyebabkan kemerosotan keuangan negara.

Sementara itu, pemimpin populis moderat/herbivora biasanya melakukan kombinasi diantara kedua pilihan tersebut. Pemimpin populis moderat akan memberikan subsidi secara hati-hati dan sekaligus berupaya menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan terciptanya lapangan pekerjaan, masyarakat akan memiliki penghasilan dan kemampuan daya beli sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Karenanya para pemimpin populis moderat akan bersikap ramah terhadap para investor asing. Semakin banyak para investor menanamkan modalnya didalam negeri maka semakin banyak lapangan kerja akan tercipta. Hal ini sangat penting untuk memperbaiki perekonomian negara.

¹⁸ Dukungan Jokowi Terus Mengalir Dari Masyarakat Sebagai Capres .<http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2020143/video-dukungan-jokowi-terus-mengalir-dari-masyarakat-sebagai-capres-2014>. Diakses 4 November 2014.

¹⁹ Relawan Honai Siap Menangkan Jokowi-JK di Mimika. <http://www.salampapua.com/fokus-mimika/191-relawan-honai-siap-menangkan-jokowi-jk-di-mimika>. Diakses 8 November 2014.

Berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan tersebut, Jokowi cenderung akan memilih pilihan kedua. Jokowi tetap memberikan subsidi kepada masyarakat Indonesia sekaligus berupaya menciptakan lapangan pekerjaan. Kebijakan subsidi Jokowi tertuang dalam program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Bagi Jokowi, pendidikan dan kesehatan merupakan bidang yang perlu menjadi prioritas. Apabila masyarakat Indonesia pintar dan sehat maka mereka akan menjadi manusia yang produktif yang berguna bagi pembangunan bangsa.

Sasaran program KIP adalah anak-anak yang kurang mampu dalam pembiayaan sekolah. Mereka akan mendapatkan bantuan biaya dari mulai tingkat SD hingga SMA. Anak-anak Indonesia yang memiliki KIP bisa sekolah sampai SMA dan SMK baik di sekolah negeri atau swasta.²⁰ Selain wajib belajar 12 tahun, Jokowi juga menyiapkan beasiswa bagi siswa-siswi yang tidak mampu dan berprestasi untuk melanjutkan studi ke jenjang kesarjana. Jokowi juga akan meningkatkan program magang kerja bagi siswa-siswi serta mahasiswa agar mereka memiliki ketrampilan praktis yang lebih baik. Jokowi berjanji akan mendayagunakan dana pendidikan 20 % dalam APBN untuk menjalankan program Indonesia Pintar.

Sementara itu, program KIS juga menjadi prioritas karena Jokowi meyakini bahwa jika warga sehat maka mereka akan mampu bekerja maksimal untuk warganya. Program KIS ini mendapatkan kritik dari beberapa politikus. Ada kekhawatiran bahwa program KIS akan tumpang tindih dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Menurut Rieke Diah Pitaloka, salah seorang dari Tim Pemenangan Jokowi, sistem yang merupakan implementasi dari UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU (BPJS) harus disiapkan terlebih dahulu. Sistem ini akan mengoreksi "kesalahan" JKN. Salah satunya, terkait prinsip portabilitas, yang jadi salah satu prinsip utama dalam prinsip SJSN, terutama Jaminan Kesehatan Sosial. Dengan prinsip portabilitas itu, seharusnya jaminan kesehatan tidak boleh bersifat kedaerahan. Jaminan kesehatan sosial yang wajib dilakukan negara harus bersifat nasional, bukan kedaerahan. Namun demikian, bukan berarti pemerintah daerah tidak boleh memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakatnya. Pemerintah daerah tetap dapat memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat didaerahnya sebagai komitmen politik. Akan tetapi, negara juga bisa melakukannya dengan memberikan peningkatan manfaat berupa peningkatan manfaat pelayanan dan fasilitas kesehatan.

Mengenai sumber anggaran yang akan dipergunakan untuk merealisasikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) tersebut, akan ada dua pilihan. *Pertama*, dengan mengalihkan bahan bakar minyak ke gas tanpa perlu menaikkan harga BBM serta melakukan penghematan listrik. Dengan demikian akan terjadi penghematan sebesar Rp 70 triliun. Pilihan *kedua*, dengan menaikkan *tax ratio* dari 12 % menjadi 14 %. Menurut Rieke, dengan menaikkan 2% pajak yang dihasilkan dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri akan tercipta penerimaan baru dalam APBN sebesar Rp 150 triliun. Sementara, menurut hitungan Tim Jokowi, anggaran kesehatan yang dibutuhkan ialah sebesar Rp 95 triliun. Dengan demikian pemasukan dana baru dari salah satu pilihan tersebut sudah dapat terpenuhi untuk menutupi anggaran dana kesehatan.²¹

²⁰ Jokowi Perkenalkan Kartu Indonesia Sehat dan Pintar di Medan.

<http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2061274/jokowi-perkenalkan-kartu-indonesia-sehat-dan-pintar-di-medan>. Diakses 4 November 2014

²¹. Ini Penjelasan Timses Jokowi soal Sumber Anggaran Kartu Indonesia Sehat. <http://nasional.kompas.com/read/2014/06/19/1937223/Ini.Penjelasan.Timses.Jokowi.soal.Sumber.Anggaran.Kartu.Indonesia.Sehat>. Diakses 8 November 2014.

Selain fokus pada program subsidi pendidikan dan kesehatan, kebijakan populis Jokowi lainnya adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk itu, Jokowi berjanji akan mencari investor sebanyak-banyaknya dan mendorong investasi ke daerah-daerah terutama ke provinsi dengan tingkat kemiskinan besar. Investasi tidak boleh terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera saja. Kepada para investor, Jokowi berjanji akan mengedepankan kebijakan yang ramah pasar dengan fokus pada peningkatan kemampuan tenaga kerja melalui pendidikan, reformasi birokrasi, konstruksi infrastruktur dan mendorong investasi energi.²² Kebijakan tersebut harus ditempuh oleh Jokowi dengan harapan akan ada banyak investor yang menanamkan investasinya dan lapangan pekerjaan baru akan tercipta di Indonesia.

Selain meningkatkan jumlah investor, Jokowi juga berjanji akan memperbaiki infrastruktur di daerah terpencil. Dengan demikian, akan ada banyak lapangan pekerjaan baru yang dibuka di daerah yang dapat menyerap tenaga kerja. Terkait dengan upah tenaga kerja, Jokowi mengklaim bahwa kebijakannya akan pro terhadap pengupahan buruh. Hal tersebut pernah dilakukannya ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi merupakan gubernur pertama yang mau menaikkan upah hingga 44 %.²³

Jokowi juga ingin menjadikan ekonomi kreatif (*knowledge economy*) sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Menurut Jokowi, ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor perekonomian penting yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan rakyat. Ada dua hal penting yang diamati oleh Jokowi terkait ekonomi kreatif. Pertama, Jokowi melihat bahwa ekonomi kreatif di Indonesia didominasi oleh generasi muda usia kerja yang tidak masuk sektor kerja formal, tetapi membangun basis ekonomi melalui kreasi dan inovasi yang dimilikinya. Kedua, Jokowi melihat bahwa dengan kekayaan budaya Indonesia yang sangat beragam dan didukung oleh tingginya populasi orang muda, bangsa Indonesia seharusnya bisa menjadi pengeksport ekonomi kreatif terbesar di dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah harus memberikan perhatian khusus melalui pendidikan-pendidikan dan keterampilan yang mendukung kreasi dan inovasi generasi muda Indonesia, serta memfasilitasi melalui berbagai program ekonomi kreatif untuk mendorong generasi muda Indonesia masuk dalam industri ekonomi kreatif. Menurut Jokowi, bidang-bidang pada ekonomi kreatif yang perlu ditekankan adalah musik, animasi, seni pertunjukan, video dan desain. Selama ini, ruang-ruang ekonomi kreatif tersebut belum mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Jika pemerintah memberikan dukungan penuh, maka ekonomi kreatif bisa dikembangkan secara optimal.²⁴

²² Ini Kebijakan Jokowi Jika Jadi Presiden. <http://sp.beritasatu.com/home/ini-kebijakan-jokowi-jika-jadi-presiden/55383>. Diakses 4 November 2014.

²³ Jokowi Siapkan Kartu Indonesia Sehat dan Pintar. <http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/06/15/269585214/Jokowi-Siapkan-Kartu-Indonesia-Sehat-dan-Pintar>. Diakses 4 November 2014.

²⁴ Timses: Jokowi Ingin Ekonomi Kreatif Jadi Tulang Punggung Perekonomian <http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/06/16/n78pdg-timses-jokowi-ingin-ekonomi-kreatif-jadi-tulang-punggung-perekonomian>. Diakses 8 November 2014.

Jika program KIP dan KIS berjalan dengan baik serta lapangan pekerjaan tercipta secara besar-besaran maka dapat diharapkan Indonesia akan mampu mengatasi masalah kemiskinan yang telah mengakar dalam. Jokowi harus mampu menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang produktif sehingga mereka bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa harus bergantung pada subsidi pemerintah. Penderitaan rakyat harus segera diakhiri dan semuanya tersebut sangatlah bergantung pada kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh Jokowi sebagai pemimpin populis baru Indonesia.

Arah Kebijakan Luar Negeri Jokowi

Pada 22 Juni 2014, Joko Widodo dan Prabowo Subianto (pesaingnya) beradu gagasan dalam Debat Capres Jilid III yang bertema Politik Internasional dan Ketahanan Nasional. Melalui debat capres Jilid III ini dapat diketahui pandangan Jokowi terhadap dunia internasional. Hal ini dianggap penting mengingat di kancah internasional, politik global demi kepentingan nasional sangat vital bagi negara. Dalam visi misinya, Jokowi bertekad mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

Ada empat prioritas yang dikedepankan dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. *Pertama*, perlindungan warga negara, terutama Tenaga Kerja Indonesia. *Kedua*, perlindungan sumber daya maritim dan perdagangan, *ketiga*, produktivitas dan daya saing, *keempat*, menjaga keamanan regional kawasan.²⁵

Jokowi secara tegas menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dengan penduduk muslim terbesar di dunia, juga sebagai negara kepulauan dan sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, akan terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia perlu didukung oleh ketahanan nasional yang kuat. Karenanya, kesejahteraan prajurit, modernisasi alat-alat pertahanan termasuk pertahanan *cyber* dan *hybrid* harus menjadi prioritas. Jokowi berencana akan melakukan modernisasi alat pertahanan melalui pemasangan *drone* di empat kawasan yaitu di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.

Dengan pemasangan drone tersebut, pemerintah dapat memantau kekayaan ekonomi maritim Indonesia sehingga *illegal fishing* dan *illegal logging* dapat dicegah. Menurut Jokowi, kekayaan laut Indonesia senilai Rp 300 triliun telah hilang karena *illegal fishing*. Oleh sebab itu, pemasangan *drone* menjadi sesuatu hal yang sangat penting.

Jokowi juga menegaskan bahwa geopolitik kini sedang bergerak ke timur. Indonesia berada di tengah pergeseran tersebut. Karenanya, Indonesia perlu membangun kekuatan maritim agar Indonesia menang di laut, berwibawa, dan dihormati.

Menurut Baiq Wardhani dan Asrudin, pemaparan politik luar negeri Jokowi tersebut sudah sesuai dengan teori yang berlaku dalam ilmu hubungan internasional. Para pakar HI seperti H.J.Morgenthau, Organski, Coulombis, dan Wolfe menekankan bahwa ada dua jenis unsur-unsur kekuatan nasional yaitu unsur-unsur kasat mata (*tangible*) dan unsur-unsur tak kasat mata (*intangible*). Yang dimaksud dengan unsur kasat mata adalah geografi, sumber daya alam (SDA), kemampuan industri, kesiagaan militer, dan penduduk sedangkan unsur tak kasat mata adalah kualitas diplomasi dan moral nasional.

²⁵ Pengamat: Jokowi Telah Lahirkan Doktrin Baru Politik Luar Negeri Indonesia. <http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/24/pengamat-jokowi-telah-lahirkan-doktrin-baru-politik-luar-negeri-indonesia014>

Beberapa unsur kasat mata yang dimiliki Indonesia telah menjadi perhatian Jokowi seperti letak geografis yang strategis dengan luas wilayah yang masif, sumber daya alam yang melimpah, potensi kemampuan industri, militer yang berpotensi kuat dengan pelatihan dan alutsista modern, serta jumlah penduduk yang besar. Akan tetapi, unsure tak kasat mata sering kali diabaikan padahal unsure tak kasat mata yang berupa kualitas diplomasi dan moral nasional tersebut merupakan modal penting bagi pembangunan bangsa. Apabila Indonesia memiliki diplomat-diplomat yang baik dan berkualitas dan masyarakatnya memiliki moral yang baik maka Indonesia akan menjadi negara yang berwibawa, dihormati dan disegani. Oleh sebab itu, tantangan politik luar negeri bebas aktif Jokowi yang terbesar adalah bagaimana membuat unsur kekuatan yang kasat mata dapat bersinergi dengan unsur kekuatan yang tak kasat mata.²⁶

Dalam pencapaian kepentingan nasional, Jokowi lebih mengedepankan penggunaan instrument diplomasi. Diplomasi dapat dilakukan dalam tiga jalur yaitu diplomasi antarpemerintah (GtoG), antarpelaku bisnis (BtoB), dan antar masyarakat dengan masyarakat negara lain (PtoP).

Menurut Jokowi, dengan cara-cara seperti itulah, perselisihan antara Indonesia dengan negara-negara lain baik terkait persoalan di darat maupun di laut bisa diselesaikan. Jokowi menegaskan bahwa setiap persoalan dapat diselesaikan tanpa harus melalui perang. Diplomasi dengan pemerintah dan pemerintah akan diutamakan. Kalau diplomasi tidak berhasil maka persoalan dapat dibawa ke Mahkamah Internasional. Akan tetapi, seintensifnya persoalan harus diselesaikan dengan diplomasi. Dalam bayangan Jokowi, penyelesaian masalah melalui senjata atau perang merupakan pilihan akhir yang harus ditempuh.²⁷

Terkait persoalan tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri, kebijakan Jokowi adalah memperbaiki sistem tenaga kerja Indonesia. Sebelum melakukan pengiriman TKI, para TKI terlebih dulu harus mengikuti proses seleksi dan pelatihan. Lalu diadakan pengawasan secara detail. Setelah dikirim ke luar negeri dilakukan pengecekan data di Kedubes. Harus ada kepastian bahwa data sudah komplit dan akurat. Hal ini penting agar KBRI bisa memberi perlindungan kepada mereka. Selanjutnya perlu dilakukan pengontrolan, pengecekan dan pengawasan setiap bulan mengenai kondisi TKI di luar negeri. Para petugas di luar negeri harus memastikan bahwa para TKI dalam kondisi baik. Apabila terjadi penyiksaan, dan penganiayaan, KBRI harus segera menanganinya. Indonesia harus tegas menolak mengirim TKI kepada negara yang tidak punya perlindungan TKI.²⁸

Respon Masyarakat Internasional Terhadap Jokowi

Nama Joko Widodo atau Jokowi bukan hanya populer di dalam negeri tetapi juga di dunia internasional. Sejak masih menjadi Walikota Solo, capres yang diusung PDI Perjuangan, Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Hati Nurani Rakyat (Hanura), Jokowi memang sudah dikenal di dunia internasional. Pada tahun 2012, Jokowi masuk nominasi 25 walikota terbaik dunia dan menduduki urutan pertama walikota terbaik dunia versi *The City Mayors Foundation*. Di urutan kedua, ada Ron Huldai, Walikota Tel Aviv, Israel. Berikutnya Edgardo Pamintuan (Walikota Angeles City, Filipina), Park Wan-suu (Walikota Changwoon City, Korea Selatan), dan Melih Gokcek (Walikota Ankara, Turki).²⁹

²⁶ Baiq Wardhani dan Asrudin, *Tantangan Politik Luar Negeri Jokowi*. <http://sinarharapan.co/news/read/141023095/-div-tantangan-politik-luar-negeri-jokowi-div-div-div-div>

²⁷ Opcit

²⁸ Ibid.

²⁹ *Capres Jokowi di Mata Internasional, The Man in the Madras Shirt*. <http://www.nefosnews.com/post/internasional/capres-jokowi-di-mata-internasional-the-man-in-the-madras-shirt>

Pada 20 September 2012, Jokowi memenangkan kursi Gubernur DKI Jaya. Berbagai gebrakan dilakukannya. Namanya semakin melambung saat melantik 415 pejabat (44 camat, 34 non-camat, 267 lurah, dan 73 non-lurah). Hasil lelang jabatan lurah dan camat membuat nama Jokowi masuk Museum Rekor Indonesia (Muri) bahkan masuk rekor dunia dengan kategori pelantikan pejabat terbanyak.

Gebrakan Jokowi dengan aksi blusukan-nya sangat menarik perhatian dunia internasional. Namanya pun semakin beredar dalam orbit dunia. Mantan pengusaha furnitur asal Solo, Jawa Tengah, ini kembali meraih penghargaan dunia. Penghargaan *The Leading Global Thinkers of 2013* versi pembaca Majalah *Foreign Policy* menempatkan nama Jokowi di antara 134 tokoh terkemuka dunia yang sukses melakukan gebrakan. Lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, ini berdiri sejajar dengan Paus Fransiskus dan pembocor informasi Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) Edward Snowden. Pada 20 Maret 2014, tokoh yang dikenal sederhana kembali meraih predikat *The World's 50 Greatest Leaders* versi Majalah *Fortune*. Namanya kembali berderet dengan Paus Fransiskus. Tokoh dunia lainnya yang meraih penghargaan sama adalah Kanselir Jerman Angela Merkel, dan Pemimpin Tibet Dalai Lama.

Dunia internasional menyambut positif naiknya Jokowi menuju kursi RI 1. Bahkan, *BBC* memberi julukan Jokowi sebagai *The Next Obama*. Sama halnya dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang awalnya tidak diperhitungkan menjadi orang nomor satu di AS, Jokowi disebut-sebut mewakili sosok yang sama di Indonesia. Komentar senada juga diungkapkan Greg Sheridan, kolumnis Australia. Dalam artikelnya yang dimuat di *The Australian*, Sheridan mengulas fenomena Jokowi dengan judul *Jakarta's governor could be Indonesia's Obama*.

Jokowi juga menarik minat majalah terkemuka dunia, *Time*. *The Man in the Madras Shirt* adalah sebutan *Time* untuk Jokowi. Berikutnya, majalah *The Economist* edisi Asia menjuluki Jokowi sebagai *Mr Fix*. Julukan tersebut muncul karena kegemaran Jokowi untuk *blusukan*, dari pasar, sungai, hingga berbagai tempat yang tak terduga. *Mr Fix* di sini bisa diartikan sebagai seseorang yang merapikan, memperbaiki, atau memastikan.³⁰

Pada acara pelantikan Jokowi, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Scot Marciel punya pandangan tersendiri akan sosok Jokowi. Wakil utama pemerintah Amerika di Indonesia tersebut menilai, Jokowi merupakan Gubernur yang memiliki banyak gagasan dan ide untuk membangun Jakarta. Karenanya, Amerika akan mendukung penuh kinerja yang baik tersebut. Scot dengan tegas menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mendukung segala hal yang dilakukan oleh Jokowi.³¹

Selain dukungan dari Amerika, Jokowi juga mendapat dukungan positif dari negara tetangga, Australia. Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott mengatakan Indonesia merupakan negara yang penting bagi Australia. Indonesia merupakan negara besar dengan populasi warga muslim terbanyak yang berhasil menjalankan demokrasi dengan baik. Karenanya, ada kemungkinan Indonesia akan muncul sebagai negara adidaya di Asia. Pelaksanaan pemilu yang demokratis dan transisi pemerintahan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Jokowi yang berlangsung dengan baik membuat Australia semakin mantap untuk menjalin hubungan yang baik dengan Indonesia. Menurut Abbot, kebijakan luar negeri Indonesia selalu membutuhkan Indonesia karenanya kedepannya perlu dilakukan pendekatan-pendekatan yang dapat mempelancar hubungan antara Australia dan Indonesia.³²

³⁰ Ibid.

³¹ Jokowi di Mata Amerika
Wednesday.<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/01/09/mgc8mc-jokowi-di-mata-amerika>

³² PM Abbott: Pelantikan Jokowi Penting bagi Australia
<http://news.liputan6.com/read/2121597/pm-abbott-pelantikan-jokowi-penting-bagi-australia>

Penutup

Artikel ini menyimpulkan bahwa Jokowi sebagai pemimpin populis baru Indonesia termasuk dalam kelompok populis moderat/herbivore. Ada beberapa hal yang memperkuat argumen tersebut. *Pertama*, Jokowi merupakan pemimpin yang menghargai nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Jokowi meminta partisipasi masyarakat Indonesia untuk mengirimkan nama-nama calon menteri yang akan menjabat dalam kabinetnya. Jokowi menetapkan menteri-menteri yang berasal dari berbagai etnis dan agama mulai dari Aceh hingga Papua, mulai dari beragama Islam hingga beragama Kristen. Hal ini adalah bentuk penghargaan Jokowi terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang pada pemerintahan sebelumnya seringkali dikesampingkan. *Kedua*, Jokowi merupakan pemimpin yang peduli kepada penderitaan masyarakat kecil. Karenanya Jokowi memberikan subsidi di bidang kesehatan dan pendidikan. Kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas karena dengan memiliki taraf pendidikan dan kesehatan yang bagus maka akan tercipta manusia-manusia Indonesia yang produktif dan siap berkompetisi. Dengan begitu, mereka akan punya penghasilan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa harus bergantung kepada subsidi pemerintah. *Ketiga*, Jokowi bersikap ramah dan mau bekerjasama dengan pihak asing tetapi tetap mengedepankan kepentingan nasional. Hal ini terungkap dalam pernyataannya tentang sikap Malaysia yang seringkali mengganggu Indonesia. Jokowi menekankan akan bertindak tegas terhadap pihak asing termasuk Malaysia jika terbukti negara tersebut mengusik kepentingan nasional Indonesia seperti merebut pulau-pulau terluar Indonesia, melecehkan tenaga kerja Indonesia atau mengklaim budaya-budaya asli milik Indonesia.

Meski Jokowi termasuk dalam kategori pemimpin populis yang moderat/herbivora, Beliau tetap berkomitmen untuk membantu masyarakat kecil untuk mengakhiri penderitaan mereka. Jokowi berjanji dan akan berusaha membantu masyarakat kecil untuk keluar dari jurang kemiskinan. Upaya Jokowi tersebut akan terwujud jika mendapat dukungan dari semua pihak baik kelompok elit/atas maupun kelompok menengah ke bawah. Karenanya, program populis Jokowi perlu didukung oleh semua komponen masyarakat. Niscaya, Indonesia akan bergeser dari negara berkembang menjadi negara maju.

Daftar Referensi

- Castaneda, Jorge. 2006. "Latin America's Turn Left", *Foreign Affairs*, May/June.
- Dodson, Michael dan Dorraj, Manochehr. 2008. "Populism and Foreign Policy in Venezuela, and Iran", *The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations*, Winter/Spring.
- Knight, Alan. 1998. "Populism and Neopopulism in Latin America, Especially Mexico", *Journal of Latin American Studies*, Vol. 30, No. 2, (Cambridge University Press, May).
- Llosa, Alvaro Vargas. *Carnivores vs. Herbivores*,
http://www.ideasinactiontv.com/tcs_daily/2006/01/carnivores-vs-herbivores.html
- Roberts, Kenneth M. 2007. "Latin America's Populist Revival", *SAIS Review*, Vol. XXVII No. 1 (Winter-Spring).
- Weyland, Kurt. 2001. "Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics", *Comparative Politics*, Vol. 34, No. 1, (Oktober).
- www.pemilu.com/profil/jokowi/. Diakses 4 November 2014.
- <http://news.liputan6.com/read/710305/jokowi-relokasi-warga-ria-rio-ke-rusunpinus-elok-rampung>. Diakses 4 November 2014.
- Dengan.Rusun.Jokowi.Buka.Peluang.Kehidupan.Lebih.Baik,
<http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/06/2042403/>. Diakses 4 November 2014.
- Siapa Jokowi & JK. <http://microsite.metrotvnews.com/jokowi-jk/profile>. Diakses 4 November 2014.

SPEKTRUM

Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional
Volume 13 No. 1 Januari 2016

- Pendukung.Demokrat.Golkar.Gerindra.Pilih.Jokowi.Jadi.Presiden.
<http://nasional.kompas.com/read/2013/12/01/1710467/>. Diakses 4 November 2014.
- Daud Anselmus , Jokowi Dimata Pengamat Asing,
<http://www.tempokini.com/2014/05/jokowi-dimata-pengamat-asing/>.
Diakses 4 November 2014.
- Deklarasi tim relawan Jenggala Center Aceh untuk Jokowi-JK berjalan tertib.
<http://lintasgayo.co/2014/06/20/deklarasi-tim-relawan-jenggala-center-aceh-untuk-jokowi-jk-berjalan-tertib>. Diakses 8 November 2014.
- 13 Relawan Pendukung Jokowi-Jusuf Kalla kuatkan Tim Pemenangan.
<http://posaceh.com/index.php/sosok/item/392-13-relawan-pendukung-jokowi-jusuf-kalla-kuatkan-tim-pemenangan> Diakses 4 November 2014.
- Pendukung Jokowi-JK di Aceh Deklarasikan Relawan Jenggala.
<http://aceh.tribunnews.com/2014/06/21/pendukung-jokowi-jk-di-aceh-deklarasikan-relawan-jenggala>.Diakses 8 November 2014.
<http://news.detik.com/read/2014/06/02/172959/2597573/1562/komunitas-pedagang-kaki-lima-jakarta-deklarasi-dukung-jokowi-jk?9922022> Diakses 4 November 2014.
<http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2023215/sejuta-tanda-tangan-warga-bogor-dukung-jokowi-presiden> Diakses 4 November 2014.
- Dukung Capres, Puluhan Masyarakat DIY Dirikan Gong Jokowi.
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/13/11/24/mwrcsm-dukung-capres-puluhan-masyarakat-diy-dirikan-gong-jokowi> Diakses 4 November 2014.
- Almisbat Bali Deklarasi Dukungan untuk Jokowi-JK.
<http://m.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/22/almisbat-bali-deklarasi-dukungan-untuk-jokowi-jk>. Diakses 8 November 2014.
- Dukungan Jokowi Terus Mengalir Dari Masyarakat Sebagai Capres .<http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2020143/video-dukungan-jokowi-terus-mengalir-dari-masyarakat-sebagai-capres-2014>. Diakses 4 November 2014.
- Relawan Honai Siap Menangkan Jokowi-JK di Mimika.
<http://www.salampapua.com/fokus-mimika/191-relawan-honai-siap-menangkan-jokowi-jk-di-mimika>. Diakses 8 November 2014.
- Jokowi Diminta Berani Ambil Kebijakan Tak Populis.
<http://news.liputan6.com/read/2121242/jokowi-diminta-berani-ambil-kebijakan-tak-populis> . Diakses 4 November 2014.
- PM Abbott: Pelantikan Jokowi Penting bagi Australia.
<http://news.liputan6.com/read/2121597/pm-abbott-pelantikan-jokowi-penting-bagi-australia>
- Pengamat: Jokowi Telah Lahirkan Doktrin Baru Politik Luar Negeri Indonesia.
<http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/24/pengamat-jokowi-telah-lahirkan-doktrin-baru-politik-luar-negeri-indonesia014>

KETENTUAN PENULISAN
Jurnal SPEKTRUM

Redaksi Jurnal SPEKTRUM menerima tulisan dari berbagai sumber untuk dimuat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah dapat berupa hasil penelitian, artikel yang berisi pemikiran dan review terhadap sebuah buku.
2. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia Baku atau bahasa Inggris. Naskah dikumpulkan dalam bentuk hasil cetakan komputer sebanyak 1 (satu) eksemplar disertai disket atau CD dalam format MS Word ukuran kwarto, 1,5 spasi, dan memuat 3000 - 5000 kata.
3. Judul ditulis singkat, informatif dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
4. Sistematika penulisan tidak terlatu ketat, namun untuk laporan penelitian disarankan memuat hal-hal sebagai berikut: Judul, Nama lengkap penulis dan instansi tempat penulis bekerja, Abstract, Pendahuluan, Hasil dan Pembahasan, Penutup, Daftar Referensi.
5. Untuk naskah berupa hasil pemikiran, disarankan memuat hal-hal sebagai berikut: Judul, Nama lengkap penulis dan instansi tempat penulis bekerja, Abstract, Pendahuluan, Pembahasan, Kesimpulan dan Saran, Daftar Pustaka. Tabel dan gambar (jika ada) harus diberi judul berspasi tunggal, nomor dan sumber harus jelas. Daftar Referensi sebaiknya menggunakan satu sistem secara konsisten.
6. Redaksi berhak mengedit ejaan/tata tulis dan tata bahasa naskah yang dimuat.

Alamat Redaksi:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim
Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Semarang 50236
Telp. (024) 8505680 Fax. (024) 8505680
e-mail: jurnalspektrum@unwahas.ac.id